

**TESIS**

**ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN  
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PERGURUAN TINGGI  
SWASTA DENGAN GENDER, PENGALAMAN DAN HUBUNGAN  
ISTIMEWA SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



**Disusun oleh:**

**DINI WINDARTANTI**

**18919013**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**DINI WINDARTANTI**

No. Mhs. : 18919013

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN FRAUD  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN  
GENDER, PENGALAMAN DAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

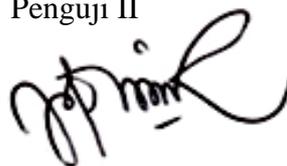
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Penguji II



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.



## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Jumat, 11 November 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DINI WINDARTANTI  
No. Mahasiswa : 18919013  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.  
Judul Tugas Akhir :

**ANALISIS FRAUD PENTAGON TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN  
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PERGURUAN TINGGI  
SWASTA DENGAN GENDER, PENGALAMAN DAN HUBUNGAN ISTIMEWA  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus ( Wajib Mengulang )
Dengan Nilai : <b>A</b>	

Penguji I : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.  
Penguji II : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

**Catatan:** Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa sallam, karena NikmatNya sehingga penulis dimudahkan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “*Analisis Fraud Pentagon Terhadap Upaya Pengendalian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi Swasta dengan Gender, Pengalaman dan Hubungan Istimewa Sebagai Variabel Moderasi*”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya kemampuan penulis. Namun bantuan dan doa dari berbagai pihak terutama dari kedua orang tua penulis dan dosen pembimbing sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yang tiada henti berjuang, berkorban dan mendoakan penulis agar lancar dalam penulisan tesis. Kemudian ucapan terimakasih juga kepada Papa Barori Budiaji yang selalu mendoakan, setia mendampingi memberikan motivasi, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan penuh kerendahan hati membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan tesis. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan. Ucapan terima kasih yang setulusnya peneliti sampaikan pula kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D.,CFrA selaku Ketua Jurusan Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.
4. Seluruh dosen dan staf di lingkungan civitas akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, terimakasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
5. Kepada seluruh responden yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner.
6. Kepada seluruh keluarga besar Sri Handoko khususnya Kakung Nurdjijanto, Uti Susi Herawati, Dina Widyastrini dan Dhono Herinto , terimakasih atas doa dan supportnya yang tak pernah putus untuk penulis.
7. Kepada Eyang Suwanti, terimakasih atas doa dan supportnya yang selalu ada untuk kami.
8. Kepada anak – anaku tercinta Ardaya Aji Nurrahman, Erlangga Putra Aji Nurrahman dan Nadzifa Widyataftantri terimakasih sudah selalu mendoakan mama.
9. Kepada sahabatku Lidya Tri Putri Yulianti, terimakasih sudah menjadi sahabat, saudara dan keluarga sampai sekarang ini,,*always keep going together* ya.
10. Kepada sahabatku Ratri Ayuningtyas, terimakasih untuk support dan doanya,,juga sudah selalu ada buat penulis.
11. Kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

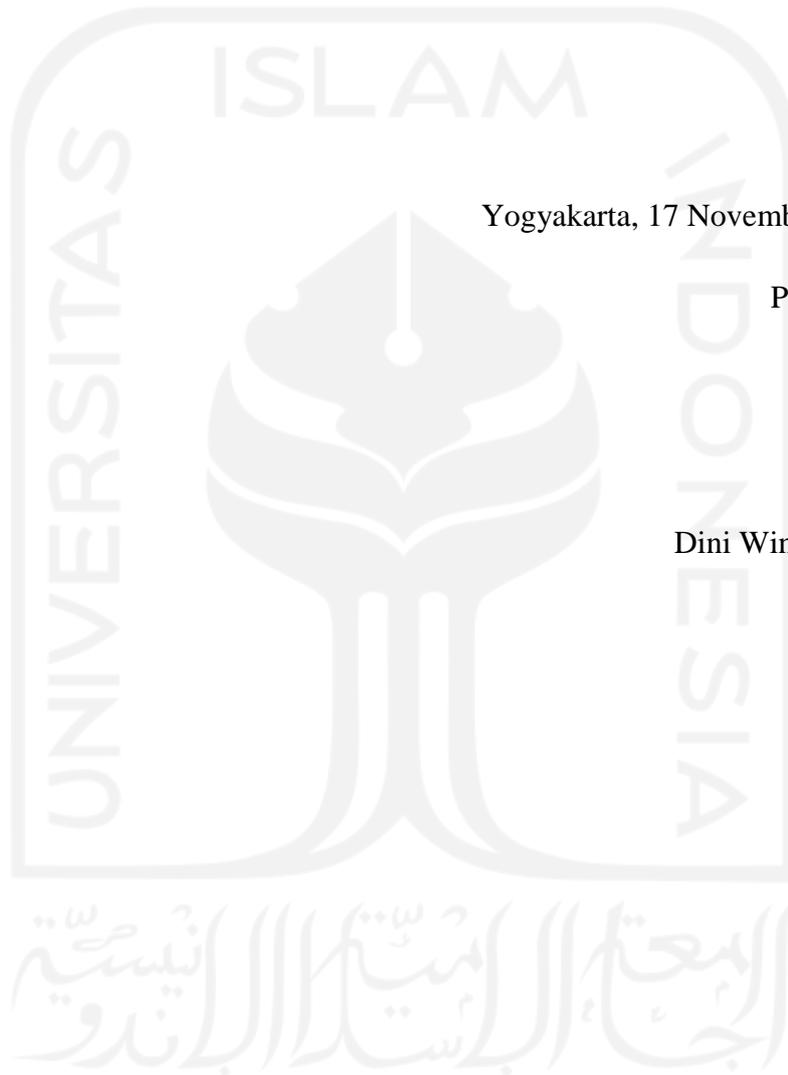
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu

pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Akhir kata dari penulis, segala kebaikan yang telah diniatkan maupun dilakukan kepada penulis semoga mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, 17 November 2022

Penulis,

Dini Windartanti



## DAFTAR ISI

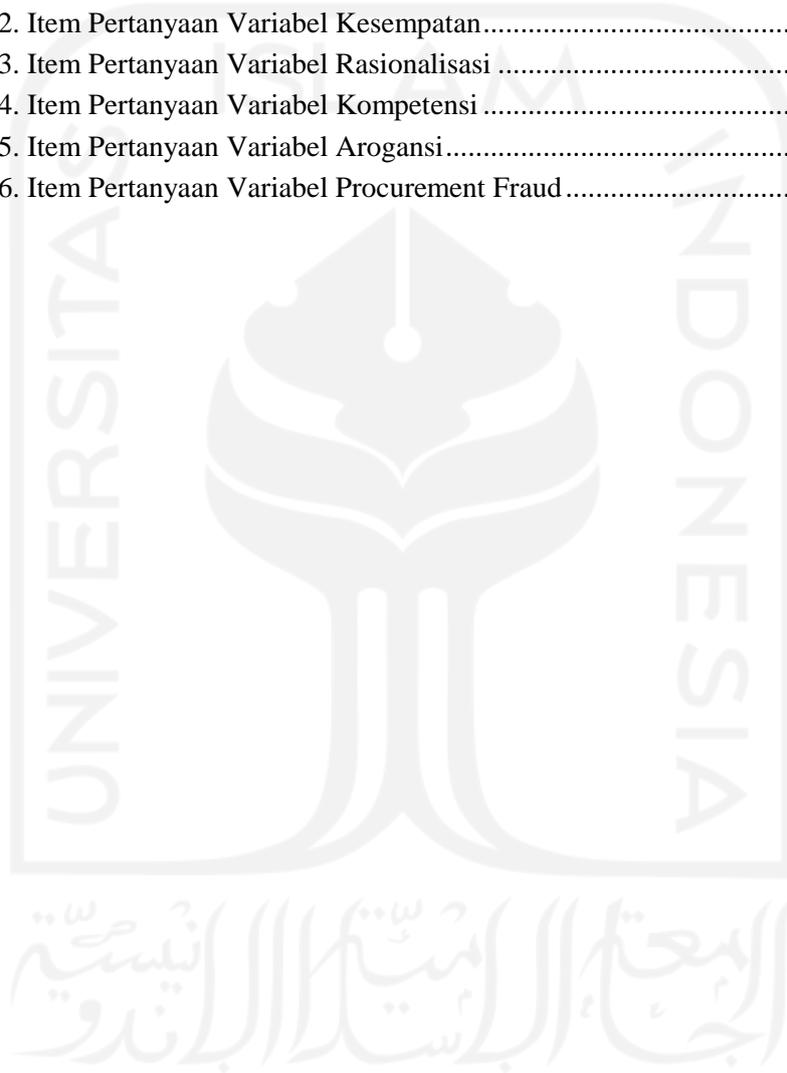
HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	2
BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL .....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
BAB I.....	13
1.1. Latar Belakang Masalah .....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian .....	20
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.5. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
2.1. Teori Fraud Pentagon.....	24
2.2. <i>Procurement</i> (Pengadaan Barang dan Jasa) .....	26
2.3. Fraud.....	28
2.3.1. <i>Fraud</i> Pengadaan Barang ( <i>Procurement Fraud</i> ) .....	31
2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang ( <i>Procurement Fraud</i> ).....	34
2.4. Variabel Moderasi .....	42
2.4.1. Gender.....	42
2.4.2. Pengalaman .....	43
2.4.3. Hubungan Istimewa (RPT/ <i>Related Party Transaction</i> ) .....	45
2.5. Penelitian Terdahulu .....	47

2.6.	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	51
2.7.	Pengembangan Hipotesa.....	52
BAB III.....		61
3.1.	Metode Penelitian .....	61
3.2.	Populasi dan Sampel.....	61
3.3.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	62
3.4.1.	Tekanan ( <i>Pressure</i> ) .....	63
3.4.2.	Kesempatan ( <i>Opportunity</i> ).....	63
3.4.3.	Rasionalisasi ( <i>Rationalization</i> ).....	64
3.4.4.	Kompetensi ( <i>Competence</i> ). .....	65
3.4.5.	Arogansi ( <i>Arrogance</i> ). .....	65
3.4.6.	<i>Gender</i> .....	66
3.4.7.	Pengalaman .....	66
3.4.8.	Hubungan Istimewa.....	66
3.5.	Variabel Dependen .....	67
3.6.	Teknik Analisis Data .....	68
3.7.	Pengujian Kualitas Data.....	68
3.7.1.	Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	69
3.7.2.	Uji <i>R-Square</i> ( $R^2$ ) .....	69
3.7.3.	Uji T-Statistik.....	69
3.7.4.	<i>Path Coefficient</i> .....	70
BAB IV .....		71
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	71
4.2	Deskripsi Responden .....	72
4.2.1	Hasil Pengujian Kualitas Data.....	74
4.2.2	Hasil Uji <i>Reliabilitas Data</i> .....	77
4.3	Hasil Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	77

4.3.1 Hasil Uji <i>Collinearity</i> ( <i>Inner VIF Values</i> ) .....	77
4.3.2 Hasil Uji <i>Koefisien Determinan</i> ( <i>R-Square</i> ).....	78
4.3.3 Hasil Uji <i>Signifikansi</i> ( <i>Uji-t</i> ) .....	78
4.3.4 Keterkaitan Subgrup <i>Path</i> .....	85
4.4 Pembahasan .....	87
4.4.1 Tekanan tidak berpengaruh terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa .....	87
4.4.2 Kesempatan berpengaruh positif terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa .....	88
4.4.3 Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa .....	89
4.4.4 Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa .....	90
4.4.5 Arogansi tidak berpengaruh terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa .....	91
4.4.6 Gender, Pengalaman dan Hubungan Istimewa tidak memoderasi terhadap pengendalian <i>fraud</i> dalam pengadaan barang dan jasa.....	91
BAB V .....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Kontribusi Penelitian .....	95
5.3 Implikasi Praktis .....	96
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	96
5.5 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98
DAFTAR LAMPIRAN .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan Teori Fraud .....	26
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraud Laporan Keuangan .....	48
Tabel 3.1. Item Pertanyaan Variabel Tekanan.....	63
Tabel 3.2. Item Pertanyaan Variabel Kesempatan.....	64
Tabel 3.3. Item Pertanyaan Variabel Rasionalisasi .....	64
Tabel 3.4. Item Pertanyaan Variabel Kompetensi .....	65
Tabel 3.5. Item Pertanyaan Variabel Arogansi.....	66
Tabel 3.6. Item Pertanyaan Variabel Procurement Fraud.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Fraud Triangle.....	24
Gambar 2.2. Kerangka Fraud Diamond .....	25
Gambar 2.3. Kerangka Fraud Pentagon .....	26
Gambar 2.4. Model Penelitian.....	52
Gambar 2.5 Kerangka Model Path dengan Grup Gender Laki-Laki .....	79
Gambar 2.6 Kerangka Model Path dengan Grup Gender Perempuan.....	80
Gambar 2.7 Kerangka Model Path dengan Grup Ada Pengalaman .....	81
Gambar 2.8 Kerangka Model Path dengan Grup Tidak Ada Pengalaman.....	82
Gambar 2. 9 Kerangka Model Path dengan Grup Ada Hubungan Istimewa .....	83
Gambar 2.10 Kerangka Model Path dengan Grup Tidak Ada Hubungan Istimewa .....	84



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi merupakan unit akademis yang menyelenggarakan proses pendidikan. Pendidikan memiliki maksud yang lebih tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, fasilitas yang memadai harus didukung. Fasilitas yang lengkap diperlukan untuk menjadikan kegiatan mengajar menjadi mudah. Menurut Jamil (2012), pendidikan tinggi sebagai sarana untuk menghasilkan siswa yang mempunyai moral. Agar menjadi mahasiswa yang mempunyai moral, perguruan tinggi mesti bebas dari praktik korupsi yang ada. Kasus korupsi yang berlangsung di perguruan tinggi merupakan hantaman berat bagi institusi pendidikan di Indonesia. Agar pendidikan lebih baik di waktu mendatang, lembaga pendidikan yang menjadi wadah/tempat masyarakat untuk bekerja sama secara sistematis, tertib dan terkendali mesti sanggup memakai fasilitas yang ada. Ketidakefektifan pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi dapat menimbulkan dugaan kasus korupsi.

Gambaran *fraud* di Perguruan Tinggi terungkap dari laporan media cetak dan jurnal. Sebagai contoh, *Australian Broadcasting Corporation* memberitakan bagaimana standar universitas Australia dikompromikan dengan tindakan *fraud*. Hal itu terjadi akibat desakan pihak universitas untuk merekrut mahasiswa asing dan memastikan mereka lulus ujian masuk, sehingga mereka bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. *International Education Studies*, mengungkap kasus Dekan Perguruan Tinggi di Rusia. yang menerima suap sebesar €30.000 atas pengakuan PhD, dan Kepolisian Moskow melaporkan sekitar 30-40 profesor di Rusia ditangkap setiap tahun karena suap memberikan penilaian yang baik. Pada bulan Mei 2015, otoritas Afrika Selatan menutup 42 Perguruan Tinggi dan universitas palsu yang menawarkan program palsu dan tidak terakreditasi, serta menawarkan gelar dalam waktu 15 hari. Di Nigeria, kejahatan *fraud* paling sering terjadi di

kalangan staf akademik, khususnya dalam promosi, jurnal, publikasi buku dan eksploitasi uang untuk nilai (Mohamedbhai, 2016)

Tidak berbeda dengan masalah yang berlangsung di luar negeri di atas, di Indonesia, lembaga pendidikan juga sudah menjadi bagian dari masalah *fraud*. Kompas (2020) mewartakan kasus *fraud* yang melibatkan beberapa Perguruan Tinggi dan civitas akademika dengan kerugian rata-rata sampai miliaran rupiah. Apabila dicermati aktor yang terjatuh *fraud* sebagian besar merupakan para pelaku yang menjabat sebagai orang yang memimpin atau pejabat struktural. Pimpinan adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mempunyai penuh kesempatan menyelewengkan wewenang (Ludigdo, 2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberitahukan kejahatan *fraud* pengadaan barang dan jasa masih banyak terjadi di Perguruan Tinggi. Contoh satu kasus menimpa Universitas Negeri di Jawa Timur, yang tertangkap *fraud* dalam pekerjaan pengadaan alat laboratorium MIPA. Selain itu KPK juga menjumpai *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pada 5 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera (DetikNews, 2013). Di antaranya kasus kejahatan *fraud* yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat kerugian keuangan negara sejumlah Rp 5,175 miliar, Universitas Negeri Malang dengan merugikan negara sebesar Rp 14,9 miliar dan Universitas Airlangga dengan merugikan negara mencapai Rp 85 Miliar. Tindak kejahatan *fraud* yang berlangsung di Universitas Negeri di atas berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan peralatan laboratorium. Indikasi kasus *fraud* juga terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan besaran kerugian sebesar Rp 54 miliar dan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Widya Kerti milik PHDI.

Pantauan kejahatan *fraud* di Perguruan Tinggi yang dilakukan ICW dalam bentang masa 10 tahun, sejak 2006 sampai Agustus 2016, ICW mencatat telah terjadi 37 kasus kejahatan *fraud*. Dari seluruh kasus tersebut, ICW melaporkan sedikitnya ada 65 oknum *fraud* yang asalnya dari lingkup civitas akademika, pegawai pemerintah daerah, dan pihak swasta. Deskripsinya, 2 oknum karyawan dan pemangku struktural di hierarki fakultas atau universitas, 13 oknum Rektor atau

Wakil Rektor, 5 orang dosen, 2 oknum pemangku pemerintah daerah, dan 10 oknum pihak swasta (ICW, 2016)

Hasil pengawasan dari ICW menjumpai 12 model *fraud* di Perguruan Tinggi, barangkali terdapat model lainnya di luar beberapa model yang telah terjadi. Dari 12 pola yang ditemukan, modus yang paling banyak digunakan adalah kejahatan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Tercatat sebagian kasus yang ditemukan, 14 dari 37 memakai modus pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah sampel di atas merupakan sekelumit masalah *fraud* yang terungkap dalam lembaga pendidikan. Seperti gunung es, sedang banyak masalah-masalah *fraud* lain yang beroperasi di bawah pantauan. Fungsi desentralisasi dalam struktur universitas membuat sulit mengungkap kasus *fraud* di universitas. Selain itu, karena bukan menjadi prioritas institusi, sulit untuk mendeteksi kasus *fraud* karena fokus universitas yang lebih mengedepankan akademik. Selain mengakibatkan kerugian menurut moral juga memperburuk *image* dan nama baik institusi, *fraud* juga menyebabkan kerugian finansial. Mahasiswa juga terkena dampak dari kasus ini. Saat perguruan tinggi menjalankan *fraud*, maka mahasiswa berpendapat hal itu lumrah untuk dilakukan. Kemerossotan mutu pendidikan terhadap integritas dan nama baik perguruan tinggi akan menjadi akibat apabila tidak ditindaklanjuti.

Penelitian tentang *fraud* di perguruan tinggi ini menjadi menarik untuk diteliti, karena secara kontinyu penelitian di lingkungan perguruan tinggi terus berkembang, seperti pada penelitian sebelumnya (Mohamedbhai, 2016; Nurharjanti, 2017; Ludigdo, 2018; Simangunsong, 2019). Di sisi lain sebagian besar penelitian *fraud* masih seputar pada perusahaan *manufacturing* dan organisasi publik seperti yang dilakukan Agustina dan Pratomo (2019) yang mengkaji *fraud* pentagon pada perusahaan pertambangan, Arianto (2020) meneliti tentang *fraud* pada Dana Keistimewaan Yogyakarta, Hidayati dan Mulyadi (2017) mengkaji *fraud* di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan penelitian Putra *et al.*, (2018) mengkaji penelitian di pemerintahan

Teori *fraud pentagon* digunakan sejumlah peneliti dalam cara melacak dan mengontrol beragam motif kejahatan *fraud* untuk menganalisa dan memahami

seberapa besar kejahatan *fraud* dipengaruhi oleh dimensi *fraud pentagon*. Pada penelitian ini, sebagai asas untuk meneliti dalam melacak apakah ada kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, penulis menggunakan elemen *fraud pentagon theory*. *Fraud pentagon theory* dipakai karena teori ini adalah perbaikan dari teori *fraud triangle* dan *fraud diamond* dengan adanya elemen baru yang sebelumnya masih kurang pemakaiannya. Crowe Horwath mengemukakan *fraud pentagon theory* mula-mula pada tahun 2010 sebagai perluasan dari *fraud triangle theory* dari Cressey (1953). 5 elemen dari *fraud pentagon theory*, terbentuk dari tiga elemen yang asalnya dari *fraud triangle theory* dan dua elemen tambahan. Kelima elemen tersebut adalah *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*.

Elemen Fraud Pentagon yang kesatu adalah tekanan (*pressure*). Serasi dengan SAS No. 99, latar belakang untuk menjalankan *fraud* adalah tekanan. Menurut Theodorus (2018), salah satu karakter tekanan adalah memiliki keperluan *financial* yang memaksa dan tidak bisa diberitahukan kepada orang lain atau disebut *perceived non-shareable financial need*. Sementara Ardianingsih (2018) menyatakan bahwa finansial, habit yang buruk, lingkungan kerja, dan yang lainnya mengakibatkan munculnya tekanan. Hasil penelitian Akbar (2017) menyatakan bahwa berlangsungnya *fraudulent financial reporting* pada perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode pengamatan disebabkan oleh tekanan. Hasil ini berlawanan dengan penelitian Agustina dan Pratomo (2019) yang menyatakan bahwa tekanan secara parsial memperlihatkan pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Sementara penelitian Simangunsong (2019) menemukan bahwa tekanan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Kesempatan adalah elemen kedua dalam *fraud pentagon* selain tekanan. Salah satu latar belakang para oknum dalam menjalankan *fraud* adalah kesempatan. Jalan awal dalam melakukan *fraud* adalah dengan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Penetapan masa serta situasi yang akurat amat diharuskan. Adanya peluang juga akibat dari kesempatan yang muncul ketika melakukan tindakan *fraud*. Ulfah dan Nuraina (2017) menguraikan *opportunity* atau kesempatan adalah peluang yang menguatkan berlangsungnya *fraud*. Tidak mempunyai rasa keliru atas apa yang dijalankan adalah alasan bagi pelaku *fraud* memiliki rasionalisasi sendiri

atas tindakannya. Dalam melangsungkan penipuan, individu yang paling banyak melangsungkan adalah yang pertama melangsungkan pelanggaran pertama dalam delik pidana (Albrecht *et al.*, 2014). Agustina dan Pratomo (2019) menyatakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh kesempatan. Hasil ini didukung penelitian Handoko *et al.*, (2020) yang menguraikan bahwa faktor yang paling mempunyai pengaruh terhadap perusahaan dalam sektor perbankan dalam *fraud* adalah kesempatan. Penelitian Utama *et al.*, (2018) juga menjumpai bahwa unsur *opportunity* yaitu *organizational structure* memiliki pengaruh negatif pada *fraudulent financial reporting*.

Keyakinan diri yang berpendapat bahwa sesuatu yang dilakukan bukan termasuk perilaku yang salah mengakibatkan munculnya rasionalisasi. Berdasarkan Novita (2019), pengaruh yang mungkin mampu membuat seseorang berpikir seperti itu datang dari dalam maupun dari luar. Pendapat bahwa dirinya tidak merasa salah meskipun dia paham yang dikerjakannya itu salah, adalah rasionalitas pribadi yang sudah tersangkutpautkan dengan *fraud* dan dipastikan menjalankan itu lagi (Farmashinta dan Yudowati, 2019). Hasil penelitian Sawaka K. dan Ramantha (2020) menguraikan bahwa rasionalitas memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Agustina dan Pratomo (2019) menemukan bahwa arogansi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Horwath (2010) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kecakapan individu untuk mengabaikan kontrol internal untuk keuntungan diri sendiri. Menurut Wolfe and Hermanson (2004) dalam Ardianingsih (2018), Dalam melakukan *fraud*, seseorang memerlukan kapabilitas untuk memahami peluang dan untuk menggunakannya berulang-ulang. Hal ini ada kaitannya dengan cara individu tersebut memakai kedudukan dan kapabilitasnya dengan baik supaya kecurangan yang dilakukan tidak bisa terlacak. Sementara untuk arogansi, adalah ciri alamiah yang dipunyai oleh insan. Sifat ini dalam bentuk merasa bahwa dirinya memiliki superioritas dibanding yang lain. Keyakinan yang diperoleh dari korporasi menimbulkan keserakahan, dan yakin aturan milik korporasi mustahil berlaku

padanya. Hasil penelitian dari Aulia (2012) menyatakan bahwa Pergantian direksi sebagai pengukuran arogansi memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian milik Abdurrachman dan Suhartono (2020) juga mendukung penelitian milik Aulia (2012) yang menyatakan bahwa pertukaran direksi mempunyai pengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Sementara dalam penelitian Handoko *et al.*, (2020) kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam sektor perbankan dalam *fraud*.

Elemen terakhir adalah arogansi. Sifat superioritas atas orang lain sampai mempunyai pikiran bahwa kontrol internal mustahil mempunyai pengaruh terhadap dirinya dan diikuti oleh kerserakahan adalah pengertian arogansi (Horwath, 2010). Seolah-olah bahwa hak yang dipunyai lebih banyak atau lebih tinggi dibanding dengan orang lain adalah akibat dari sikap arogansi ini. Ingin menambah atau mempertahankan kelas sosial dan gaya hidup adalah tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan *fraud* (Ramadhan, 2020). Hasil penelitian Tessa G dan Harto (2016) menyatakan bahwa CEO yang timbul dalam laporan keuangan untuk sebagai pengukur arogansi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap berlangsungnya *fraudulent financial reporting*. Hal ini juga didukung oleh Alfian (2020) dengan memperlihatkan hasil bahwa total foto CEO yang terlihat di laporan keuangan bisa mengukur *arrogance*. Sedangkan penelitian Agustina dan Pratomo (2019) dan Sawaka K. dan Ramantha (2020) menemukan bahwa arogansi tidak mempengaruhi persepsi kecurangan pelaporan keuangan.

Sehubungan dengan pelibatan variabel moderasi dalam kecurangan *fraud* yang diteliti Arianto (2020), *fraud* dideteksi melalui audit forensik dan *whistleblowing*, dan *gender*, pengalaman, serta demografi sebagai variabel moderasi mendapatkan bukti bahwa audit forensik dan *whistleblowing* terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap penemuan suap. Selain itu *gender*, pengalaman, dan demografi sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap deteksi *fraud*.

Dalam keterkaitan dengan pengaruh hubungan istimewa terhadap berlangsungnya *fraud* dikatakan bahwa transaksi dengan *related party transaction* (RPT) memiliki dua hipotesis yang bertentangan yakni sebagai transaksi oportunist

atau sebagai transaksi yang tepat dan sesuai. *Conflict of interest* yang konsisten dengan *agency theory* diakibatkan RPT sebagai transaksi oportunistik, sebagaimana yang diuraikan oleh Jian dan Wong (2003) yang menyatakan transaksi dengan *related party transaction* (RPT) ditunjukkan dengan kecondongan oportunistik. Hal ini ditandai dengan diperolehnya harga penjualan yang tinggi, terpenting untuk pemangku saham dan anggota lain organisasi dalam grup, ketika organisasi mempunyai dorongan untuk menyelewengkan keuntungan. Jeon (2019) menjumpai bahwa transaksi dengan RPT memperlihatkan kecondongan oportunistik ketimbang sebagai ketepatan transaksi. Hal ini semakin dipengaruhi dengan hasil penelitian yang diperoleh Kholbeck dan Mayhew dalam Jeon (2019) yang menyatakan bahwa adanya transaksi RPT makin kuat, apabila ukuran *corporate governance* makin lemah, dimana jumlah komisaris independen makin sedikit, maka makin sedikit juga imbalan tunai kepada CEO dan direktur, juga imbalan CEO dalam bentuk opsi saham makin besar.

Berdasarkan kesenjangan riset yang terjadi dalam penelitian sebelumnya, maka fenomena kejahatan *fraud* dalam laporan keuangan dan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Analisis *Fraud* Pentagon Terhadap Upaya Pengendalian *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi Swasta Dengan Gender, Pengalaman dan Hubungan Istimewa Sebagai Variabel Moderasi.**

Pemilihan Perguruan Tinggi Swasta sebagai populasi penelitian dikarenakan kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa antar Perguruan Tinggi Swasta berlainan meskipun tetap memakai pedoman pada SPI dalam Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 19 Tahun 2015. Selain itu secara logis, alokasi dana pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi Swasta sangat besar, sehingga peluang tindakan *fraud* sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengendalian dana secara baik dalam menaikkan mutu Perguruan Tinggi Swasta meskipun dalam prakteknya seringkali belum optimal, maka dari itu penting dijalankan penelitian untuk menganalisa faktor yang memotivasi terjadinya *fraud* agar hasil penelitian nantinya dapat

memberikan rumusan regulasi dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan *fraud* khususnya dalam pengadaan barang di Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dipilih peneliti sebagai sampel penelitian, karena selain pernah menanda tangani MOU dan berkomitmen dengan KPK untuk memerangi segala bentuk kejahatan korupsi, Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki kurikulum antikorupsi yang dapat dikolaborasikan dengan kurikulum KPK. Disamping itu juga untuk menguji apakah teori *fraud pentagon* sebagai teori pendeteksi kejahatan *fraud* berpengaruh arah regulasi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah guna mengontrol terjadinya *fraud* sebagai perguruan tinggi yang mentaati nilai-nilai ajaran Islam yang melarang tindakan *fraud*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Menurut paparan latar belakang diatas, bisa dirumuskan permasalahan penelitian antara lain:

1. Apakah aspek tekanan (*pressure*) dalam *fraud pentagon* berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
2. Apakah aspek kesempatan (*opportunity*) dalam *fraud pentagon* berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
3. Apakah aspek rasionalisasi (*rationalization*) dalam *fraud pentagon* berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
4. Apakah aspek kompetensi (*competence*) dalam *fraud pentagon* berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
5. Apakah aspek arogansi (*arrogance*) dalam *fraud pentagon* berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa ?
6. Apakah *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap pengendalian *fraud procurement* ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menimbang permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh aspek tekanan (*pressure*) dalam *fraud pentagon* terhadap pengendalian fraud pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pengaruh aspek kesempatan (*opportunity*) dalam *fraud pentagon* terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui pengaruh aspek rasionalisasi (*rationalization*) dalam *fraud pentagon* terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa.
4. Untuk mengetahui pengaruh aspek kompetensi (*competence*) dalam *fraud pentagon* terhadap pengendalian kejahatan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
5. Untuk mengetahui pengaruh aspek arogansi (*arrogance*) dalam *fraud pentagon* terhadap pengendalian kejahatan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
6. Untuk mengetahui pengaruh *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi terhadap pengendalian *fraud procurement*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagi banyak manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan teoritis terhadap berbagai pihak dalam upaya menguji aspek-aspek dalam *fraud pentagon* untuk menganalisis kecenderungan pelaku *fraud*, terutama dalam hubungannya dengan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi Swasta, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selain itu, memberikan masukan apakah aspek *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruhnya pada kecenderungan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi swasta.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data yang dapat dijadikan pertimbangan dan pencegahan kemungkinan terjadinya *fraud* di Perguruan Tinggi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu,

hasil penelitian ini juga bisa dibuat dasar bagi institusi Perguruan Tinggi Swasta dalam membuat aturan atau SOP yang bermanfaat bagi upaya pengendalian dan pencegahan terjadinya *fraud* di Perguruan Tinggi Swasta

b. Bagi para peneliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu materi dan dasar analisis empiris terlebih berkaitan dengan tindakan organisasi spesifiknya untuk mengetahui pengaruh aspek-aspek dalam *fraud pentagon* terhadap upaya pengendalian terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi swasta.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam penataan penulisan yang dibagi menjadi lima bab, antara lain:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan dasar dan pertimbangan atas latar belakang permasalahan yang menciptakan alasan dalam pemilihan tema. Tahap selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan teori-teori yang dipakai dalam penelitian, khususnya teori *fraud pentagon* dan beberapa teori pendukung yang menjadi dasar teoritis dilakukan penelitian ini. Bab ini akan mencakup pembahasan landasan teori atau kajian pustaka, penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan digunakan peneliti

#### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini akan menguraikan jenis sistem penelitian yang dipakai, populasi dan penentuan sampel yang akan dilibatkan dalam penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, termasuk serta teknik pengujian dan hipotesis.

#### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini akan menjabarkan hasil atau temuan dengan pemrosesan data yang sudah dijalankan. Dalam bab ini akan diulas pembahasan dalam uji hipotesis dan lebih

lanjut dengan menjabarkan hasil temuan tersebut kedalam sebuah data yang dianalisa. Terakhir akan ditutup dengan uraian implikasi serta temuan hasil penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab ini akan memberikan sebuah ringkasan yang sudah diperoleh dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan kontribusi, implikasi, keterbatasan penelitian, juga saran dari hasil penelitian yang sudah dijalankan oleh peneliti.

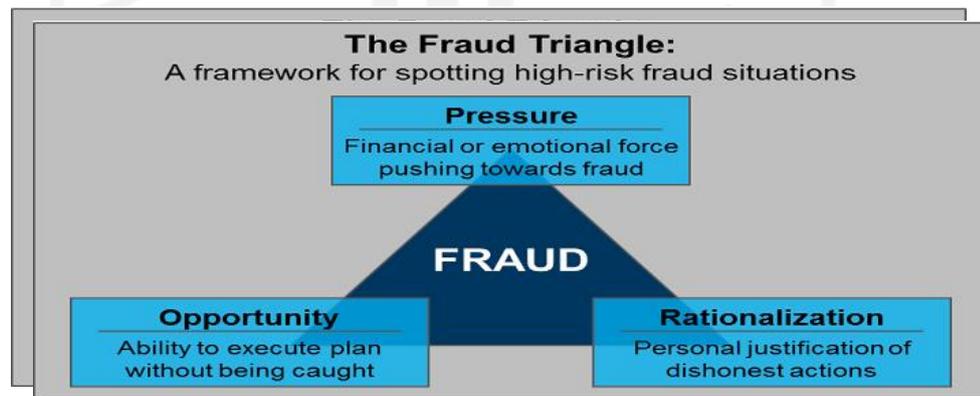


## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Fraud Pentagon

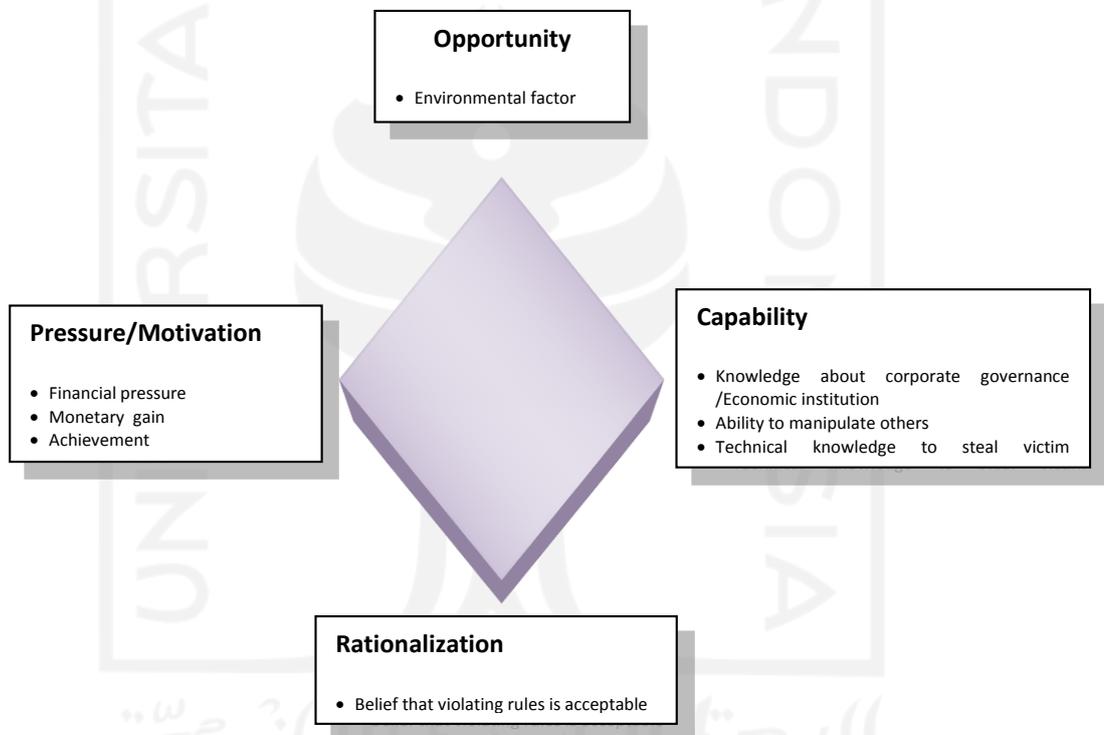
Kelanjutan terbaru teori *fraud* dalam melacak berlangsungnya *fraud* dalam organisasi disebut dengan *fraud pentagon*. Teori *fraud* kesatu diperkenalkan, dikenal sebagai teori *fraud triangle*, Elemen-elemen yang mendorong terjadinya tindak kecurangan dalam organisasi dijelaskan dalam teori ini. Dalam penelitiannya, *Other People's Money: A Study in the Sosial Psychology of Embezzlement*, Cressey (1953) mengungkapkan mengapa orang berbuat *fraud*. Secara khusus, Cressey menjelaskan hal-hal yang membuat para pelanggar kepercayaan (*trust violators*) tergoda melakukan *fraud*. Hasil penelitiannya mengungkap tiga elemen penyebab terjadinya *fraud*, antara lain, tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Semua elemen ini selanjutnya diketahui sebagai *fraud triangle* (Theodorus, 2018).



Gambar 2.1. Kerangka Fraud Triangle

Teori *fraud* kedua dicetuskan Wolfe dan Hermanson (2004), dikenal dengan teori *fraud diamond*. Pengembangan teori *fraud triangle* dengan penambahan elemen yakni kemampuan (*capability*), sehingga *fraud diamond* mempunyai empat elemen yang mendorong terjadinya tindakan *fraud*, yakni tekanan (*pressure, incentive*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*)

dan kemampuan (*capability*). Wolfe dan Hermanson (2004; Ruankaew, 2016; Sujana *et al.*, 2019) beranggapan bahwa meski ada tekanan/insentif bersama peluang dan rasionalisasi, namun tindakan *fraud* mustahil berlangsung kecuali ada elemen kemampuan (*capability/capacity*). Artinya, oknum *fraud* wajib mempunyai kecakapan supaya bisa melaksanakan *fraud*. Namun demikian, tidak terdapatnya individu yang cocok dengan kompetensi yang pas dalam melakukan tindakan *fraud*, *fraud* tidak mungkin terjadi. Artinya, perlu memiliki *skill* dan kemampuan untuk melaksanakan *fraud* (Sorunke dan Abayomi, 2016; Sujana *et al.*, 2019).



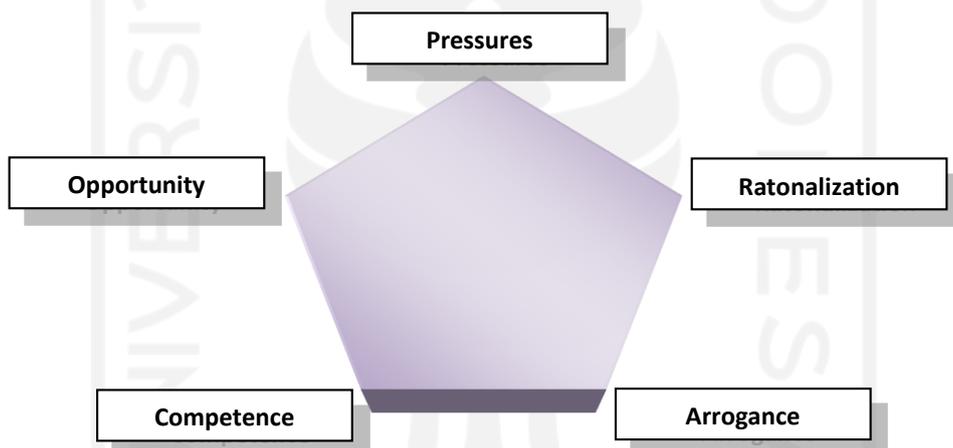
**Gambar 2.2. Kerangka Fraud Diamond**

Teori *fraud* terakhir dikembangkan Horwath (2010), dikenal sebagai *The Crowe's Fraud Pentagon*, dengan memperbanyak dua unsur penyebab *fraud*, yakni kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan beberapa tahap perkembangan teori *fraud*

**Tabel 2.1. Perkembangan Teori Fraud**

<b>Teori</b>	<b><i>Fraud Triangle</i></b>	<b><i>Fraud Diamond</i></b>	<b><i>Fraud Pentagon</i></b>
Elemen	<i>Pressure</i>	<i>Pressure</i>	<i>Pressure</i>
	<i>Opportunity</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Opportunity</i>
	<i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i>
		<i>Capability</i>	<i>Competence</i>
			<i>Arrogance</i>
Sumber	Cressey (1953)	Wolfe dan Hermanson (2004)	Horwath (2010)

Sumber: Analisa Literatur Peneliti.



**Gambar 2.3. Kerangka Fraud Pentagon**

Menurut gambar dan tabel di atas bisa diketahui perkembangan teori *fraud*, sejak dari *fraud triangle*, *fraud diamond*, hingga teori *fraud pentagon*.

## **2.2. Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa)**

Dari segi alur produsen-pemasok-konsumen *procurement* atau pengadaan barang dan jasa melekat pada rancangan asas bisnis yang menyangkut berbagai pihak. Kemudian, dalam aspek perencanaan dan manajemen pengadaan barang dan jasa juga dilandaskan pada *planning* manajemen (Malik, 2017). Proses bisnis dijelaskan Kotler *et al.* (2005) meliputi semua hal yang berhubungan dengan

rangkaian alur pengadaan barang dan jasa, diawali dari upaya pengusaha mencukupi apa yang diminta konsumen, proses produksi, proses pengenalan barang dan membangun kesadaran konsumen (*brand awareness*).

Rancangan dan pendekatan bertindak sama dengan metode *procurement*, dimana yang hendak menjadi asas bahan pemikiran pokok dari divisi pengadaan barang adalah efisiensi pengeluaran dan garansi mutu barang, jasa serta keadaan nyaman atas jasa yang diterima. Namun demikian, dalam prosesnya terdapat bermacam faktor yang mesti dipikirkan oleh pihak pengadaan yaitu, pendekatan rencana yang wajib selaras dengan jangka waktu atau *time constraint* yang sudah dipastikan dan total biaya keluaran. Maka sebab itu amat utama bagi pihak terhubung untuk merancang rencana bisnis yang hendak dilakukan (Malik, 2017).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai halnya yang sudah disalin terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

“Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk mendapat barang/jasa bagi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang alurnya diawali dari pengkonsepan keinginan hingga dirampungkannya semua kegiatan untuk mendapat barang/jasa.”

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah menetapkan asas-asas umum pengadaan barang/jasa antara lain:

1. Efisien, yang artinya daya yang digunakan terbatas untuk memperoleh maksud yang diputuskan dalam masa sependek-pendeknya dan bisa dimintai pertanggungjawaban.
2. Efektif, yang artinya keinginan yang telah diputuskan dan bisa memberikan faedah yang besar selaras dengan maksud yang diputuskan.
3. Transparan, yang berarti seluruh aturan dan data mengenai pengadaan barang/jasa, mencakup syarat teknis administrasi pengadaan, sistem penilaian,

hasil penilaian, pemilihan calon yang menyediakan barang/jasa, terbuka untuk peserta yang tertarik serta untuk masyarakat luas.

4. Terbuka, pengadaan barang/jasa mesti terbuka bagi yang menyediakan barang/jasa, yang menyanggupi syarat dan dilangsungkan melalui kompetisi yang sehat di antara pihak yang menyediakan barang/jasa yang sesuai dan menyanggupi syarat tertentu berasaskan aturan dan prosedur yang transparan.
5. Bersaing, yang artinya pengadaan barang/jasa mesti dilangsungkan melalui kompetisi yang sehat diantara sebanyak mungkin pihak yang menyediakan barang/jasa yang sesuai dan menyanggupi persyaratan, sehingga bisa didapatkan barang/jasa yang ditawarkan secara bersaing dan tidak ada campur tangan yang memprovokasi terjadinya sistem pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. Adil, yang artinya membagi tindakan yang serupa untuk semua calon yang menyediakan barang/jasa dan tidak memfokuskan untuk membagi laba kepada pihak tertentu, dengan metode dan atau latar belakang apapun.
7. Akuntabel, yang artinya mesti menggapai maksud baik wujud, finansial ataupun faedah bagi kelulusan penerapan fungsi umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat selaras dengan aturan yang berlangsung dalam pengadaan barang/jasa.

Ketidakberhasilan terpenuhinya asas-asas di atas mengisyaratkan tidak mustahil akan terjadinya *fraud*. Namun, sebaliknya dengan mempraktikkan asas-asas diatas dapat menaikkan keyakinan publik terhadap alur pengadaan. Karena, hasilnya bisa dimintai pertanggungjawaban kepada publik dari segi administrasi, finansial, dan teknis.

### **2.3. Fraud**

Istilah '*fraud*' pada umumnya mencakup berbagai kasus kejahatan seperti pencurian, korupsi, konspirasi, penggelapan, pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan. Definisi hukum *fraud* berlainan antara satu negara dengan negara lain, namun sejak diperkenalkannya *Fraud Act* di Inggris dan Wales pada tahun 2006,

telah ada definisi hukum tentang *fraud*. Pada dasarnya *fraud* menyangkut-pautkan pemakaian cara penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan diri sendiri dengan cara berbohong dan/atau merugikan orang lain (CIMA, 2008).

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)* menguraikan *fraud* sebagai: *The use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets.* (Penggunaan kedudukan individu untuk membuat kaya diri sendiri dengan melakukan penyelewengan yang terencana atas sumber daya atau kekayaan perusahaan).

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision*, ada dua bentuk *fraud*: yakni *fraud* internal dan *fraud* eksternal. *Fraud* internal berlangsung saat karyawan melakukan *fraud* terhadap organisasinya. Phua *et al.*, (2010; Abdallah dan Maarof, 2016), menjelaskan bahwa *fraud* internal dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu *fraud* tingkat tinggi, jika karyawan berasal dari divisi manajemen, dan *fraud* tingkat rendah, jika karyawan tersebut bukan bagian dari divisi manajemen. Sebaliknya, *fraud* eksternal melibatkan berbagai skema, termasuk penjual, pelanggan, atau pencurian yang dilakukan pihak ketiga (Chen dan Gangopadhyay, 2013; Abdallah dan Maarof, 2016).

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)* membagi perilaku *fraud* dengan bagan berbentuk pohon yang disebut *fraud tree*. Secara garis besar, *fraud tree* mempunyai tiga bentuk pokok, yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *financial statement fraud*.

#### 1. *Corruption*

Korupsi (*corruption*) umumnya diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan di sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi adalah bentuk *fraud* yang sangat sukar untuk dilacak sebab tindakan korupsi melibatkan kongsi dengan pihak lain atau biasa disebut sebagai kolusi. Dalam *fraud tree*, korupsi terbagi menjadi empat kategori, yakni hantaman keinginan atau *conflict of interest*, suap atau *bribery*,

pembagian imbalan karena adanya keputusan yang menguntungkan atau *illegal gratuities* dan pemerasan terhadap rekan atau pihak lain dengan cara melakukan ancaman atau *economic extortion*.

## 2. *Asset Misappropriation*

*Asset Misappropriation* sering disebut sebagai penyalahgunaan aset merupakan tindakan penggunaan aset dengan cara ilegal atau menentang hukum, umumnya dilaksanakan oleh pihak yang disertai otoritas untuk mengendalikan aset tersebut. Penyalahgunaan aset dibagi menjadi dua, yakni penyalahgunaan aset kas (*cash*) dan aset lainnya selain kas (*non-cash*)

## 3. *Financial Statement Fraud*

Perilaku *fraud* yang dijalankan oleh kelompok di dalam perusahaan terkait penyajian laporan keuangan dengan cara memanipulasinya untuk memperoleh keuntungan bagi pihaknya dan merugikan pihak pengguna laporan keuangan tersebut disebut dengan *financial statement fraud*. *Fraud* dalam penyajian laporan keuangan bisa berupa salah saji *overstatement* maupun *understatement*. *Financial statement fraud* juga dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu pencatatan transaksi di waktu yang berlainan atau pengakuan lebih awal dari waktu kejadian yang sebenarnya. Kedua kategori ini disebut sebagai *timing difference* (Septriani dan Handayani, 2018).

Menurut CIMA (2008) *fraud* mempunyai banyak bentuk dan akibat dari hubungan antara pelaku *fraud* dan korban. Beberapa contoh bentuk *fraud* antara lain:

- *Fraud* yang dilakukan individu terhadap konsumen, klien atau pelaku bisnis lain, misalnya, representasi yang keliru tentang kualitas barang; skema penjualan piramida
- *Fraud* majikan terhadap karyawan, mis. Kecurangan penggajian; pemalsuan klaim biaya; pencurian uang tunai, aset atau kekayaan intelektual; akuntansi palsu

- *Fraud* bisnis terhadap investor, konsumen dan karyawan, misalnya penipuan laporan keuangan; menjual barang palsu sebagai barang asli; tidak membayar pajak atau kontribusi Asuransi Nasional yang dibayarkan oleh staf/karyawan
- *Fraud* pada lembaga keuangan, misalnya penggunaan kartu kredit yang hilang dan dicuri; penipuan cek; klaim asuransi yang curang
- *Fraud* individu atau bisnis terhadap pemerintah, misalnya penipuan hibah; penipuan klaim manfaat jaminan sosial; penghindaran pajak
- *Fraud* penjahat profesional terhadap organisasi-organisasi besar, misalnya komplotan pemalsuan besar; penipuan hipotek; penipuan uang muka, penipuan identitas perusahaan dan pencucian uang
- *Fraud* elektronik/penggunaan komputer dan teknologi untuk kejahatan, misalnya pengelabuan, spamming, kejahatan hak cipta, peretasan, penipuan rekayasa social.

### **2.3.1. *Fraud* Pengadaan Barang (*Procurement Fraud*)**

Perilaku tindak penipuan yang diterencana yang diartikan untuk memberikan pengaruh setiap langkah alur pengadaan guna memperoleh laba finansial atau mengakibatkan kerugian, biasa disebut dengan *fraud* pengadaan barang/jasa. Langkah ini bisa dijalankan pemborong di luar organisasi, juga staf di dalam organisasi (National Fraud Authority, 2011). Aktivitas pengadaan barang sangat mudah mengarah ke perilaku *fraud*/korupsi, dan aktivitas ini terjadi dimana saja di seluruh dunia (OECD, 2007)

*Fraud* pengadaan barang/jasa bisa dikatakan sulit terdeteksi; karena kasus ini seringkali jarang dilaporkan dan sulit mengukur sejauh mana permasalahannya. Bila tindakan *fraud* ini terdeteksi, maka sumber umumnya disalurkan ke penyelidikan dan penuntutan yang mahal dan jarang berakhir dengan penghukuman atau pemulihan kerugian (National Fraud Authority, 2011). Kasus ini seringkali diselesaikan secara internal, dan mereka yang terlibat biasanya diperbolehkan “mengundurkan diri”, dengan jaminan reputasi yang masih utuh (Deloitte, 2014). Meskipun *fraud* pengadaan barang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, namun

lembaga/perusahaan pada dasarnya dapat melakukan pengendalian guna mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* (Deloitte, 2014).

Bibit persoalan berlangsungnya perilaku *fraud* menurut Theodorus (2018) adalah *fraud by need, fraud by greed and by oppurtinity*. Artinya, saat ada kehendak untuk menghentikan *fraud*, maka unsur yang mesti ditinjau dan dilenyapkan adalah unsur yang menyebabkan dilakukannya *fraud*. Jika sebuah organisasi gamblang dalam membereskan *fraud*, pada saat ada tanda-tanda *fraud*, maka organisasi itu harus menyerahkan data yang berkaitan dengan *fraud* yang berlangsung di organisasinya. Hal ini pasti akan memberi pengaruh insaf kepada oknum *fraud*, sehingga saat individu mempunyai keinginan melakukan lagi perilaku yang serupa, tentu dia pasti memikirkan ulang.

Dalam pengadaan barang/jasa, tindakan *fraud* yang sering ditemui yakni ketidaksamaan antara barang/jasa yang disetujui dalam perjanjian atas keperluan organisasi, baik dari segi bentuk, mutu maupun jumlahnya. Perincian teknis yang tidak sesuai antara yang sudah disediakan pihak yang menyediakan barang/jasa atas perincian teknis yang diputuskan dalam perjanjian, jumlah barang/jasa yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak yang menyediakan barang/jasa tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya cocok pada perjanjian, nilai barang/jasa yang disepakati dalam perjanjian tidak wajar, penuntasan order oleh mitra terlambat dari rencana waktu yang telah disepakati dalam perjanjian selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tindakan *fraud* mencakup berbagai kegiatan ilegal mulai dari persekongkolan tender selama fase pemberian pra-kontrak hingga faktur palsu dalam fase pemberian pasca-kontrak. Tindakan itu dapat dijalankan oleh internal atau eksternal organisasi (National Fraud Authority, 2011).

*Fraud* pengadaan barang/jasa mempunyai ciri khas lain dalam 2 tingkatan proses pengadaan barang; penghargaan pra-kontrak dan penghargaan pasca kontrak. *Fraud* fase penghargaan pra-kontrak mempunyai ciri khas yang kompleks,

sering diakibatkan tidak cukupnya ketaatan pada kebijakan, tetapi menyangkutpautkan kegiatan semacam kerjasama dan penyelewengan yang susah dilacak. *Fraud* tahap pasca kontrak amat lain. Dikarenakan kontrak telah ada, separuh banyak kasus *fraud* lebih condong menyangkutpautkan penyeteroran lebih kepada pemasok, lewat faktur yang tidak asli, dan penggajian proyek dengan standar rendah atau proyek yang tidak dirampungkan dengan dasar pada syarat di perjanjian. Praktik dan kegiatan melawan hukum juga dapat berlangsung pada *margin fraud* penghargaan pasca-kontrak. Contohnya, nilai barang atau jasa yang melewati batas dari nilai standar (National Fraud Authority, 2011).

Fase penghargaan pra-kontrak umumnya melibatkan tahap inti pra-tender menentukan persyaratan, mengembangkan spesifikasi, menghasilkan kasus bisnis dan tender yang melibatkan pasar, pemilihan penawar dan penilaian penawar. Fase ini selesai dengan memberikan kontrak. *Fraud* yang terjadi selama fase ini bisa jadi rumit dan sulit dideteksi. Kebanyakan *fraud* terjadi di lingkungan eksternal organisasi, baik dengan atau tanpa sepengetahuan mereka yang terlibat dalam proses pengadaan barang. Contoh, termasuk penetapan harga antar supplier untuk mengamankan bisnis dan memaksimalkan margin keuntungan serta persekongkolan tender, dan “harga penutup” di mana supplier mengajukan tawaran palsu untuk mengamankan siapa akan mendapatkan proyek (National Fraud Authority, 2011)

*Fraud* dalam fase penghargaan pasca kontrak fokus pada manajemen kontrak, khususnya pada pembayaran kontrak. Kebanyakan lembaga publik menggunakan sistem hutang dagang elektronik, dengan pengendalian utama pemisahan tugas antara permintaan, pemesanan, pemeriksaan penerimaan barang dan jasa, dan otorisasi pembayaran. Sama dengan kasus pemberian pra-kontrak, anggota mengidentifikasi kasus-kasus di mana kontrol ini dilewati sehingga memungkinkan terjadinya *fraud*. Contoh yang utama termasuk pembayaran lebih kepada pemasok melalui penyerahan faktur duplikat atau palsu yang tanpa disadari telah dibayarkan tim keuangan. Lebih serius lagi, kasus di mana staf berkolusi

dengan pemasok mengajukan dan memproses faktur palsu, dalam prosesnya seringkali menerima suap atau sogokan (National Fraud Authority, 2011)

## **2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang (*Procurement Fraud*)**

### **2.5.2.1. *Pressure* / Tekanan**

Tekanan atau *pressure* seperti diilustrasikan (Cressey, 1953; Gupta, 2019) merupakan dorongan yang memberikan motivasi individu mempraktikkan tindakan *fraud*. Tekanan dapat ditimbulkan dengan persoalan pribadi, seperti persoalan keuangan, kecanduan obatan-obatan dan lingkungan pekerjaan. Manajemen atau karyawan bisa jadi mendapat tawaran insentif atau dalam tekanan agar melakukan tindakan *fraud*. Menurut Abdullahi dan Mansor (2015) tekanan merujuk pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan etika. Pelaku *fraud* mendapat tekanan (*pressure*) untuk mempraktikkan tindakan yang tidak sesuai dengan etika.

Tekanan adalah dorongan individu untuk melaksanakan dan menyembunyikan berbuat curang baik karena faktor finansial maupun non finansial. Albrecht dan Albrecht (2009; Rahmatika *et al.*, 2019) memisahkan tekanan menjadi empat kelompok yaitu tekanan finansial, kejahatan, tekanan berhubungan pekerjaan, dan tekanan yang lain. Faktor keuangan timbul disebabkan kemauan untuk membetulkan *lifestyle*, ketamakan atau permintaan ekonomi disebabkan tingginya standar hidup. Pada faktor non finansial, tekanan timbul disebabkan aktivitas kerja, seperti tidak mendapat keadilan antar pegawai, kecewa di dunia kerja, dan perilaku untuk menyembunyikan kinerja yang tidak baik.

AICPA (2017) dalam *Statement of Auditing Standards* (SAS) No. 99 menjelaskan ada 4 macam keadaan tekanan yang bisa memunculkan *fraud*, yaitu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, keperluan finansial pribadi, dan target finansial. Lainnya, banyak faktor lain yang bisa menjadi sebab timbulnya tekanan, seperti standar hidup yang terlampau tinggi/mewah, adanya kewajiban tidak terduga, adanya ketidakadilan, ketidakpuasan kerja seorang karyawan dan lain

sebagainya. Dijelaskan Albrecht *et al.*, (2014), bahwa tekanan atau *pressure* bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu:

a. Tekanan Finansial (*Financial Pressures*)

Tekanan finansial merupakan jenis tekanan paling umum penyebab seseorang tergerak untuk melakukan kecurangan. Diketahui bahwa tekanan finansial memiliki peran sebesar 95% dari semua tindakan *fraud* yang melibatkan tekanan sebagai pemicunya. Ada beberapa faktor yang mendasari perilaku kecurangan yang dikarenakan oleh tekanan finansial, seperti:

- 1) Ketamakan (*Greed*)
- 2) Tingginya standar hidup (*Living Beyond One's Means*)
- 3) Tumpukan tagihan dan tunggakan (*High Bills or Personal Debt*)
- 4) Kemampuan kredit yang lemah (*Poor Credit*)
- 5) Menderita kerugian finansial (*Personal Financial Losses*)
- 6) Kebutuhan finansial tidak terduga (*Unexpected Financial Needs*)

Tekanan finansial dapat terjadi karena adanya kebutuhan secara tiba-tiba maupun kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Namun sayangnya, hanya beberapa pelaku *fraud* yang menceritakan masalah keuangannya kepada orang lain.

b. Kebiasaan Buruk (*Vice Pressures*)

Seseorang yang mempunyai kebiasaan buruk seperti melakukan perjudian, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, hubungan diluar nikah, biasanya berkaitan erat dengan adanya tekanan finansial. Sebagai contoh, seseorang yang terlibat perjudian akan menempuh segala cara untuk mendapatkan uang.

c. Tekanan Terkait Pekerjaan (*Work-Related Pressures*)

Tidak hanya tekanan finansial dan kebiasaan buruk, beberapa orang melakukan tindakan *fraud* untuk melakukan pembalasan yang ditujukan kepada majikannya dan orang lain. Hal itu terakit dengan

kurangnya pengakuan atas kinerja, adanya penundaan promosi, ketidakpuasan kerja, merasa dicurangi dan faktor-faktor lainnya.

d. Tekanan Lainnya (*Other Pressures*)

Adanya kesulitan dalam membedakan antara keinginan dan kebutuhan membuat seseorang menderita adanya tekanan. Pada dasarnya, manusia akan menghadapi tekanan dalam hidupnya. Tekanan tersebut dapat bersumber dari berbagai macam situasi atau keadaan kurang menguntungkan. Contohnya, disaat seseorang mempunyai kebutuhan finansial, membuat keputusan investasi yang salah, merasa terlalu banyak bekerja dan atau kurang dibayar, sifat serakah dan lainnya.

#### **2.5.2.2. Opportunity / Kesempatan**

Kesempatan melakukan *fraud* bisa terjadi akibat kontrol yang kurang manjur atau sistem tata kelola yang memberi kesempatan individu melakukan *fraud* dalam organisasi. Dalam akuntansi, kondisi ini dikatakan sebagai ketidakkuatan pengendalian internal. Faktor kesempatan memperlihatkan bahwa individu akan menyalahgunakan keadaan yang ada guna mempraktikkan *fraud* (Kelley, 1967; Abdullahi dan Mansor, 2015). Peluang untuk seseorang mempraktikkan perilaku *fraud* adalah karena tidak cukupnya kontrol internal organisasi (Astuti *et al.*, 2015). Hakekat peluang seperti tekanan dalam pengertian adanya peluang tidak harus jelas. Tetapi, kesempatan ada dalam persepsi dan kepercayaan oknum *fraud*. Di berbagai persoalan, semakin rendah risiko terjerat, semakin besar kesempatan terjadinya *fraud* (Cressey, 1953).

Faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya peluang melakukan tindakan *fraud* antara lain kelengahan pegawai yang melanggar aturan dan tidak adanya tindakan disipliner. Peluang sebagai kemampuan mengesampingkan pengendalian *fraud*. Peluang mengarahkan pada kompetensi dan keteguhan seorang pegawai untuk mengetahui kelemahan sistem organisasi dan menyalahgunakannya dengan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan (Rae dan Subramaniam, 2008; Abdullahi dan Mansor, 2015).

Abdullahi dan Mansor (2015) berpendapat bahwa meskipun tekanan/motivasi sangat kuat, *fraud* tidak bisa terjadi kecuali adanya peluang. *Fraud* mempunyai dua tanda: (i) kerentanan organisasi dari tindakan manipulasi, dan (ii) keadaan organisasi yang membantu terlaksananya *fraud*. Contohnya, divisi pekerjaan yang tidak memenuhi, lemahnya pengawasan internal dan audit yang tidak berturut-turut menjadi situasi yang memberikan untung bagi pegawai atau manajer untuk mempraktikkan kecurangan.

Golden *et al.* (2006; Abdullahi dan Mansor, 2015) mengemukakan bahwa pengendalian internal yang tidak kuat, tidak cukupnya kontrol, pemecahan tugas yang tidak memenuhi bisa membuat kesempatan untuk melakukan kecurangan. ACFE menyatakan bahwa perputaran posisi proyek yang tidak tertib memberi kesempatan terhadap pegawai dan manajer untuk mendayagunakan ketidakberhasilan organisasi untuk mempraktikkan *fraud* (Abdullahi dan Mansor, 2015).

Albrecht *et al.*, (2014) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mendukung peran peluang (*opportunity*) dalam *fraud triangle*, antara lain:

- a. Tidak cukupnya kontrol yang memadai untuk menahan dan atau melacak *fraud*
- b. Ketidaksanggupan untuk menilai mutu kinerja
- c. Ketidakberhasilan dalam membenahi oknum *fraud*
- d. Tidak cukupnya akses untuk mendapatkan data
- e. Adanya ketidaktahuan, ketidakacuhan dan ketidaksanggupan dalam memprediksi *fraud*
- f. Tidak cukupnya jejak audit (*audit trail*)

### **2.5.2.3. Rationalization / Rasionalisasi**

Rasionalisasi merupakan perbuatan membenarkan tindakan *fraud* karena tidak cukupnya integritas pribadi, atau pemikiran moral Rae dan Subramaniam (2008; Utami *et al.*, 2019). Sikap seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan legitimasi rasional atas perilaku *fraud* yang dijalankan (Astuti *et al.*,

2015). Rasionalisasi dijalankan oleh individu yang berusaha mendapatkan legitimasi atas kegiatannya yang memuat *fraud*. Rasionalisasi atas pemikiran yang tidak sesuai dengan etika umumnya dipraktikkan manajemen dengan acap kali menukar auditor di organisasinya supaya perbuatan *fraud* yang dijalankan tidak terlacak auditor yang lama dan menyembunyikan risiko *fraud* yang dijalankan, sehingga kecil kesempatan diperiksa oleh auditor baru, yang dikarenakan auditor baru belum paham situasi organisasi dengan baik (Agustina dan Pratomo, 2019)

Rasionalisasi memperlihatkan bahwa oknum *fraud* wajib menyatakan gagasan yang bisa didapat dengan cara moral sebelum menjalankan tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Rasionalisasi mengarahkan pada perbuatan membenarkan dan dalih bahwa perbuatan yang tidak mempunyai moral lain dengan tindak kejahatan pidana. Jika individu tidak bisa membenarkan tindakan yang berbohong, kecil kemungkinannya akan terkait dalam *fraud*. Contoh rasionalisasi tindakan *fraud* seperti “Saya sekedar pinjam uang”, “Saya mempunyai hak atas uang tersebut disebabkan atasan membohongi saya.” Lainnya, oknum *fraud* memaafkan perilaku seperti, “Saya mesti menjadi maling untuk memberi nafkah anak istri saya”, “*Fraud* dilakukan banyak individu, kenapa saya tidak melakukan juga” (Cressey, 1953)

Rasionalisasi tidak mudah untuk dikemukakan, disebabkan mustahil mengetahui pikiran pelaku *fraud*. Seseorang yang menipu mempunyai pola pikir yang sudah pasti, yang menyebabkan mereka membenarkan atau memberi maaf tindakan *fraud* mereka (Abdullahi dan Mansor, 2015). Rasionalisasi menjadi perbuatan membenarkan perilaku *fraud* karena tidak cukupnya kejujuran diri sendiri atau penalaran moral (Rae dan Subramaniam, 2008; Abdullahi dan Mansor, 2015). Kencondongan melaksanakan kecurangan berhubungan erat pada nilai moral serta perbuatan pribadi individu (Golden *et al.*, 2006; Abdullahi dan Mansor, 2015). Jembatan antara tekanan dan peluang terjadi saat individu dapat merasionalisasi perbuatan *fraud* (Abdullahi dan Mansor, 2015).

#### 2.5.2.4. *Competence* / Kemampuan / Kapasitas

Kecakapan pegawai menyampingkan kontrol internal, meluaskan rencana penyembunyian yang sulit, dan mengendalikan keadaan kelompok untuk keuntungan pribadi dengan memperdagangkan kepada orang lain disebut dengan kompetensi (Handoko *et al.*, 2020). Dalam *fraud*, kompetensi meliputi kecakapan, *skill*, keberanian, keyakinan diri, wewenang dan kekuasaan yang memberi kesempatan individu untuk mempraktikkan perbuatannya tanpa ketahuan atau ketahuan tetapi tidak bisa berkelanjutan (Manzaneque *et al.*, 2016)

Keterampilan dan kecakapan yang dibutuhkan untuk menjalankan *fraud* disebut juga dengan kompetensi. Kemampuan mengenali peluang *fraud* dan menjadikan kenyataan. Posisi, kecerdasan, ego, pemakasaan, tipu daya, dan tekanan, merupakan elemen yang mendukung kapabilitas/kompetensi (Wolfe dan Hermanson, 2004). Mackevičius dan Giriūnas (2013; Abdullahi dan Mansor, 2015) menguraikan bahwa tidak semua individu yang punya dorongan, peluang, dan realisasi bisa mempraktikkan *fraud* disebabkan tidak memiliki kecakapan guna melaksanakan atau menyembunyikan *fraud*.

Horwath (2011) mengemukakan bahwa kompetensi yang dijelaskan pada teori *fraud pentagon* mempunyai arti sama dengan kecakapan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam *fraud triangle*. Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan bahwa kompetensi berarti kecakapan pegawai untuk membiarkan kontrol internal, meluaskan rencana penyembunyian, dan mengarahkan keadaan sosial untuk manfaat diri sendiri. Meskipun tekanan berdampingan dengan peluang dan rasionalisasi, *fraud* tidak mungkin terjadi kecuali diikuti kompetensi. Artinya, pelaku *fraud* wajib mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk mempraktikkan *fraud*.

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) ada beberapa ciri penting sehubungan dengan elemen kemampuan (*competence/capability*) dan menyebabkan seseorang cenderung melakukan *fraud*:

1. *Position/function*

Posisi atau fungsi individu dalam sebuah perusahaan bisa memberikan kecakapan dalam menyalahgunakan segala peluang untuk melakukan *fraud* dan kemampuan tersebut tidak disediakan bagi orang lain karena memiliki posisi atau fungsi yang berbeda. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi (seperti CEO atau presiden divisi) mempunyai kesempatan yang lebih tinggi terhadap penyimpangan akuntansi. Selain itu, seseorang yang mempunyai fungsi tertentu berulang kali cenderung berpotensi melakukan *fraud* karena pengetahuannya yang luas mengenai proses dan kontrol fungsi tersebut.

2. *Intelligence*

Tidak hanya memiliki jabatan dan fungsi saja, seseorang yang mempunyai kecerdasan untuk mengetahui dan mengeksploitasi ketidakkuatan pengendalian internal perusahaan dapat menyalahgunakan jabatan dan fungsinya dengan baik untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

3. *Ego/Confidence*

Seseorang dengan karakter ego yang tidak lemah serta memiliki kepercayaan yang besar bahwa dirinya tidak akan terlacak merupakan salah satu sifat yang mencirikan seseorang memiliki kemampuan (*capability*). Ciri lainnya adalah orang tersebut yakin bahwa dirinya bisa dengan gampang keluar dari suatu persoalan jika suatu saat tindakan kejahatannya terungkap.

4. *Coercion Skills*

Pelaku *fraud* dapat menilai keberhasilan tindakannya apabila orang tersebut bisa menyuruh orang lain untuk melaksanakan atau menyembunyikan suatu kecurangan. Biasanya orang seperti ini memiliki sifat yang amat persuasif sehingga bisa dengan mudah membuat percaya orang lain untuk melaksanakan *fraud* atau bahkan

sekadar membuatnya melihat tindakan kecurangan dari sudut pandang yang lain.

5. *Effective and Consistent Lying*

Kunci dari kesuksesan dalam melakukan tindakan kecurangan adalah melakukan kebohongan secara konsisten dan efektif. Seseorang yang dapat melakukan kebohongan secara konsisten akan membuat kebohongannya tetap dalam jalur dengan tujuan agar kebohongannya tidak terkesan dibuat dan dapat menggambarkan keseluruhan cerita yang jelas. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan yang cukup baik agar dapat meyakinkan pihak auditor, investor dan pihak lainnya sehingga kecurangannya tidak terdeteksi.

6. *Immunity to Stress*

Pelaku kecurangan yang sukses dalam melakukan tindakan *fraud* umumnya memiliki kekebalan terhadap stres karena orang tersebut mengendalikan stres dengan baik. Bagi orang awam, kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengelola sebuah tindakan kecurangan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan tingkat stres melonjak ke level yang tinggi. Hal ini terutama disebabkan karena adanya risiko kecurangan tersebut terdeteksi, timbulnya beberapa konsekuensi yang bersifat pribadi dan harus menutupi tindakan kecurangannya setiap saat.

**2.5.2.5. Arrogance / Arogansi**

Arogansi merupakan tabiat individu yang merasa berkuasa atas semua sesuatu yang ada di perusahaan, dengan tidak mengindahkan kontrol internal yang ada pada perusahaan, meluaskan strategi *fraud*, dan mengamati keadaan sosial yang akan menguntungkan pribadinya. Arogansi diperlihatkan melalui perbuatan merasa superior dan ketamakan pada diri individu yang mempercayai jika kontrol internal mustahil berlaku secara pribadi (Horwath, 2011).

Menurut Aprilia *et al* (2017) sifat arogan timbul disebabkan adanya kepercayaan bahwa dirinya bisa mempraktikkan *fraud* dan mustahil ada pengendalian atas pribadi dia, sehingga oknum *fraud* berasumsi bahwa dia leluasa mempraktikkan *fraud* tanpa ada rasa khawatir adanya hukuman yang dilayangkan padanya. Arogansi memotivasi seseorang berani melakukan tindakan *fraud* dengan anggapan bahwa kontrol internal dan kebijakan yang diberlakukan di perusahaan tidak berlaku baginya (Hidayah dan Saptarini, 2019)

Horwath (2011) menyatakan ada 5 elemen arogansi dari sudut pandang CEO, yakni:

- a. Besarnya ego - CEO dipandang bak ‘selebriti’ daripada sebagai pengusaha
- b. bisa menjauhi pengendalian internal dan tidak terciduk;
- c. mempunyai perbuatan menindas orang lain;
- d. mempraktikkan aksi manajemen yang berkuasa; dan
- e. khawatir kehilangan kedudukan.

Fenomena ini digambarkan sebagai fenomena gunung es, yang dari kejahatan terlihat tidak besar dan tidak mengancam, tetapi bisa menyebabkan kerusakan ketika bertabrakan dengan sesuatu.

## **2.4. Variabel Moderasi**

### **2.4.1. Gender**

*Gender* merupakan salah satu sudut pandang yang paling sering berpengaruh dari identitas seseorang. Performa, atensi, kegiatan, pertemanan, aksi sosial, ikatan emosional, dan keputusan karier individu dipengaruhi oleh *gender*. Menurut pendekatan biologis, psikologis dan perilaku perbedaan gender disebabkan oleh perbedaan biologis antara pria dan wanita (Miller dan Ross, 1975).

Psikologi sosial memaknai *gender* sebagai mekanisme kognitif dan perseptual dimana perbedaan biologis diterjemahkan ke dalam perbedaan sosial. Dalam akuntansi, *gender* menjadi salah satu indikator yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan atau gagalnya proses audit dalam pelacakan *fraud*, contohnya

audit forensik dan audit investigasi yang mempunyai resiko yang tidak rendah (Rahmida dan Urumsah, 2020). Pria lebih menitikberatkan pada proyek, rasional, mandiri, dan bergairah, dilihat memiliki kecakapan dibanding perempuan dalam pembuatan tanggungjawab manajerial adalah pemahaman terhadap *sex role stereotypes*. Pada sisi lain, perempuan dilihat lebih tidak aktif, lembut, teliti, menitikberatkan pada bahan pemikiran dan lebih sensitif. Model ketergantungan yang disepakati secara budaya menjadikan perempuan tradisional dan *stereotypes* bergantung pada pria untuk tempat berlindung ekonomi dan fisik, tetapi model itu juga membuat pria tradisional dan *stereotypes* bergantung pada wanita dalam menjaga nilai-nilai yang sesuai etika dan emosional serta bantuan domestik (Rahmida dan Urumsah, 2020).

Perempuan dalam memproses data memiliki kecondongan yang cermat dengan memakai data yang lebih komplis dan menilai lagi data tersebut. Hasil penelitian (Rahmida dan Urumsah, 2020) menguraikan bahwa, auditor perempuan condong lebih baik dalam melacak perbuatan *fraud*. Namun demikian Nasution dan Fitriani (2012; Rahmida dan Urumsah, 2020) menyatakan bahwa, auditor pria telah dapat dibuktikan semakin meningkatkan kecakapan melacaknya apabila dihadapkan dengan gejala-gejala *fraud* dibandingkan auditor perempuan.

Capezio dan Mavisakalyan (2015) menyatakan bahwa terhadap keterlibatan wanita dalam dewan perusahaan menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang duduk dalam struktur dewan perusahaan maka semakin menurun kemungkinan terjadinya tindakan *fraud*. Sementara itu, Gupta (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang menugaskan seorang wanita sebagai Kepala Bagian Keuangan (CFO) akan memiliki resiko kemungkinan kesalahan pelaporan keuangan yang lebih tidak besar dibanding perusahaan yang menunjuk laki-laki sebagai kepala bagian keuangan.

#### **2.4.2. Pengalaman**

Dalam psikologi klasik, dunia kesadaran yang fenomenal, dunia pengalaman subjektif manusia, pada dasarnya dipandang sebagai dunia internal,

dan tidak mempunyai hubungan dengan realitas objektif eksternal (Vasilyuk, 1988). Pengalaman merupakan fenomena subjektif dan holistik di mana orang membangun pengalaman berdasarkan aturan yang tersedia di lingkungannya. Tegasnya, konteks di mana interaksi terjadi berperan penting dalam mendefinisikan pengalaman. Konteks digunakan secara bergantian untuk menunjukkan ruang dan tempat

John Dewey (1934) memberikan pandangan pragmatis untuk memahami pengalaman manusia. Dewey mendefinisikan pengalaman sebagai hasil, tanda dan imbalan dari interaksi antara organisme dan lingkungan yang merupakan transformasi dari interaksi menjadi partisipasi dan komunikasi. Pengalaman merupakan hasil interaksi antara makhluk dan objek yang terjadi pada lingkungan tertentu. Keduanya berkontribusi dalam membentuk kualitas pengalaman.

Terkait tindakan *fraud*, individu memutuskan menahan diri melakukan *fraud* karena pengalaman negatif yang dirasakan, atau memutuskan melakukan *fraud* karena kemampuannya memikirkan rasionalisasi yang membenarkan tindakannya dan dengan demikian, menghindari pengaruh negatifnya (Murphy dan Dacin, 2011).

Ketika individu menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan *fraud* yang bertentangan dengan intuisinya atau tidak jelas, maka dalam situasi ini, individu akan menggunakan penalaran, kemungkinan besar menggunakan analisis biaya-manfaat (Murphy dan Dacin, 2011). Jika individu merasakan tindakan *fraud* lebih besar daripada biayanya, maka individu akan melakukan tindakan *fraud*. Sebaliknya, ketika individu melakukan tindakan *fraud*, merasakan efek negatif, maka akan muncul motivasi/dorongan untuk menguranginya (Murphy dan Dacin, 2011).

Setiap individu memiliki pengalaman yang berlainan meskipun memandang satu fenomena yang serupa, hal ini berpengaruh oleh taraf kepandaian dan edukasi pada individu, faktor oknum atau pihak yang memiliki pengetahuan, faktor obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi dimana pengalaman itu dilaksanakan. Pengalaman juga turut dipengaruhi oleh usia, edukasi, kehidupan

sosial, adat istiadat, wilayah, aktivitas, karakter dan pengetahuan hidup setiap orang (Saparwati *et al.*, 2013)

### **2.4.3. Hubungan Istimewa (RPT/*Related Party Transaction*)**

Saat ini, tata kelola perusahaan menjadi isu penting dalam lingkungan bisnis. Ketika perusahaan besar dikendalikan oleh sejumlah kecil orang, maka isu tata kelola perusahaan menjadi penting, karena perusahaan dapat dimanipulasi secara mudah untuk kepentingan mereka dan mengorbankan kepentingan publik. Oleh sebab itu, risiko transaksi RPT (hubungan istimewa) dapat merugikan pemegang saham sehingga menyebabkan munculnya tuntutan untuk memantau transaksi (Jeon, 2019)

Hubungan istimewa (RPT/*Related Party Transaction*) didefinisikan IAS 24 sebagai pelimpahan sumber daya, fasilitas, atau pertanggungjawaban antar bagian-bagian yang berhubungan, terlepas apakah belanja dibebankan, dan dua kelompok atau lebih dianggap berhubungan apabila salah satu mempunyai kecakapan guna mengendalikan, menjalankan kontrol bersama atau mempunyai pengaruh signifikan atas lainnya dalam menyusun ketetapan operasional atau ketetapan finansial. Contoh yang relevan untuk tujuan oportunistik adalah ketika transaksi dilakukan dengan harga berbeda dari harga pasar, keuntungannya dibagi di antara anggota kelompok, sedangkan pendapatan yang dikonsolidasikan umumnya tetap tidak terpengaruh (Beerbaum, 2020)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting Standards Board/ FASB*) mendefinisikan RPT sebagai transaksi antar pihak yang berelasi meskipun barangkali tidak diberikan pengakuan akuntansi. Misal, satu entitas dapat menerima jasa dari entitas kedua yang terkait tanpa biaya dan tanpa pencatatan penerimaan jasa.

Menurut IAS 24 ada dua jenis hubungan istimewa terkait, yakni hubungan yang dilakukan secara personal (a) atau entitas (b). Ketika person (a) memegang kendali perusahaan dengan memegang saham mayoritas, maka semua perusahaan lain yang terkait dengan (a) terkait dengan yang lain karena kepentingan sama yang

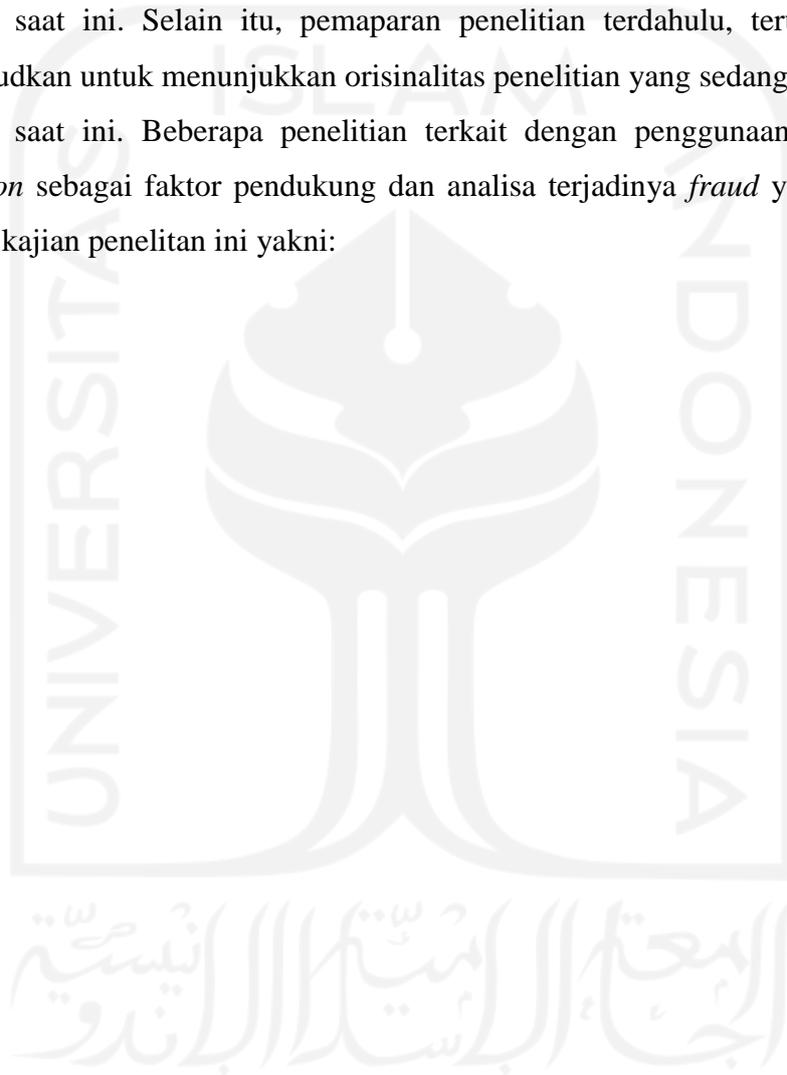
ditunjukkan oleh (a). Hal serupa terjadi ketika (a) memiliki pengaruh signifikan pada perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan operasional secara langsung maupun tidak langsung, meskipun tidak dapat mengendalikan sepenuhnya. Hal itu terjadi dalam kasus investasi dalam entitas, ketika person (a) menguasai sebagian besar saham. Jika (a) adalah anggota manajemen personal kunci (KPM), maka ia memiliki "otoritas dan tanggung jawab untuk membuat rencana, mengarahkan dan mengontrol aktivitas entitas, semua entitas yang dikontrol secara signifikan oleh (a) harus menjamin pengungkapan transaksi satu sama lain (Beerbaum, 2020)

Transaksi dengan pihak yang mempunyai ikatan istimewa (RPT) mempunyai 2 hipotesa yang berlainan yakni sebagai transaksi oportunistis atau sebagai transaksi yang efisien. Dalam transaksi oportunistis, RPT membuat *conflict of interest* yang selaras dengan *agency theory*, serupa dengan yang dinyatakan oleh Jian dan Wong (2003) yang menyatakan transaksi dengan pihak yang mempunyai ikatan istimewa (RPT) memperlihatkan kecondongan oportunistis. Hal ini dipastikan dengan diperolehnya tingginya nilai penjualan, terutama kepada pemangku saham kendali dan anggota lain organisasi dalam grup, saat organisasi mempunyai motivasi untuk menyelewengkan laba.

Jeon (2019) menyatakan bahwa bisnis dengan RPT memperlihatkan kecondongan oportunistis ketimbang sebagai efisiensi bisnis. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian (Jeon, 2019), hasil ini memperlihatkan adanya kesempatan bisnis RPT kian besar, ketika makin tidak kuatnya *size corporate governance*, yaitu saat makin kurangnya total komisaris independen, makin minimnya imbalan tunai kepada CEO dan direktur, juga kian besarnya imbalan CEO dalam bentuk opsi saham. Bisnis RPT ini juga dilihat sebagai oportunistis oleh investor, diperlihatkan dengan adanya ikatan yang negatif antara kehadiran bisnis RPT dengan *future return*.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang penggunaan teori *Fraud Pentagon* serta pengaruhnya dalam mendeteksi *fraud* akan diuraikan di bawah ini sebagai bagian langkah perbandingan dalam rangka mengetahui perbandingan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti saat ini. Selain itu, pemaparan penelitian terdahulu, terutama sekali, dimaksudkan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti saat ini. Beberapa penelitian terkait dengan penggunaan teori *Fraud Pentagon* sebagai faktor pendukung dan analisa terjadinya *fraud* yang berkaitan dengan kajian penelitian ini yakni:



**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu *Fraud Pentagon* dalam Mendeteksi *Fraud***

**Laporan Keuangan**

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Teori dan Analisis	Hasil Penelitian
1	Agustina dan Pratomo (2019)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecurangan Pelaporan Keuangan</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Pentagon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Deskriptif Kuantitatif</li> <li>▪ 33 Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan</li> <li>▪ Teori Fraud Pentagon</li> <li>▪ Analisis Statistik deskriptif dan Analisis Regresi Logistik</li> </ul>	Tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
2	Handoko <i>et al.</i> , (2020)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecurangan Pelaporan Keuangan Sektor Perbankan</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Pentagon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Kuantitatif Berbasis Data Sekunder</li> <li>▪ 35 Sampel Sektor Bank</li> <li>▪ Teori Fraud Pentagon</li> <li>▪ OLS (Ordinary Least Square)</li> </ul>	Kesempatan merupakan factor yang paling berpengaruh terhadap perusahaan dalam sector perbankan dalam <i>fraud</i> . Sementara factor yang lain tidak berpengaruh secara signifikan.
3	Akbar (2017)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecurangan Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Pentagon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Deskriptif Kuantitatif</li> <li>▪ 79 Sampel Perusahaan Manufaktur</li> <li>▪ Teori Fraud Pentagon</li> <li>▪ PLS (Primary Least Square)</li> </ul>	Tekanan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terjadinya <i>fraud</i> laporan keuangan manufaktur di Indonesia, yaitu sebesar 67,2%. Sedangkan faktor peluang, rasionalisasi dan kapabilitas kurang berpengaruh signifikan dengan nilai 32,8%.
4	Sawaka K. dan Ramantha (2020)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persepsi Pelaporan Keuangan</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Pentagon</li> <li>▪ Good Corporate Governance sebagai variable moderator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Deskriptif Kuantitatif</li> <li>▪ 2 BPR di Provinsi Bali. BPR KS BAS dan BPR Legian</li> <li>▪ Teori Fraud Pentagon</li> <li>▪ Analisis Deskriptif</li> </ul>	Tekanan berpengaruh negatif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Peluang dan rasionalitas berpengaruh positif terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. Kompetensi dan arogansi tidak berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. GCG memperlemah pengaruh negatif tekanan terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan. GCG

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Teori dan Analisis	Hasil Penelitian
				memperlemah pengaruh positif dari peluang dan rasionalitas terhadap persepsi kecurangan. GCG tidak memoderasi pengaruh kompetensi dan arogansi terhadap persepsi kecurangan pelaporan keuangan, namun GCG merupakan jenis moderasi potensial untuk interaksi kompetensi dan arogansi.
5	Christian <i>et al.</i> , (2019)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Korporat di Indonesia</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Pentagon</li> <li>▪ Fraud Diamond</li> <li>▪ Fraud Triangle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Diskriptif Empiris</li> <li>▪ 310 Sampel Perusahaan Manufaktur</li> <li>▪ Teori Fraud Pentagon, Fraud Diamond &amp; Fraud Triangle</li> </ul>	semua varian teori <i>fraud</i> (teori fraud triangle, teori fraud diamond dan teori fraud pentagon) dapat diselidiki pengaruhnya yang signifikan terhadap <i>fraud</i> perusahaan dengan hanya menggunakan data sekunder yang tersedia dan dapat diakses secara bebas oleh publik.
6	Rustiarini <i>et al.</i> , (2019)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perilaku <i>Fraud</i> Birokrat dalam <i>Procurement</i></li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fraud Diamond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Diskriptif /Library Research</li> <li>▪ Teori Fraud Diamond</li> </ul>	Pengadaan barang publik sebagai wilayah berisiko tinggi bagi terjadinya <i>fraud</i> (korupsi). Faktor situasi (tekanan dan peluang) akan berinteraksi dengan aspek psikologis (rasionalisasi) dan kemampuan individu untuk membimbing individu melakukan tindakan <i>fraud</i> .
7	Nurharjanti, (2017)	Variable Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan barang dan jasa</li> </ul> Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas komite pengadaan</li> <li>▪ kualitas pemasok</li> <li>▪ sistem dan prosedur pengadaan</li> <li>▪ penilaian risiko</li> <li>▪ etika</li> <li>▪ kerangka kerja pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Survey</li> <li>▪ Responden 3 orang PPK</li> <li>▪ (pejabat pembuat komitmen), 22 orang panitia pengadaan, dan 25 pejabat penerima hasil pekerjaan di Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas di Yogyakarta.</li> <li>▪ Teori Procurement</li> <li>▪ Analisis Kualitatif</li> </ul>	Kualitas komite pengadaan, kualitas pemasok, sistem dan prosedur pengadaan, serta penilaian risiko berpengaruh negatif terhadap terjadinya <i>fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa. Sedangkan etika dan kerangka kerja pengadaan tidak berpengaruh
8	Salim <i>et al.</i> , (2016)	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencegahan <i>Fraud</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode Kuantitatif Eksplanatif</li> </ul>	komitmen organisasi pada implementasi <i>e-procurement</i> berpengaruh secara signifikan dan

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, Teori dan Analisis	Hasil Penelitian
		Pengadaan Barang  Variabel Independen ▪ Implementasi E-Procurement dan Komitmern Organisasi	▪ Responden 140 Aparatur Pengadaan Barang ▪ Teori E-Procurement ▪ Analisis SEM (Structural Equation Modelling)	positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/ jasa pemerintah.
9	Juliantini dan Padnyawati, (2020)	Variabel Dependen ▪ Procurement <i>Fraud</i>  Variabel Independen ▪ Fraud Triangle & Planned Behaviour	▪ Metode Diskriptif Kuantitatif ▪ Sampel, 44 Auditor Independen ▪ Instrumen: Skala Likert ▪ Teori : Fraud Triangle & Planned Behaviour ▪ Analisis SPSS	Variabel tekanan keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Kelemahan dalam sistem dan prosedur pengadaan berpengaruh negatif dan signifikan. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh signifikan. Sikap terhadap perilaku kecurangan tidak berpengaruh signifikan. Norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan. Kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengadaan.
10	Said <i>et al.</i> , (2017)	Variabel Dependen ▪ Employee <i>Fraud</i>  Variabel Independen ▪ Fraud Triangle & Ethical Value	▪ Metode Diskriptif Kuantitatif ▪ Responden, 108 Pegawai dari 3 Bank terbesar di Malaysia ▪ Instrumen: Skala Likert ▪ Teori : Fraud Triangle & Ethical Value ▪ Analisis Statistik Diskriptif	Nilai-nilai etika berhubungan negatif dengan <i>fraud</i> karyawan peluang dan rasionalisasi, berhubungan positif dengan <i>fraud</i> karyawan

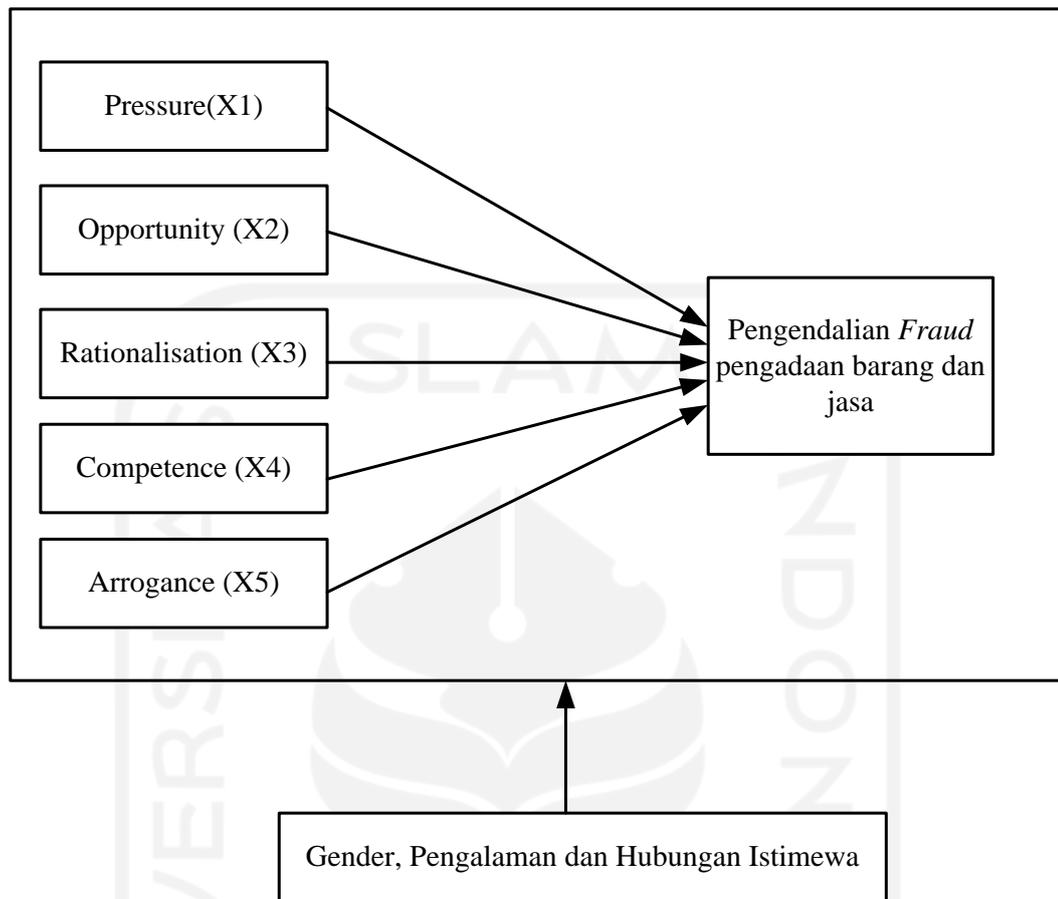
Menurut penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu bisa diketahui pengaruh *fraud pentagon* pada tindakan *fraud* dalam *financial statement* di lembaga/organisasi/ perusahaan dan *procurement fraud* yang lebih banyak menggali faktor-faktor nilai atau etika yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam *fraud*, seperti telah dipaparkan dari beberapa kasus penelitian pada tabel diatas, maka dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan sedang peneliti laksanakan.

Persamaan penelitian yang akan sedang peneliti laksanakan dengan beberapa penelitian di atas adalah pada penggunaan teori *fraud pentagon* sebagai pisau analisis dan variabel *independen* untuk melihat sejauh mana pengaruh *fraud pentagon* terhadap tindakan *fraud* dalam suatu lembaga/organisasi/ perusahaan. Meskipun hasil yang dipaparkan pada masing-masing penelitian berbeda-beda.

Sedangkan yang membedakan penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah obyek dan tujuan penelitian serta variable penelitian. Obyek dan tujuan penelitian terdahulu banyak meneliti *fraud* pada laporan keuangan dan *procurement fraud* yang terjadi di lembaga publik. Adapun obyek penelitian yang menjadi kajian peneliti adalah pada *procurement fraud* yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, peneliti menambahkan variable moderasi yang terdiri dari *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa, dalam rangka untuk mengetahui apakah *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa, juga dapat menjadi faktor pengaruh yang memperkuat atau memperlemah terjadinya *fraud*.

## **2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Model analisis kerangka pemikiran teoritis ini menjadi berkembang berdasarkan kajian pustaka yang tersedia. Bisa ditampakkan dari pemaparan kerangka teoritis dan hipotesa yang disajikan pada bagian ini. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk model penelitian pada Gambar 2.4.



**Gambar 2.4. Model Penelitian**

## 2.7. Pengembangan Hipotesa

### 2.7.1. Pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa

Dalam teori atribusi, menyatakan bahwa adanya perbedaan tindakan karena sebab personal dan tindakan karena sebab lingkungan. Kata lainnya, atribusi yang diciptakan individu tergantung pada lokus kausalitas tindakan atau kejadian adalah *person* (atribusi internal), atau lingkungan (atribusi eksternal). Perilaku seseorang yang berasal dari faktor eksternal dipengaruhi oleh tekanan atau *pressure*. Tekanan atau *pressure* seperti diilustrasikan Gupta (2019) merupakan dorongan individu untuk melakukan perilaku *fraud*. Tekanan dapat ditimbulkan persoalan pribadi, seperti persoalan keuangan, kecanduan obatan-obatan dan lingkungan kerja. Manajemen atau karyawan bisa jadi mendapat tawaran insentif

atau dalam tekanan agar melakukan tindakan *fraud*. Menurut Abdullahi dan Mansor (2015) tekanan merujuk pada faktor yang menjadi sebab terjadinya perilaku tidak sesuai dengan etika. Setiap pelaku *fraud* mendapat tekanan untuk melakukan perilaku tidak sesuai dengan etika.

Motivasi mempraktikkan kejahatan *fraud* dapat dialami pada pegawai dan direktur disebabkan tekanan finansial, budaya yang tidak baik, dorongan lingkungan kerja. Dalam finansial, contohnya, penyelewengan uang perusahaan berawal dari desakan yang menghimpit, jadi individu yang mempraktikkan hal tersebut sedang memiliki kebutuhan finansial yang memaksa. Tekanan atau *pressure* yang mendorong individu mempraktikkan perilaku *fraud* dapat diakibatkan persoalan pribadi, misalnya persoalan finansial dan lingkungan kerja. Adakalanya manajer atau karyawan mendapat tawaran insentif atau dalam tekanan agar melakukan tindakan *fraud*. (Gupta, 2019). Tekanan finansial maupun non finansial. mendorong seseorang mempraktikkan dan menutupi *fraud* (Abdullahi dan Mansor, 2015). Tekanan finansial timbul diakibatkan kemauan membenahi *lifestyle*, ketamakan atau desakan ekonomi karena tingginya standar hidup. Sedangkan tekanan non finansial timbul diakibatkan tekanan yang dihubungkan pekerjaan, seperti tidak mendapat keadilan antar pegawai, kecewa di lingkungan kerja, dan perilaku untuk menyembunyikan kemampuan kerja yang tidak baik (Rahmatika *et al.*, 2019). Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor tekanan dalam teori *fraud pentagon* terhadap terjadinya *fraud* seperti sudah dikatakan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = Faktor tekanan (*pressure*) berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan Jasa**

### **2.7.2. Pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Kesempatan dalam *Fraud Pentagon theory* adalah kepercayaan individu yang mempraktikkan perilaku *fraud* yang percaya bahwa perilakunya mustahil diketahui oleh pihak organisasi. Jika di kalangan organisasi untuk sistem kontrol

internalnya tidak kuat, tidak cukupnya pengendalian dari manajemen, serta tidak akuratnya sistem di dalam organisasi tersebut maka kesempatan untuk melakukan *fraud* dapat terjadi (Horwath, 2011).

Organisasi mesti bisa melakukan metode, langkah, kontrol serta tata kelola yang baik sehingga bisa melacak *fraud* secara efisien dan menciptakan seluruh anggota organisasi tidak mempunyai peluang melaksanakan *fraud*. Jika anggota organisasi memiliki kejujuran yang minim sedangkan organisasi tidak mempraktikkan kontrol internal yang cakap, maka bisa menyediakan peluang anggota mempraktikkan *fraud*. Konsep kesempatan memperlihatkan bahwa individu akan menyalahgunakan keadaan yang ada untuk mempraktikkan *fraud* (Kelly dan Hartley, 2010; Abdullahi dan Mansor, 2015). Kesempatan untuk seseorang mempraktikkan perilaku *fraud* disebabkan tidak cukupnya kontrol internal organisasi (Astuti *et al.*, 2015). Hakekat kesempatan seperti tekanan dalam pengertian adanya kesempatan tidak harus berwujud. Tapi, kesempatan ada dalam persepsi dan kepercayaan oknum *fraud*. Dalam banyak persoalan, makin minim risiko terbekuk, kian besar kesempatan terjadinya *fraud* (Cressey, 1953). Hooper dan Pornelli (2010; Abdullahi dan Mansor, 2015) berpendapat bahwa meskipun tekanan/motivasi sangat kuat, *fraud* tidak akan bisa terjadi kecuali adanya kesempatan. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor kesempatan dalam teori *fraud pentagon* terhadap terjadinya *fraud* seperti telah dikatakan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = Faktor kesempatan (*opportunity*) berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan Jasa**

### **2.7.3. Pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Sebagai pelopor teori atribusi Heider (1958; Hewett *et al.*, 2017), mengungkapkan bahwa seseorang memakai penjelasan yang dapat diterima akal dalam mengetahui, meramal, dan mengawasi suatu kejadian. Ia mengemukakan bahwa cara menjelaskan bagi orang umum itu lugu, karena tidak memakai konsep,

dianalisa, atau diuji coba secara ilmiah. Bagaimanapun, proses seseorang hingga pada penjelasan peristiwa-peristiwa sama dengan metode ilmuwan sampai pada penjelasan yaitu, dengan metode yang memakai logika dan bersifat analitis

*Rationalization* merupakan faktor pembenaran yang utama bagi berlangsungnya *fraud*, dimana oknum berusaha mendapat legitimasi atas tindakannya. Rasionalisasi adalah faktor dari teori *fraud* yang amat sukar dihitung. *Rationalization* dibutuhkan supaya oknum bisa memahami tindakannya yang menentang hukum untuk konsisten melindungi identitasnya sebagai individu yang dipercaya. Rasionalisasi terjadi karena kurangnya integritas pribadi, atau penalaran moral (Utami *et al.*, 2019). Sikap individu atau segerombol orang yang berusaha mendapatkan legitimasi rasional atas perilaku *fraud* yang dijalankan (Astuti *et al.*, 2015). Rasionalisasi dipraktikkan individu yang berusaha mendapatkan legitimasi atas kegiatannya yang berisi *fraud*. Rasionalisasi lazimnya dijalankan manajemen dengan acapkali menukar auditor di organisasinya supaya perilaku *fraud* yang dipraktikkan tidak terlacak auditor lama dan menyembunyikan risiko *fraud* yang dijalankan, sehingga kecil kesempatan diperiksa oleh auditor baru, sebab auditor baru belum mengetahui situasi organisasi dengan baik (Agustina dan Pratomo, 2019).

Rasionalisasi menampakkan bahwa pelaku *fraud* wajib menyimpulkan gagasan yang bisa didapat secara moral sebelum melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Rasionalisasi mendorong pada pembenaran dan dalih bahwa perbuatan yang tidak memiliki moral lain dengan tindak kejahatan pidana (Cressey, 1953). Pembenaran perilaku *fraud* disebabkan tidak cukupnya kejujuran pribadi atau pemikiran moral (Rae dan Subramaniam, 2008; Abdullahi dan Mansor, 2015). Kecondongan melaksanakan kecurangan berhubungan erat pada etika moral serta perbuatan pribadi individu (Abdullahi dan Mansor, 2015). Jembatan antara tekanan dan kesempatan terjadi ketika individu bisa merasionalisasi tindakan *fraud* (Abdullahi dan Mansor, 2015). Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor rasionalisasi dalam teori *fraud pentagon* terhadap

terjadinya *fraud* seperti telah dikatakan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> = Faktor rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan Jasa**

#### **2.7.4. Pengaruh kompetensi (*competence*) terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Weiner dalam teori atribusi menyatakan setiap keberhasilan atau kegagalan pekerjaan disertai cara mencari penyebab hasilnya dalam tiga dimensi: lokus kausalitas (serupa dalam proposisi Heider), stabilitas, (*stability*) dan kecakapan pengendalian (*controllability*) (Weiner, 1992; Weiner *et al.*, 1972; Hewett *et al.*, 2017). Kompetensi sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang. Kemampuan mengontrol (*controllability*) juga utama karena individu tidak menciptakan atribusi kausal sekedar untuk mengetahui kenapa sesuatu berlangsung, namun juga mengawasi peristiwa di waktu yang akan datang. Gabungan lain dari lokus kausalitas, stabilitas, dan kecakapan mengawasi dalam konteks keberhasilan disangkutpautkan dengan atribusi kecakapan, upaya, kesukaran tugas, dan kemujuran.

Amaliah *et al.*, (2015), Devy *et al.*, (2017), dan Putriasih *et al.*, (2016) menguraikan peralihan dewan komisaris dari variabel *competence/ capability* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap *fraud* disebabkan peralihan dewan komisaris dianggap upaya organisasi untuk mengesampingkan direksi yang dipandang mengetahui adanya *fraud* yang dipraktikkan organisasi.

Kompetensi adalah kecakapan individu sebagai pegawai yang menyingkirkan kontrol internal, mengembangkan rencana penyembunyian yang tidak mudah, dan mengawasi keadaan sosial demi keuntungannya (Mark, 2012; Handoko *et al.*, 2020). Dalam *fraud*, kompetensi termasuk kecakapan, memiliki keahlian, memiliki keberanian, keyakinan diri, wewenang dan mempunyai kuasa yang memungkinkan individu untuk mempraktikkan perilakunya tanpa diketahui

atau diketahui tetapi tidak bisa diambil tindakan untuk langkah selanjutnya (Manzaneque *et al.*, 2016).

Kompetensi merupakan ciri khas atau keterampilan dan kecakapan yang digunakan untuk melaksanakan *fraud*. Kemampuan mengenali peluang *fraud* dan menjadikannya kenyataan. Jabatan, kepandaian, ego, desakan, tipu daya, dan tekanan, merupakan elemen pembantu kapabilitas/kompetensi (Wolfe dan Hermanson, 2004). Mackevičius dan Giriūnas (2013; Abdullahi dan Mansor, 2015), tidak setiap individu yang mempunyai dorongan, kesempatan, dan realisasi bisa mempraktikkan *fraud* karena tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan atau merahasiakan *fraud*. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) ada beberapa situasi penting yang berhubungan dengan kemampuan (*competence/capability*) yang membuat individu bisa melakukan *fraud*, antara lain: *Position/function*, *Intelligensi*, *Ego/Confidence*, *Coercion Skills Effective and Consistent Lying*, *Immunity to Stress*. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor rasionalisasi dalam teori *fraud pentagon* terhadap terjadinya *fraud* seperti telah dikatakan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> = Faktor kompetensi (*comprtence*) berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan Jasa**

#### **2.7.5. Pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Dalam teori *agency* menyatakan bahwa persoalan keagenan yang ditimbulkan manajer, pemegang saham atau *principal* pada dasarnya tidak dapat mengawasi secara terus menerus aktivitas manajer, dan karenanya tidak sepenuhnya dapat memahami situasi nyata di balik keputusan-keputusan bisnis penting yang diambil manajemen. Ketidaksepakatan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen bisa menyebabkan ketidakefisienan, bahkan kerugian bagi perusahaan. Dalam beberapa kondisi, dengan keuntungan informasi yang dimiliki, seorang manajer dapat mencari keuntungan untuk meningkatkan kekayaan mereka

sendiri, sehingga manajeri lebih bersifat arogansi, yang mengarah pada risiko etika dan konflik pengambilan keputusan (Nguyen *et al.*, 2020).

Perbuatan congkak atau angkuh individu yang berpendapat bahwa dia bisa mempraktikkan *fraud* merupakan sikap arogansi. Perilaku ini timbul disebabkan adanya keadaan lebih mengutamakan diri sendiri (*self interest*) di dalam manajemen. Sikap merasa superior dan ketamakan individu yang mempercayai bahwa kontrol internal tidak bisa berjalan secara perorangan (Horwath, 2011). Watak arogan timbul disebabkan adanya kepercayaan bahwa dia bisa mempraktikkan *fraud* dan tidak ada kontrol atas dia sendiri, sehingga oknum *fraud* mempunyai pikiran dia leluasa mempraktikkan *fraud* tanpa ada rasa tidak berani ada hukuman yang diberikan (Aprilia *et al.*, 2017).

Arogansi memotivasi seseorang berani melakukan tindakan *fraud* dengan anggapan bahwa kontrol internal dan kebijakan yang berlangsung di organisasi tidak berlaku baginya (Hidayah dan Saptarini, 2019). Namun hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nindito (2018), Septriani dan Handayani, (2018) mengemukakan tidak ada pengaruh antara *arrogance* terhadap *fraud* pada laporan keuangan. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor rasionalisasi dalam teori *fraud pentagon* terhadap terjadinya *fraud* seperti telah dikatakan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> = Faktor arogansi (*arrogance*) berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan Jasa**

#### **2.7.6. Pengaruh *fraud pentagon* terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan gender, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi**

Pada teori atribusi Heider menjelaskan *self-serving bias* (kecenderungan mengurus diri sendiri), bahwa individu mengeterkaitkan keberhasilan mereka sendiri dengan faktor disposisi dan internal, selama faktor eksternal dan tak terkendali dipergunakan untuk menerangkan dasar kegagalan mereka. Misalnya, pegawai yang mendapat promosi mengeterkaitkan keberhasilannya dengan

kepandaian mereka, tetapi jika mereka gagal mendapat promosi, mereka menghubungkannya dengan ketidakadilan organisasi (Miller dan Ross, 1975; Hewett *et al.*, 2017). Karakteristik seseorang ditinjau dari gender, pengalaman dan hubungan istimewa, yang merupakan bagian dari kepercayaan diri seseorang sehingga merasakan bahwa keberhasilan dan kegagalan seseorang tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik individu. Laki-laki merasa dirinya lebih mampu, begitu juga dengan pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa, dan adanya hubungan istimewa dengan pihak terkait.

Pradanti dan Prastiwi (2014) dalam penelitiannya menyatakan pegawai pria lebih mengutamakan uang dibandingkan pegawai wanita. Penelitian menyatakan wanita lebih mempunyai perilaku yang beretika dibandingkan pria. Wang *et al.* (2022) menegaskan bahwa perempuan menolak risiko dan lebih berkomitmen pada praktik etis daripada laki-laki dalam posisi kepemimpinan perusahaan.

Sehubungan dengan faktor pengalaman yang memengaruhi tindakan *fraud* dapat dijumpai dalam hasil penelitian Rahmawati dan Usman (2014) yang menyatakan bahwa variabel pengalaman audit mempunyai pengaruh terhadap kecakapan melacak *fraud*. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang menyatakan adanya keterkaitan positif antara *Fraud Pentagon* dengan pengalaman sebagai variabel moderasi. Artinya, untuk melacak *fraud*, auditor memerlukan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan audit. Disebabkan pengalaman akan menjadikan auditor internal gampang dalam mengerahkan bukti yang memadai, kredibel, dan relevan.

Kecakapan yang dipunyai agen akan berpengaruh pada agen dalam melaksanakan *fraud* terhadap laporan keuangan. *Fraud* mustahil berlangsung tanpa kehadiran individu yang layak. Makin tinggi kecakapan manajemen dalam menjalankan laporan keuangan, kian besar kesempatan organisasi untuk melaksanakan *fraud*. Anggota komite audit mempunyai latar belakang akademis akuntansi atau keuangan karena fungsi pokok dari komite audit adalah mengontrol alur pelaporan keuangan sebuah organisasi sehingga komite audit dapat mengontrol dan menilai organisasi dalam melaksanakan menyusun pelaporan keuangan

sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi terjauhkan dari *accounting irregularities*.

Dalam kaitannya ikatan istimewa dengan berlangsungnya *fraud* diuraikan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai ikatan istimewa (RPT) mempunyai dua hipotesa yang berlainan yakni sebagai transaksi *oportunis* atau sebagai transaksi yang efisien. Sebagai transaksi oportunis, *conflict of interest* yang disebabkan oleh RPT konsisten *dengan agency theory*, seperti yang diuraikan oleh Jian dan Wong (2003) yang menyatakan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki ikatan istimewa (RPT) memperlihatkan kecondongan *oportunis*. Hal ini dibuktikan dengan dijumpai tingginya harga penjualan, terutama untuk para pemangku saham kendali dan agen lain organisasi, saat organisasi memiliki insentif untuk menyelewengkan laba.

Jeon (2019) menyatakan transaksi dengan RPT memperlihatkan kecondongan *oportunis* dibandingkan sebagai efisiensi transaksi. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil penelitian Kholbeck dan Mayhew (2010; Jeon, 2019), yang mengatakan bahwa makin besar adanya kesempatan transaksi RPT, makin tidak kuatnya *size corporate governance*, yakni saat kian tidak banyaknya total komisaris independen, makin tidak banyaknya imbalan tunai kepada CEO dan direktur, serta makin tidak kecilnya imbalan CEO dalam bentuk opsi saham. Bisnis RPT ini juga dilihat sebagai oportunis oleh investor, diperlihatkan dengan adanya kaitan yang negatif antara adanya transaksi RPT dengan *future return*. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu tentang pengaruh gender, pengalaman dan hubungan istimewa terhadap terjadinya *fraud* seperti telah disebutkan, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

**H6: Gender, pengalaman dan hubungan Istimewa memoderasi pengaruh *fraud pentagon* terhadap pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah cara untuk memeriksa konsep-konsep khusus dengan cara menyelidiki keterkaitan antar variabel yang lazimnya dihitung dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka tersebut dapat dianalisa berdasarkan tahapan-tahapan statistik. Laporan akhir dari penelitian ini biasanya mempunyai susunan yang konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei untuk menganalisa keterkaitan *fraud pentagon* sebagai variabel independen terhadap upaya pengendalian *procurement fraud* sebagai variabel dependen, di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan gender, pengalaman dan hubungan istimewa sebagai variabel moderasi.

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian merupakan penyamarataan obyek atau subyek yang memiliki mutu dan karakteristik khusus untuk diteliti dan sebagai keseluruhan obyek penelitian (Sugiyono, 2021). Populasi dalam penelitian ini mencakup Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sampel penelitian ini bersumber dari bermacam Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampel ini diambil dengan menambahkan berbagai kriteria seperti karyawan yang memiliki kedudukan struktural sebagai jenis pihak yang turut terkait dalam pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi, dekan dan wakil dekan, staff perguruan tinggi, tiap-tiap kepala prodi juga seluruh staff administrasi dari tiap-tiap prodi. Ukuran sampel di penelitian ini ditentukan dengan dihitung menurut pendapat Musyaffi *et al.*, (2021) yang mengatakan total sampel yang *representative* dalam penelitian SEM minimal 100 hingga 200 responden. Maka dari itu, penelitian ini total sampel sejumlah 100 responden.

### **3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Tipe data di penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data yang didapat melalui penelitian di lapangan dengan memakai cara penggabungan data orisinil dinamakan data primer. Untuk data sekunder didapat dari lembaga pengumpul data dan diedarkan pada publik yang menggunakan data (Kuncoro, 2014). Metode survei dilaksanakan dengan membagikan angket untuk responden.

Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Teknik ini memberi peluang yang serupa agar jadi sampel untuk setiap faktor atau kelompok populasi yang dipilih. Teknik *non probability sampling* yang dipilih adalah teknik *purposive sampling*. Teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021). Karena keterbatasan waktu dan jangkauan penelitian yang sangat luas, sampel dalam penelitian ini dibatasi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jawa Tengah diantaranya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Muhammadiyah Semarang.

### **3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penetapan konstruk yang akan diteliti sampai menjadi variabel yang bisa dihitung adalah kata lain dari definisi operasional. Definisi operasional menguraikan metode yang dibutuhkan untuk konstruk yang akan diteliti dan dioperasikan sehingga memberi kemungkinan peneliti lain menjalankan tiruan dengan metode yang sama atau memperluas metode pengukuran yang lebih baik (Sugiyono, 2021).

Skala pengukuran angket memakai 6 skala Likert, dimana tanggapan setiap item instrumen memiliki tingkat mulai dari STS = Sangat Tidak Setuju (1), TS = Tidak Setuju (2), KS = Kurang Setuju (3), S = Setuju (4), SS = Sangat Setuju (5), dan SSS = Sangat Setuju Sekali (6).

### 3.4.1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal dari seseorang yang melakukan *fraud* dapat mengakibatkan terjadinya *pressure*. Indikator tekanan pada penelitian ini diukur melalui cara memimpin dan keselarasan imbalan, sebab cara memimpin n dapat menjadi pengaruh terjadinya *fraud* di lingkungan organisasi (Rokhim dan Jaya, 2021).

Gabungan pernyataan dari penelitian yang dijalankan terdahulu oleh Faradiza (2019) dengan bermacam penyesuaian yang berhubungan dengan topik ini digunakan untuk mengukur variabel tekanan. Adapun untuk indikator dan item pertanyaan variabel tekanan seperti ditampilkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Item Pertanyaan Variabel Tekanan**

Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
Tekanan ( <i>pressure</i> )	Ada kecenderungan kurangnya penghargaan pimpinan terhadap hasil kerja pengadaan barang dan jasa.	(Faradiza, 2019)
	Adanya kecenderungan ketidakadilan dalam beban pekerjaan pengadaan barang dan jasa.	(Rokhim dan Jaya, 2021)
	Ada kebutuhan organisasi untuk memaksimalkan harga dalam pengadaan barang dan jasa.	
	Ada kecenderungan pimpinan memberikan arahan untuk memanipulasi dalam pengadaan barang dan jasa.	

### 3.4.2. Kesempatan (*Opportunity*)

Adanya peluang untuk menjalankan *fraud* atau keadaan yang melebarkan peluang bagi organisasi atau individu disebut dengan kesempatan. Kesempatan ini bisa timbul karena adanya kontrol yang lemah.

Gabungan pernyataan dari penelitian yang dijalankan terdahulu oleh Faradiza (2019) dengan bermacam penyesuaian yang berhubungan dengan topik ini digunakan untuk mengukur variabel kesempatan. Adapun untuk indikator dan item pertanyaan variabel kesempatan seperti ditampilkan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Item Pertanyaan Variabel Kesempatan**

Variabel	Item Pengukuran	Referensi
Kesempatan ( <i>Opportunity</i> )	Sistem informasi yang digunakan masih terbatas atau belum dengan sistem komputerisasi.	(Faradiza, 2019)
	Berbagai kendala teknis menyebabkan belum sinkronnya sistem pengadaan barang dan jasa.	
	Terbatasnya akses ke setiap bagian sistem informasi pengadaan barang dan jasa menyebabkan evaluasi sulit dilakukan.	
	Tidak sinkronnya sistem pengadaan barang dan jasa menjadi celah terjadinya fraud (kecurangan).	

### 3.4.3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi menyebabkan alasan perbuatan membenarkan pribadi pelaku *fraud* atas kekeliruan perilaku yang menyebabkan orang lain. Gabungan pernyataan dari penelitian yang dijalankan terdahulu oleh Najahningrum (2013) dengan bermacam penyesuaian yang berhubungan dengan topik ini digunakan untuk mengukur variabel rasionalisasi. Adapun untuk indikator dan item pertanyaan variabel rasionalisasi seperti ditampilkan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Item Pertanyaan Variabel Rasionalisasi**

Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
Rasionalisasi	Arahan pimpinan menjadi acuan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.	(Najahningrum, 2013)
	Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat kode etik yang menyatakan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam aktifitas tersebut	
	Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat kode etik yang menyatakan berbagai aturan etis tetapi seringkali tidak dipatuhi oleh individu dalam aktifitas tersebut	
	Ada indikasi tidak semua perilaku tidak etis dalam pengadaan barang dan jasa diberi sanksi.	
	Lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor tidak sampai ke masalah etis dalam pengadaan barang dan jasa.	

#### 3.4.4. Kompetensi (*Competence*).

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Siddiq dan Hadinata (2016) menguraikan bahwa *fraud* hanya bisa berlangsung jika individu yang benar mempunyai kecakapan yang tepat untuk melakukan *fraud*. Gabungan pernyataan dari penelitian yang dijalankan terdahulu oleh Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) dengan bermacam penyesuaian yang berhubungan dengan topik ini digunakan untuk mengukur variabel kompetensi. Adapun untuk indikator dan item pertanyaan variabel rasionalisasi seperti ditampilkan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Item Pertanyaan Variabel Kompetensi**

Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
Kompetensi ( <i>Competence</i> )	Sikap percaya diri dengan kemampuan dan posisi strategis dalam pengadaan barang dan jasa sering menjadi pembenaran, bahwa fraud (kecurangan) yang dilakukan tidak akan terdeteksi.	(Zulaikha dan Hadiprajitno, 2016)
	Ada persepsi bahwa menyiasati pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi.	
	Individu yang memiliki kemampuan seringkali berasumsi bahwa fraud (kecurangan) yang diperbuatnya minim risiko.	
	Perilaku mark up (menaikkan harga) dari harga sebenarnya adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.	

#### 3.4.5. Arogansi (*Arrogance*).

*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menyatakan bahwa 70 pct oknum *fraud* mempunyai identitas yang menampilkan gabungan desakan dengan arogansi dan ketamakan 89% permasalahan *fraud*. Arogansi merupakan sifat yang menunjukkan perasaan superior dan kurangnya kesadaran terhadap ketamakan dan pemikiran bahwa control internal perusahaan tidak dapat diterapkan pada mereka secara personal (Horwath, 2011; Yusof K *et al.*, 2015), Arogansi dalam analisis ini diukur dengan fakta CEO menganggap audit internal tidak berlaku baginya, CEO memiliki sifat kesewenangan, CEO memiliki kebiasaan memimpin

secara otoritatif. Adapun untuk indikator dan item pertanyaan variabel rasionalisasi seperti ditampilkan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Item Pertanyaan Variabel Arogansi**

Variabel	Item Pengukuran	Referensi
Arogansi ( <i>Arrogance</i> )	Sikap berkuasa atas segala sesuatu dalam pengadaan barang dan jasa.	(Albrecht <i>et al.</i> , 2014)
	Sikap percaya diri dengan superioritas dan senioritas sehingga merasa tidak ada pengawasan terhadap individu.	
	Individu yang beranggapan bahwa pengendalian internal dan peraturan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa tidak berlaku untuknya.	
	Perilaku pimpinan yang melanggar dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam mengatur pengadaan barang dan jasa.	

#### 3.4.6. Gender

Menurut Barón dan Cobb-Clark (2010) gender adalah gambaran diri yang menyangkutkan peran individu pria dan wanita. *Gender* dalam penelitian ini diukur dengan: Peran auditor laki-laki, Peran auditor perempuan dan Penunjukan auditor laki-laki dan auditor perempuan yang seimbang. Untuk mengukur *gender* dengan skor 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan.

#### 3.4.7. Pengalaman

Pengalaman adalah kegiatan riil yang sudah dilaksanakan oleh pegawai. Pengalaman pegawai merupakan pengetahuan yang diperoleh pegawai dimulai pendidikan formal atau dimulai pengalaman yang diperoleh semasa menjalankan tugas (Novita, 2019). Pengalaman dalam analisis ini diukur dengan: Lama kerja sebagai pegawai yang diukur dengan pengalaman kurang dari 6 tahun (<6 tahun) atau lebih dari 6 tahun (>6 tahun) .

#### 3.4.8. Hubungan Istimewa

Organisasi yang kerap menjalankan bisnis dengan pihak yang mempunyai ikatan istimewa mempunyai kecondongan untuk mempraktikkan *fraud* akuntansi. Bisnis dengan pihak yang mempunyai ikatan istimewa terjadi saat salah satu pihak

yang melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak yang lain. Hubungan istimewa dalam analisis ini diukur dengan: Penerapan prinsip kewajaran dan kebiasaan usaha, Pengungkapan proses transaksi *procurement* dalam laporan secara transparan dan Kewenangan dewan pengawas dan auditor internal independen melakukan penghitungan ulang laporan pelaksanaan *procurement* berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

### 3.5. Variabel Dependen

Variabel yang diuraikan atau terkena pengaruh dari variabel independen dinamakan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *procurement fraud*. Indikator yang dihitung dari variabel dependen *procurement fraud* adalah: penetapan nilai, penyimpangan penawaran (*bid rigging*), kecurangan spesifikasi, kecurangan tahap *procurement*, suap agar memperoleh kesepakatan, Suap agar memperoleh data privat *procurement*, konflik kepentingan.

**Tabel 3.6. Item Pertanyaan Variabel *Procurement Fraud***

Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
<b><i>Procurement Fraud</i></b>	Bapak/ Ibu Tim pengadaan barang dan jasa memiliki akses dalam penetapan harga yang dilakukan supplier (peserta lelang).	<i>Local Government Association, 2015</i>
	Ada kecenderungan terjadi kolusi di antara peserta lelang dengan Tim pengadaan barang dan jasa karena telah memiliki hubungan istimewa satu dengan yang lain.	
	Ada kecenderungan terjadi permainan harga dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.	
	Beberapa pembelian yang seharusnya dilakukan dengan proses lelang tidak dilakukan dengan prosedur yang seharusnya.	
	Tidak adanya kriteria seleksi, terbuka dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	
	Ada kecenderungan proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan sesuai dengan aturan untuk mendapatkan keuntungan.	

	Dalam proses pengadaan barang dan jasa akan muncul orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.	
--	--	--

### 3.6. Teknik Analisis Data

Mendapat informasi terkait yang ada dalam data tersebut dan memakai hasilnya untuk mencari jalan keluar masalah penelitian dapat dijalankan dengan analisa data (Ghozali dan Latan, 2015). Dua cara menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis deskriptif serta analisis kuantitatif. Untuk menganalisa deskripsi responden dan variabel digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan analisis kuantitatif. Dalam menjalankan teknik analisis data ini penulis memakai bantuan *software Smart-PLS* (Ghozali dan Latan, 2015).

### 3.7. Pengujian Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan guna mencari tahu kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang semestinya diukur (Ghozali dan Latan, 2015). Pengujian validitas akan dipraktikkan terhadap semua item pertanyaan yang ada pada setiap variabel dalam sebuah penelitian. Melalui uji validitas akan dilihat tingkat kevalidan setiap item pertanyaan dalam variabel penelitian. Dalam pengujian validitas, terapat dua tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu dengan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Dinyatakan oleh Fornell dan Larcker 1981, validitas *konvergen* bisa terpenuhi saat nilai *average variance expected* (AVE) melebihi 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga mempunyai nilai melebihi 0.5. Sementara syarat validitas diskriminan bisa terpenuhi apabila akar pangkat dua dari AVE untuk setiap variabel lebih besar dibanding korelasi terbesar antara variabel tersebut dengan variabel lainnya.

## Uji Reliabilitas

Kemantapan, ketepatan, dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan pengukuran diperlihatkan oleh reliabilitas. Dalam hal ini, reliabilitas bisa dipakai untuk memutuskan apakah instrumen bisa dipakai lebih dari satu kali paling tidak pada responden yang serupa hingga menciptakan data yang konsisten. Suatu angket bisa dikatakan reliabel apabila individu memberi tanggapan yang konsisten terhadap suatu pernyataan dan dari masa ke masa cenderung stabil. Memakai *composite reliability* pada penelitian ini, reliabilitas dapat dites dengan mengetahui nilai *Cronbach Alpha* > 0,70, namun dengan pendekatan eksplanatori nilai 0,6 masih bisa diterima (Ghozali dan Latan, 2015).

Untuk melakukan pengujian kuesioner dilakukan dengan pilot test yaitu mengambil sampel dengan ukuran yang kecil yaitu sebanyak 40 responden, untuk menguji validitas dan reliabilitas diawal, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan instrumen atau kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini.

### 3.7.1. Model Struktural (*Inner Model*)

Ghozali dan Latan (2015) menguraikan bahwa pengujian model struktural dilakukan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: (a) keterkaitan antar variabel; (b) nilai signifikansi; dan (c) nilai *r-square* dari model penelitian yang sudah dibangun dalam suatu penelitian.

### 3.7.2. Uji *R-Square* ( $R^2$ )

Uji *r-square* dipakai untuk mengetahui seberapa besar (presentase) variabel dependen dipengaruhi variabel independen. Lebih lanjut lagi Ghozali dan Latan (2015) menguraikan bahwa untuk meninjau sejumlah besar presentase variabel dependen dipengaruhi variabel independen, dengan meninjau besarnya koefisien determinasi *r-square* antara satu dan nol. Nilai *r-square* yang hampir dekat dengan angka satu akan menunjukkan kian besar pula presentase pengaruhnya.

### 3.7.3. Uji T-Statistik

Guna mengetes signifikansi konstanta dan setiap variabel independen yang ada di suatu persamaan apakah secara individu mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen dapat dijalankan dengan uji-t. Dilakukannya uji ini pada intinya untuk melihat hasil akhir (output) yang diperoleh melalui dukungan program aplikasi *PLS graph*. Ghozali dan Latan (2015) menguraikan bahwa jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, hipotesa yang telah diciptakan terdahulu bisa diterima atau dapat dibuktikan signifikan.

#### **3.7.4. Path Coefficient**

Ghozali dan Latan (2015) menguraikan suatu model analisis jalur yang secara teratur, dengan mencocokkan bermacam jalur yang dapat dipengaruhi antara variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung dan tidak langsung disebut dengan *path-coefficient*.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian berkenaan dengan tindakan *fraud* dalam upaya kontrol dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan konsep yang sudah dinyatakan terdahulu dan hasil pemrosesan data angket. Hasil penelitian ini akan menyajikan apakah hipotesis yang dikemukakan bisa diterima atau ditolak. Hasil penelitian yang disampaikan mencakup: 1) pemaparan responden melalui data angket yang dihimpun; 2) hasil penilaian model pengukuran (*outer model*) berwujud uji kualitas data (validitas dan reliabilitas); 3) hasil penilaian model struktural (*inner model*) berupa uji *collinearity* (*inner VIF values*), uji *coefficient determinant* (*r-square*), dan uji *significant* (*uji-t*).

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Bagian pengadaan dan bagian keuangan merupakan responden di penelitian ini. Jumlah responden yang tersangkutpaut di penelitian ini berjumlah 61 responden, 51 responden di posisi keuangan, 9 responden di posisi pengadaan, dan 1 responden memilih untuk tidak mengisi posisi di kuisisioner sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Data Responden berdasarkan Posisi**

Posisi	Jumlah Responden	Prosentase
Staff Keuangan	51	84%
Pengadaan	9	15%
-	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Mengenai teknik pembagian angket penelitian ini dijalankan melalui 2 cara yaitu membagikan angket *online* dengan memakai bantuan *Google Form* yang dibagikan melalui aplikasi *whatsapp* juga dengan secara langsung menyebarkan angket kepada responden. Tabel 4.2 menyajikan data penyebaran angket.

**Tabel 4.2. Data Penyebaran Kuisisioner**

	Jumlah	Prosentase
Kuisisioner penyebaran <i>hardfile</i>	23	38%
Kuisisioner penyebaran <i>google form</i>	38	62%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.2 menyajikan data responden yang mengisi kuisisioner *hardfile* sejumlah 23, dan responden yang mengisi kuisisioner *google form* sejumlah 38, sehingga jumlah total kuisisioner yang diolah sebanyak 61.

#### 4.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan jenis kelamin, responden pada penelitian ini paling banyak adalah laki-laki, dengan presentase 52% sedangkan responden perempuan sejumlah 48%. Hal ini dijelaskan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase
Laki-Laki	32	52%
Perempuan	29	48%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan *range* lama bekerja adalah 1-3 tahun dan lebih dari 6 tahun (>6 tahun) dengan persentase terbanyak sejumlah 38% , kemudian sisanya 3-6 tahun sejumlah 24%, dan kurang dari 1 tahun (<1 tahun) sebanyak 0%. Responden berdasarkan lama bekerja sebagaimana dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Data Responden Berdasar Lama Bekerja**

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Prosentase
<1 tahun	0	0%
1 – 3 tahun	23	38%
3 – 6 tahun	15	24%
>6 tahun	23	38%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pengalaman bekerja adalah 1 – 3 tahun dengan persentase terbanyak sejumlah 47%, kemudian lebih dari 6 tahun (>6 tahun) sebanyak 28%, kemudian 3 – 6 tahun sejumlah 20%, lalu terakhir kurang dari 1 tahun (<1 tahun) sebanyak 5%. Responden berdasarkan pengalaman bekerja sebagaimana dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Data Responden Berdasar Pengalaman Bekerja**

Pengalaman Bekerja	Jumlah Responden	Prosentase
<1 tahun	3	5%
1 – 3 tahun	29	47%
3 – 6 tahun	12	20%
>6 tahun	17	28%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Sedangkan berdasar hubungan istimewa, sebanyak 39% responden menyatakan bahwa ada hubungan istimewa, 61% menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa, hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4 6. Data Responden Berdasar Hubungan Istimewa**

Hubungan Istimewa	Jumlah Responden	Prosentase
Ada hubungan istimewa	23	39%
Tidak ada hubungan istimewa	38	61%
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah, 2022

#### 4.2.1 Hasil Pengujian Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas Konvergen

Pengujian *validitas konvergen* di penelitian ini memakai ukuran *loading* faktor dengan menunjukkan nilai *item loading* dan nilai *Average Variance Expected* (AVE), ditunjukkan pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Perbandingan Nilai Item Loading dan Nilai AVE Awal dan Akhir**

Variabel	Kode	Nilai item awal		Nilai item akhir	
		<i>Loading</i>	<i>AVE</i>	<i>Loading</i>	<i>AVE</i>
Tekanan (X1)	X1_1	0.897	<b>0.754</b>	0.891	<b>0.754</b>
	X1_2	0.871		0.864	
	X1_3	0.800		0.809	
	X1_4	0.903		0.905	
Kesempatan (X2)	X2_1	0.772	<b>0.685</b>	0.769	<b>0.684</b>
	X2_2	0.893		0.891	
	X2_3	0.875		0.873	
	X2_4	0.761		0.768	
Rasionalisasi (X3)	X3_1	0.725	<b>0.576</b>	0.730	<b>0.622</b>
	X3_2	0.836		0.860	
	X3_3	0.734		0.753	
	X3_4	0.675		-	
	X3_5	0.812		0.806	
Kemampuan (X4)	X4_1	0.896	<b>0.759</b>	0.897	<b>0.813</b>
	X4_2	0.798		0.799	
	X4_3	0.879		0.877	
	X4_4	0.907		0.908	
Arogansi (X5)	X5_1	0.868	<b>0.813</b>	0.867	<b>0.622</b>
	X5_2	0.947		0.947	
	X5_3	0.915		0.914	
	X5_4	0.874		0.875	
Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	Y_1	0.763	<b>0.726</b>	0.735	<b>0.788</b>
	Y_2	0.897		0.915	
	Y_3	0.888		0.916	
	Y_4	0.924		0.920	
	Y_5	0.891		0.886	
	Y_6	0.926		0.938	
	Y_7	0.634		-	

Sumber: Data diolah, 2022

Untuk pengujian *validitas konvergen* Fornell dan Larcker (1981) menyarankan nilai *AVE* harus melebihi dari 0.5 yang berarti bahwa 50% atau lebih varian dari indikator

bisa diuraikan. Ketika pemrosesan data pertama ada nilai loading dibawah 0.7 yakni item pertanyaan X3\_4 dengan nilai loading 0.675 dan Y\_7 dengan nilai *loading* 0.634. Lalu item pertanyaan tersebut dikeluarkan, syarat sudah dipenuhi oleh semua nilai *loading* dan AVE. Semua variabel condong lebih stabil dan mencukupi syarat nilai *loading*, AVE dan *cross loading correlation*.

## 2. Uji Validitas Discriminant

Pengujian *validitas discriminant* ini lebih menegaskan *construct* yang lain semestinya tidak ada korelasinya. Untuk menguji *validitas discriminant*, kerap memakai nilai *cross loading correlation* untuk setiap variabel harus melebihi 0.50 dan membandingkan nilai setiap *Fornell-Larcker Criterion construct*. Tabel 4.8 menunjukkan nilai *cross loading*.

**Tabel 4.8. Nilai Cross Loading**

	Tekanan (X1)	Kesempatan (X2)	Rasionalisasi (X3)	Kemampuan (X4)	Arogansi (X5)	<i>Fraud</i> (Y)
X1_1	<b>0.884</b>	0.654	0.658	0.508	0.617	0.603
X1_2	<b>0.856</b>	0.643	0.693	0.548	0.691	0.634
X1_3	<b>0.818</b>	0.700	0.652	0.794	0.609	0.789
X1_4	<b>0.909</b>	0.734	0.649	0.721	0.672	0.737
X2_1	0.619	<b>0.769</b>	0.467	0.391	0.433	0.525
X2_2	0.705	<b>0.888</b>	0.553	0.456	0.478	0.596
X2_3	0.634	<b>0.870</b>	0.618	0.452	0.516	0.623
X2_4	0.654	<b>0.772</b>	0.613	0.649	0.627	0.707
X3_2	0.754	0.656	<b>0.938</b>	0.830	0.831	0.818
X3_5	0.584	0.563	<b>0.838</b>	0.535	0.550	0.519
X4_1	0.679	0.495	0.713	<b>0.924</b>	0.675	0.741
X4_3	0.679	0.538	0.783	<b>0.908</b>	0.824	0.796
X4_4	0.706	0.605	0.671	<b>0.894</b>	0.618	0.793
X5_1	0.619	0.522	0.662	0.581	<b>0.867</b>	0.582
X5_2	0.720	0.613	0.827	0.775	<b>0.947</b>	0.772

X5_3	0.601	0.538	0.686	0.695	<b>0.914</b>	0.689
X5_4	0.738	0.593	0.704	0.728	<b>0.875</b>	0.783
Y_2	0.711	0.659	0.749	0.850	0.714	<b>0.925</b>
Y_3	0.755	0.679	0.718	0.834	0.696	<b>0.938</b>
Y_4	0.708	0.659	0.700	0.770	0.794	<b>0.926</b>
Y_5	0.764	0.744	0.696	0.659	0.654	<b>0.865</b>
Y_6	0.772	0.728	0.732	0.822	0.789	<b>0.952</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai *cross loading* memperlihatkan besarnya korelasi antara setiap *construct* dengan indikatornya dan indikator dari *construct* blok lainnya. *Discriminant validity* baik dalam suatu model jika korelasi antara *construct* dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan *construct* lainnya. Tabel 4.9 menyajikan data nilai korelasi antar variabel.

**Tabel 4.9. Nilai korelasi antar variabel**

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Tekanan (X1)	<b>0.867</b>					
Kesempatan (X2)	0.793	<b>0.827</b>				
Rasionalisasi (X3)	0.765	0.689	<b>0.890</b>			
Kemampuan (X4)	0.758	0.603	0.795	<b>0.909</b>		
Arogansi (X5)	0.748	0.632	0.803	0.778	<b>0.901</b>	
Tekanan (Y)	0.808	0.751	0.780	0.856	0.792	<b>0.922</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.9 memperlihatkan rata-rata nilai *construct* setiap variabel dengan variabel itu sendiri melebihi 0.70. Nilai korelasi untuk setiap variabel dengan variabel itu sendiri mempunyai nilai yang lebih besar jika dibandingkan pada korelasi variabel lainnya. Hal ini artinya semua variabel di penelitian ini telah mencukupi uji *validitas discriminant*.

#### 4.2.2 Hasil Uji *Reliabilitas Data*

**Tabel 4.10. Nilai Composite Reliability**

Variabel	Composite Reliability
Tekanan (X1)	0.924
Kesempatan (X2)	0.896
Rasionalisasi (X3)	0.883
Kemampuan (X4)	0.934
Arogansi (X5)	0.945
Tekanan (Y)	0.965

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai *composite reliability* dipakai untuk pengujian *reliabilitas*. Variabel bisa disebut *reliabel* jika nilai *composite reliability* melebihi 0.7. Dari hasil pemrosesan data, nilai *composite reliability* melebihi 0.7 sehingga bisa disebut bahwa seluruh variabel yang dipakai *reliabel*.

#### 4.3 Hasil Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

##### 4.3.1 Hasil Uji *Collinearity (Inner VIF Values)*

Apabila pengujian *outer* model dan semua variabel sudah dilaksanakan dan telah mencukupi syarat, setelahnya adalah melaksanakan uji *inner* model. Pada Tabel 4.11 akan ditampilkan tabel uji *collinearity (Inner VIF Values)*.

**Tabel 4.11. Hasil Uji *Collinearity (Inner VIF Values)***

	Y
X1	4.328
X2	2.860
X3	4.037
X4	3.542
X5	3.501

Sumber: Data diolah, 2022

*Collinearity* digambarkan untuk *korelasi* antara variabel laten dalam sebuah model. Kemampuan prediksinya tidak akurat dan tidak stabil. Tingginya kolinearitas bisa berakibat kekeliruan pada penilaian signifikansi. Jika  $VIF > 5$ , terjadilah *collinearity*. Apabila hal tersebut dijumpai, maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model pengukuran. Jika dikaitkan pada tabel 4.11, tidak ada

variabel yang melebihi angka 5. *Range* nilai variabel ada pada posisi 1 hingga 4 hingga bisa disebut seluruh variabel yang dipakai stabil.

#### 4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinan (R-Square)

**Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinan (R-Square)**

	R Square
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	0.834

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel 4.12 bisa diperhatikan bahwa variabel *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Y) mempunyai nilai *R-Square* sebesar 0.834, artinya variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi berpengaruh pada variabel *fraud* pengadaan barang dan jasa secara simultan sebesar 83.4 % dan sisanya 16.6% dipengaruhi oleh variabel lain.

#### 4.3.3 Hasil Uji Signifikansi (Uji-t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dijalankan dengan memperhatikan nilai *T-Statistic* dan nilai *P-Values* dengan melihat *original sample* tiap-tiap variabel. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13. Hasil Uji Signifikansi (Uji-t)**

Hipotesis	Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>T-statistic</i>	<i>P-values</i>	Hasil
H1	X1 → Y	0.094	0.859	0.391	Ditolak
H2	X2 → Y	0.282	2.527	0.012	Diterima
H3	X3 → Y	-0.020	0.163	0.870	Ditolak
H4	X4 → Y	0.495	5.386	0.000	Diterima
H5	X5 → Y	0.175	1.337	0.182	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2022

Hipotesis dikatakan bisa diterima apabila nilai *T-Statistics* lebih besar dari nilai *T-Value* 1,96 (Alpha 5 %) dan untuk nilai *P-Values*<0,05 dengan melihat nilai *original sample*. Berdasarkan tabel 4.13 dilihat bahwa ada 2 hipotesis yang diterima

atau didukung oleh data, sedangkan ada 3 hipotesis yang tidak diterima yakni H1, H3, H5.

### Efek Pemoderasi melalui Analisis *Multigrup*

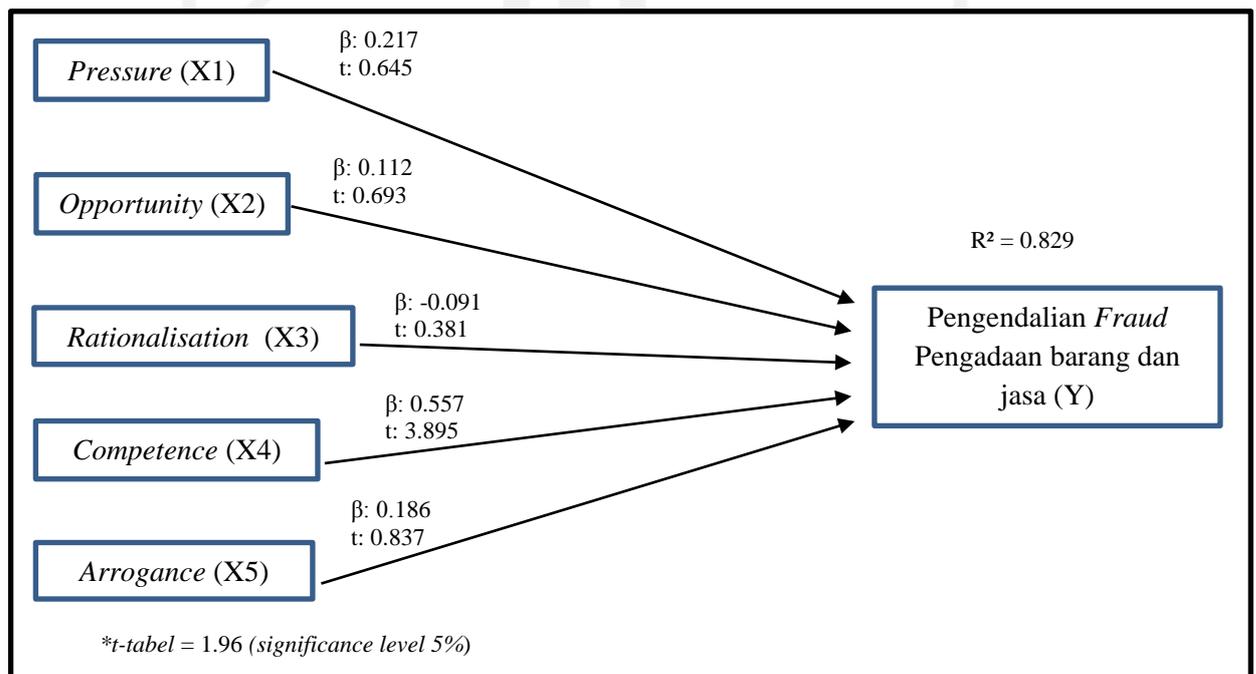
Selanjutnya penelitian ini menguji keterkaitan moderasi *gender*, pengalaman, dan hubungan istimewa. Untuk menguji pengaruh signifikan dari pengaruh moderasi diuji dengan analisis *multigrup*. Keterkaitan antar *construct* dengan subgrup *gender* ditunjukkan pada Tabel 4.14.

**Tabel 4.14. Hubungan antar *Construct* dengan Subgrup *Gender***

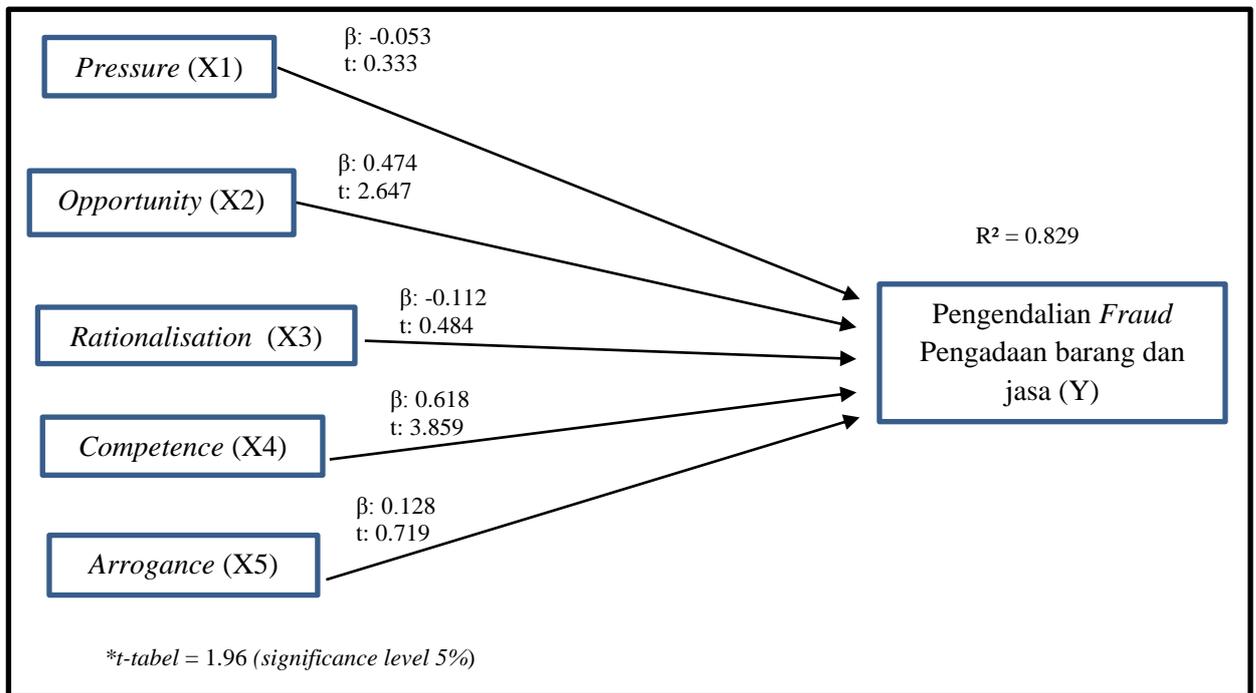
Path	Laki - Laki			Perempuan		
	$\beta$	<i>t-value</i>	Hasil	$\beta$	<i>t-value</i>	Hasil
X1 → Y	0.217	0.998	TS	-0.053	0.333	TS
X2 → Y	0.112	0.693	TS	0.474	2.647*	S
X3 → Y	-0.091	0.381	TS	-0.112	0.484	TS
X4 → Y	0.577	3.895*	S	0.618	3.895*	S
X5 → Y	0.186	0.837	TS	0.128	0.719	TS

\**t*-tabel 1.96 (*significance level* 5%)

Keterangan; S=Signifikan, TS=Tidak Signifikan



**Gambar 2.5 Kerangka Model *Path* dengan Grup *Gender* Laki-Laki**



**Gambar 2.6 Kerangka Model *Path* dengan Grup *Gender* Perempuan**

Gambar 2.6 diatas, menunjukkan keterkaitan antara tekanan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara laki-laki ( $\beta = 0.217$  dan  $t\text{-value}$  0.998) maupun perempuan ( $\beta = -0.053$  dan  $t\text{-value}$  0.333). Pada hubungan kesempatan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara laki-laki ( $\beta = 0.112$  dan  $t\text{-value}$  0.693), tetapi ditemukan signifikan terhadap perempuan ( $\beta = 0.474$  dan  $t\text{-value}$  2.647). Pada hubungan rasionalisasi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara laki-laki ( $\beta = -0.091$  dan  $t\text{-value}$  0.381) maupun perempuan ( $\beta = -0.112$  dan  $t\text{-value}$  0.484). Sedangkan pada hubungan kompetensi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan signifikan antara laki-laki ( $\beta = 0.577$  dan  $t\text{-value}$  3.895) maupun perempuan ( $\beta = 0.618$  dan  $t\text{-value}$  3.859). Terakhir pada hubungan arogansi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara laki-laki ( $\beta = 0.186$  dan  $t\text{-value}$  0.837) maupun perempuan ( $\beta = 0.128$  dan  $t\text{-value}$  0.719).

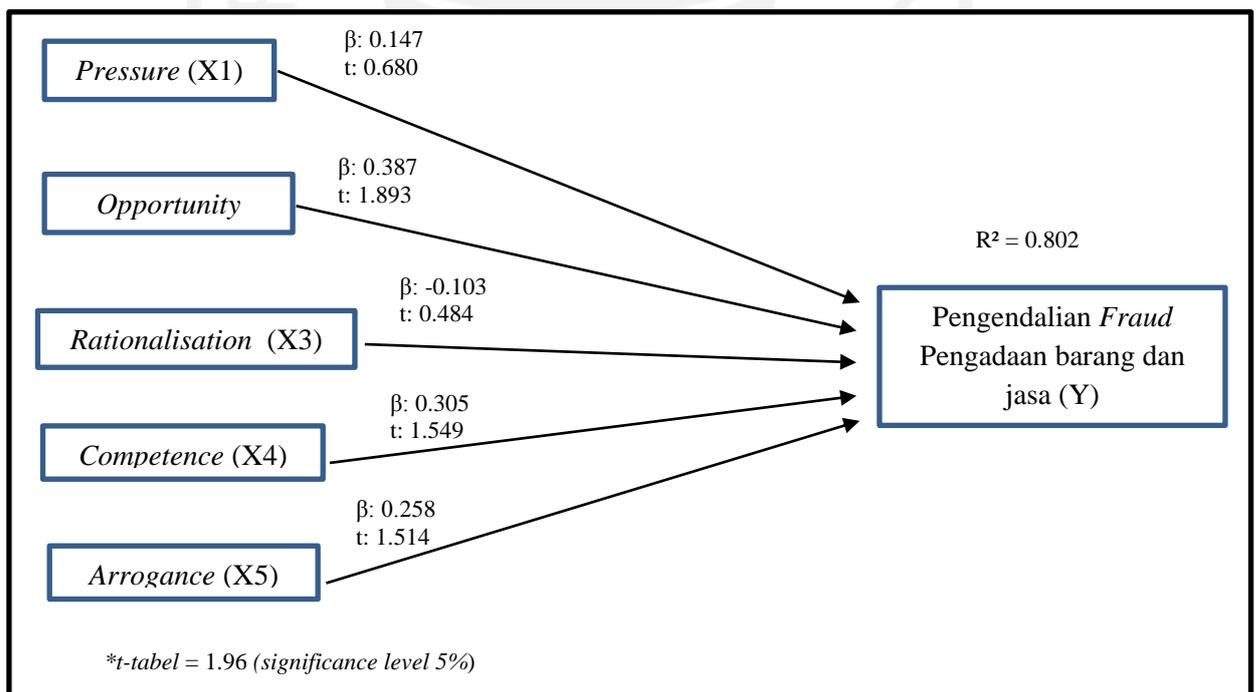
Keterkaitan antar *construct* dengan subgrup pengalaman ditunjukkan pada tabel 4.15 berikut:

**Tabel 4.15. Hubungan antar *Construct* dengan Subgrup Pengalaman**

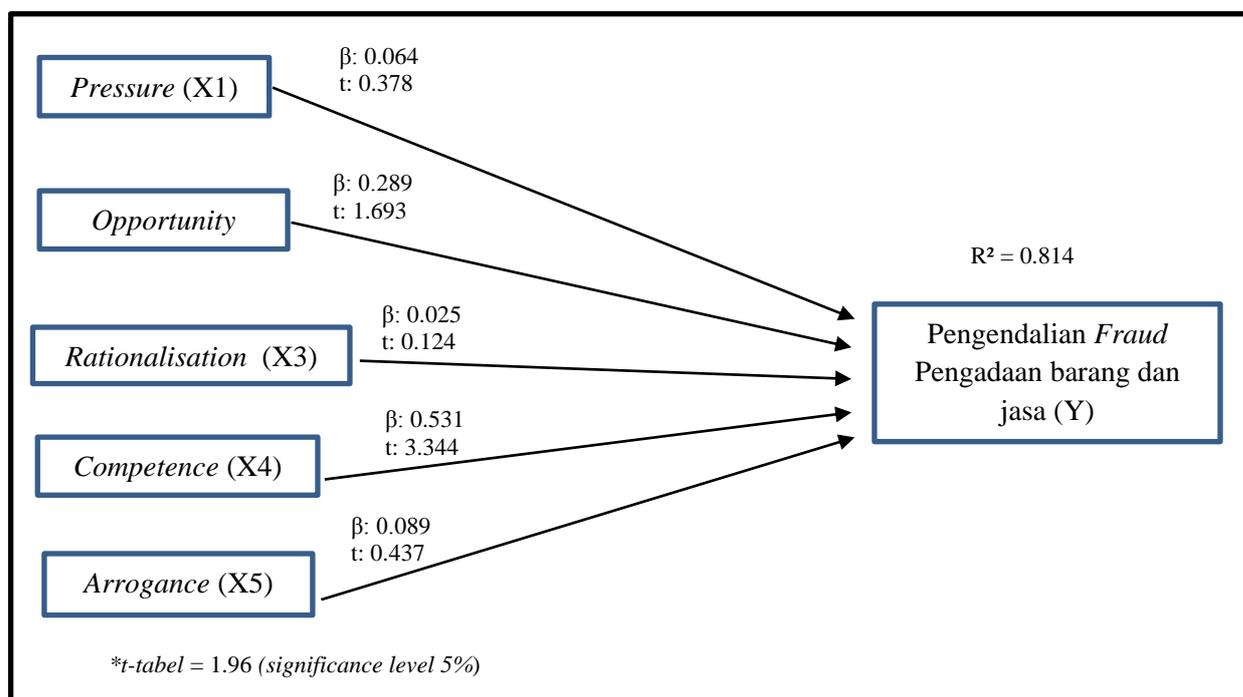
Path	Ada Pengalaman			Tidak Ada Pengalaman		
	$\beta$	t-value	Hasil	$\beta$	t-value	Hasil
X1 → Y	0.147	0.680	TS	0.067	0.378	TS
X2 → Y	0.387	1.893	TS	0.289	1.693	TS
X3 → Y	-0.103	0.484	TS	0.025	0.124	TS
X4 → Y	0.305	1.549	TS	0.531	3.344*	S
X5 → Y	0.258	1.514	TS	0.089	0.437	TS

\*t-tabel 1.96 (significance level 5%)

Keterangan; S=Signifikan, TS=Tidak Signifikan



**Gambar 2.7 Kerangka Model Path dengan Grup Ada Pengalaman**



**Gambar 2.8 Kerangka Model Path dengan Grup Tidak Ada Pengalaman**

Gambar 2.8 di atas, menunjukkan keterkaitan antara tekanan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang berpengalaman ( $\beta = 0.147$  dan  $t$ -value 0.680) maupun yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.064$  dan  $t$ -value 0.378). Pada hubungan kesempatan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang berpengalaman ( $\beta = 0.387$  dan  $t$ -value 1.893), maupun yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.289$  dan  $t$ -value 1.693). Pada hubungan rasionalisasi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang berpengalaman ( $\beta = -0.103$  dan  $t$ -value 0.484) maupun yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.025$  dan  $t$ -value 0.124). Sedangkan pada hubungan kompetensi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang berpengalaman ( $\beta = 0.305$  dan  $t$ -value 1.549), tetapi ditemukan signifikan pada yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.531$  dan  $t$ -value 3.344). Terakhir pada hubungan arogansi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan

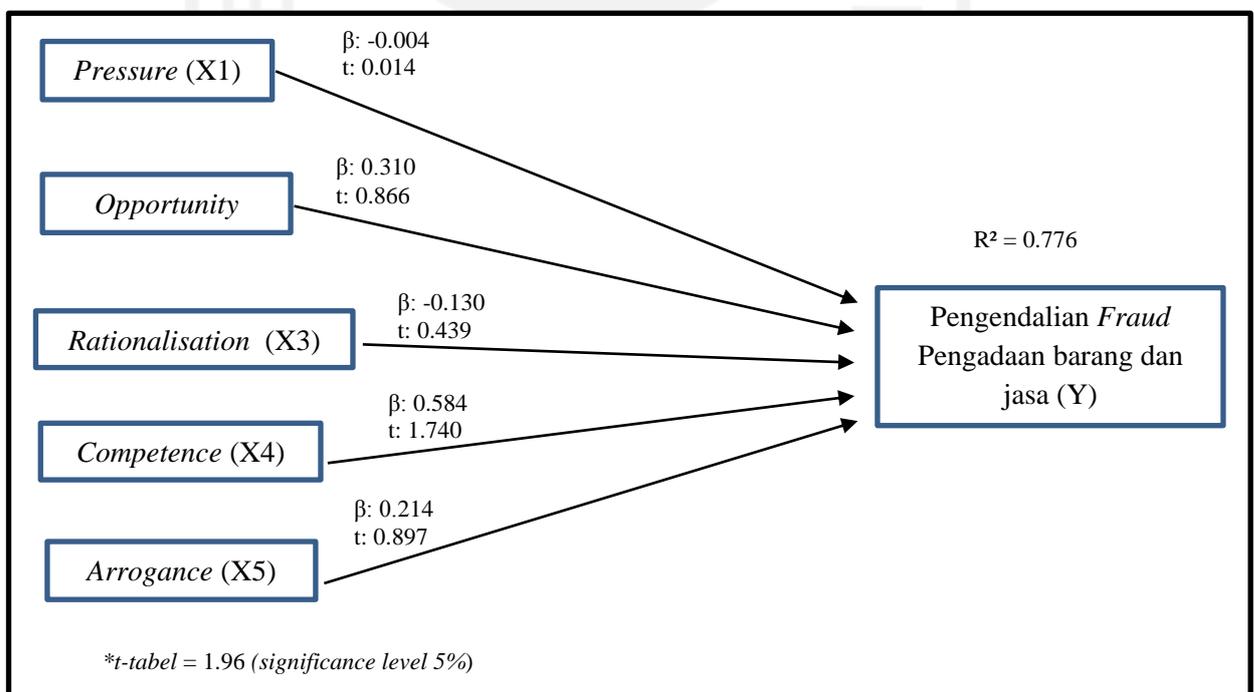
jasa ditemukan tidak signifikan antara yang berpengalaman ( $\beta = 0.258$  dan  $t\text{-value}$  1.514) maupun yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.089$  dan  $t\text{-value}$  0.437).

Hubungan antar *construct* dengan subgrup hubungan istimewa disajikan pada tabel 4.16 berikut:

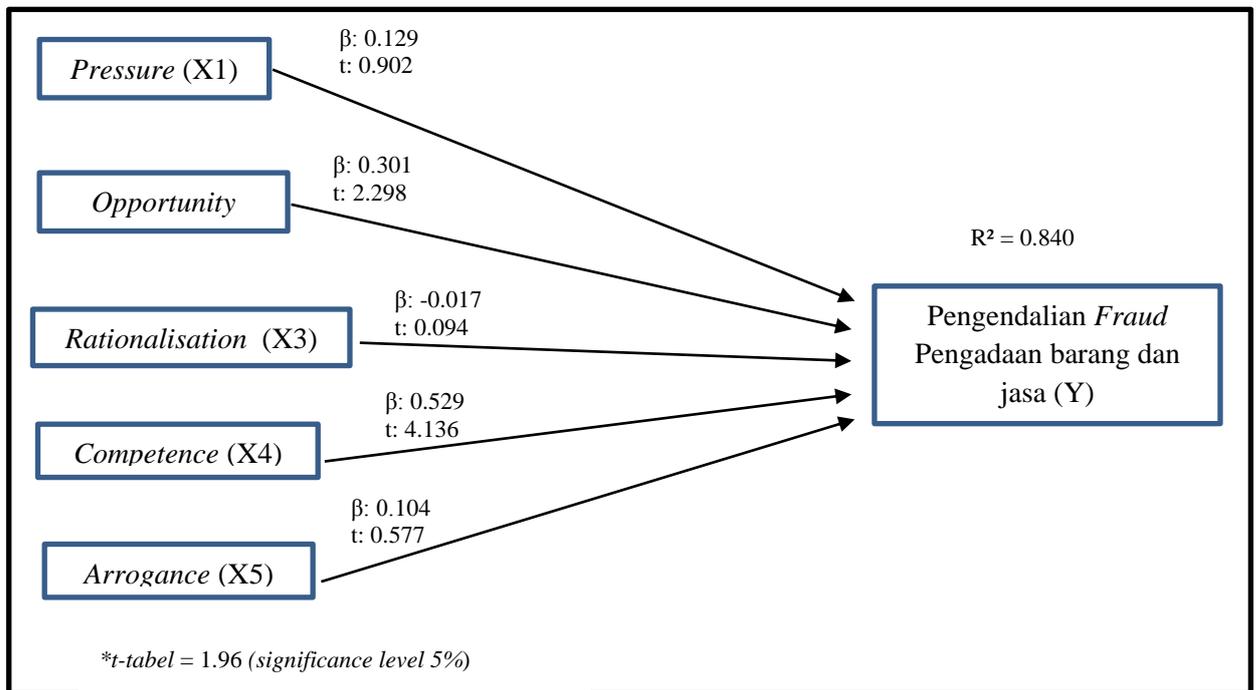
**Tabel 4.16. Hubungan antar *Construct* dengan Subgrup Hubungan Istimewa**

Path	Ada Hubungan Istimewa			Tidak Ada Hubungan		
	$\beta$	$t\text{-value}$	Hasil	$\beta$	$t\text{-value}$	Hasil
X1 → Y	-0.004	0.014	TS	0.129	0.902	TS
X2 → Y	0.310	0.866	TS	0.301	2.298*	S
X3 → Y	-0.130	0.439	TS	-0.017	0.094	TS
X4 → Y	0.584	1.740	TS	0.529	4.136*	S
X5 → Y	0.214	0.897	TS	0.104	0.577	TS

\* $t\text{-tabel}$  1.96 (significance level 5%)  
Keterangan; S=Signifikan, TS=Tidak Signifikan



**Gambar 2. 9 Kerangka Model *Path* dengan Grup Ada Hubungan Istimewa**



**Gambar 2.10 Kerangka Model *Path* dengan Grup Tidak Ada Hubungan Istimewa**

Pada gambar di atas, menunjukkan keterkaitan antara tekanan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = -0.004$  dan *t-value* 0.214) maupun yang tidak mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.129$  dan *t-value* 0.902). Pada hubungan kesempatan dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.310$  dan *t-value* 0.866), tetapi signifikan yang tidak mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.301$  dan *t-value* 2.298). Pada hubungan rasionalisasi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = -0.130$  dan *t-value* 0.439) maupun yang tidak mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = -0.017$  dan *t-value* 0.094). Sedangkan pada hubungan kompetensi dengan pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.584$  dan *t-value* 1.740), tetapi ditemukan signifikan pada yang tidak berpengalaman ( $\beta = 0.529$  dan *t-value* 4.136). Terakhir pada hubungan arogansi dengan pengendalian

*fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ditemukan tidak signifikan antara yang mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.214$  dan *t-value* 0.897) maupun yang tidak mempunyai hubungan istimewa ( $\beta = 0.104$  dan *t-value* 0.577).

#### 4.3.4 Keterkaitan Subgrup *Path*

Ghozali dan Latan (2015) menyatakan bahwa jika data grup sampel yang dipakai tidak normal atau ada varian kedua grup berlainan, maka guna mencari jumlah *t*-statistik bisa memakai *smith satterwait test*. Pengujian efek moderasi *gender*, pengalaman, dan hubungan istimewa bisa memakai *smith satterwait test*, untuk mengukur uji-*t* yang dihimpun yakni dengan *standard error bootstrap* subgrup laki-laki dan perempuan sebagai moderator yang ditampilkan dengan memisahkan data pada subgrup sampel. Demikian juga untuk grup pengalaman dan hubungan istimewa. *Path Coefficients* dan *Standard Error* tiap- tiap subsampel yang sudah dihitung lalu dibandingkan dan diuji signifikannya. Nilai *t*-statistik yang sudah disebutkan bisa dihitung dengan memakai *smith satterwait test* dengan memakai rumus:

$$t = \frac{\text{Path sample}_1 - \text{Path sample}_2}{\sqrt{S.E.^2 \text{ sample}_1 + S.E.^2 \text{ sample}_2}}$$

Keterangan:

*Path sample 1* : koefisien jalur untuk kelompok 1\*

*Path sample 2* : koefisien jalur untuk kelompok 2\*\*

*S.E. sample 1* : nilai standar eror koefisien kelompok 1\*

*S.E. sample 2* : nilai standar eror koefisien kelompok 2\*\*

**Tabel 4.17. Hasil Uji *Pooled Error* oleh subgrup *Gender***

<i>Path</i>	Laki - Laki		Perempuan		Statistik
	$\beta$	<i>Standard Error</i>	$\beta$	<i>Standard Error</i>	
X1 → Y	0.217	0.213	-0.053	0.151	0.854
X2 → Y	0.112	0.156	0.474	0.167	-1.549
X3 → Y	-0.091	0.232	-0.112	0.232	0.064
X4 → Y	0.577	0.158	0.618	0.156	-0.184
X5 → Y	0.186	0.204	0.128	0.185	0.210

\*t-tabel 1.96 (*significance level* 5%)

Tabel 4.17 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t tidak ada dampak signifikan dari *gender* pada hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalitas, kemampuan, arogansi dan upaya pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 4.18. Hasil Uji *Pooled Error* oleh subgrup *Pengalaman***

<i>Path</i>	Ada Pengalaman		Tidak Ada Pengalaman		Statistik
	$\beta$	<i>Standard Error</i>	$\beta$	<i>Standard Error</i>	
X1 → Y	0.147	0.214	0.064	0.169	0.304
X2 → Y	0.387	0.216	0.289	0.170	0.356
X3 → Y	-0.103	0.215	0.025	0.200	-0.435
X4 → Y	0.355	0.229	0.531	0.154	0.728
X5 → Y	0.258	0.170	0.089	0.205	0.634

\*t-tabel 1.96 (*significance level* 5%)

Tabel 4.18 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t tidak ada dampak signifikan dari pengalaman pada hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalitas, kemampuan, arogansi dan upaya pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 4.19. Hasil Uji *Pooled Error* oleh subgrup Hubungan Istimewa**

<i>Path</i>	Ada Hubungan Istimewa		Tidak Ada Hubungan		Statistik
	$\beta$	<i>Standard Error</i>	$\beta$	<i>Standard Error</i>	
X1 → Y	-0.004	0.318	0.129	0.136	-0.384
X2 → Y	0.310	0.367	0.301	0.127	0.023
X3 → Y	-0.130	0.290	-0.017	0.178	-0.332
X4 → Y	0.504	0.317	0.529	0.124	-0.073
X5 → Y	0.214	0.253	0.104	0.176	0.356

\*t-tabel 1.96 (significance level 5%)

Tabel 4.19 menunjukkan nilai-nilai dari uji-t tidak ada dampak signifikan dari hubungan istimewa pada hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalitas, kemampuan, arogansi dan upaya pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Tekanan tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah didapat, dapat dipahami bahwa pengaruh tekanan terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai statistik sebesar 0.859 atau kurang dari 1.96 (alpha 5%) dengan *P-Values* sebesar 0.391 atau melebihi 0,05 dan *original sample* positif 0.094. Dengan nilai tersebut bisa dinyatakan bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa **ditolak**.

Hal ini seiring dengan Siswanto (2020) dan Zahara (2017) yang menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Tekanan adalah dorongan yang muncul dari individu karyawan untuk melaksanakan tindakan *fraud* dan menyeleweng disebabkan adanya *pressure*. Sebagian pelaku *fraud* melaksanakan perilaku kecurangan bukan karena adan tekanan ekonomi ataupun kesempatan melainkan lazimnya para pelaku berpendapat apa yang dijalankannya adalah hal

yang lazim dan tidak bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan hingga kecurangan sering berlangsung. Ada dan tidaknya tambahan upah juga tidak berpengaruh terhadap *fraud*, karena para pejabat pengadaan bekerja tidak hanyadalam waktu lama seperti menaikkan kompetensi, ilmu, keahlian, dan memperluas pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa (Finalia Fitri dan Nadirsyah, 2020).

Implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan atasan atau pimpinan yang terkait tetap mempertahankan untuk memberi penghargaan terhadap hasil kerja bagian pengadaan barang dan jasa, menumbuhkan rasa keadilan dalam beban pekerjaan dan tidak memberikan arahan untuk memanipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dokumen pakta integritas sangat diperlukan dalam menjamin komitmen dari pegawai agar melakukan semua tugas, fungsi, tanggung jawab, otoritas dan peran sesuai dengan kebijakan.

#### **4.4.2 Kesempatan berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah didapat, dapat dipahami bahwa pengaruh kesempatan terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai statistik sebesar 2.448 atau melebihi 1.96 (alpha 5%) dengan *P-Values* sebesar 0.012 atau kurang dari 0,05 dan *original sample* positif 0.282. Nilai tersebut bisa dinyatakan bahwa hipotesis kedua yang menguraikan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa **diterima**.

Hal ini seiring dengan Agustina dan Pratomo (2019) dan Zahara (2017) yang menjelaskan bahwa kesempatan berpengaruh terhadap *fraud*. Makin tinggi kesempatan pada suatu organisasi, maka semakin tinggi kesempatan terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut. Peluang yang mengakibatkan pelaku bebas bisa melakukan tindakannya yang disebabkan oleh kontrol internal yang tidak kuat, ketidak disiplin, ketidak mampuan dalam mengakses data, tidak ada standar

audit, dan sikap tak acuh. Hasil ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Creassey, bahwa oknum *fraud* kerap mempunyai ilmu dan peluang untuk mempraktikkan perilaku tersebut agar perilaku itu tidak bisa terlacak.

Implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan atasan atau pimpinan yang terkait terus mengembangkan dan menyinkronkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem komputerisasi sehingga memudahkan akses untuk melakukan evaluasi pada sistem pengadaan barang dan jasa.

Membangun susunan kontrol internal yang baik, mengefesienkan kegiatan kontrol, menaikkan budaya organisasi dan mengefektifkan kegunaan internal audit agar tidak ada kesempatan untuk melakukan *fraud*.

#### **4.4.3 Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah didapat, dapat dipahami bahwa pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai statistik sebesar 0.163 atau kurang dari 1.96 (alpha 5%) dengan *P-Values* sebesar 0.870 atau melebihi 0,05 dan *original sample* negatif -0.020. Nilai tersebut bisa dinyatakan bahwa hipotesis ketiga yang menguraikan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa **ditolak**.

Hal ini sejalan dengan Fitri dan Nadirsyah (2019) dan Susandra dan Hartina (2017) yang menguraikan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Akal pikiran yang menjustifikasi perilakunya sebagai tindakan yang biasa, yang secara nilai etik bisa diterima dalam publik disebut rasionalisasi. Oknum *fraud* sering berupaya untuk mencari alasan guna mewajarkan tindakannya. Ini dilakukan guna mendamaikan emosi pelaku sampai tidak memunculkan kekhawatiran dalam dirinya. Pada penelitian ini ditemukan sebaliknya, maka hal ini menunjukkan bahwa integritas dan moralitas serta perilaku etis pegawai yang masih sangat baik.

Implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan atasan atau pimpinan yang terkait tetap mempertahankan untuk memberi arahan yang tepat untuk menjadi acuan

dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, para *stakeholder* tetap mematuhi aturan etis dalam aktifitas pengadaan barang dan jasa, dan pemberian sanksi kepada pelaku yang berindikasi tidak berperilaku etis.

#### **4.4.4 Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah didapat, dapat dipahami bahwa pengaruh kompetensi terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai statistik sebesar 5.386 atau melebihi 1.96 (alpha 5%) dengan *P-Values* sebesar 0.000 atau kurang dari 0,05 dan *original sample* positif 0.495. Nilai tersebut bisa dinyatakan bahwa hipotesis keempat yang menguraikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa **diterima**.

Hal ini sejalan dengan Fitri dan Nadirsyah (2019) dan Wijayanto (2020) yang menguraikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Tingginya kedudukan individu di organisasi akan memberikan kemudahan baginya untuk melaksanakan *fraud* dan risiko terlacak juga kian kecil. Lalu kepandaian pelaku dalam menganalisis sistem pengendalian internal, bisa memudahkan pelaku untuk mengetahui bagian mana dari sistem pengendalian internal yang dapat diselewengkan. Karenanya, penelitian ini memberi hasil bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa, yang artinya semakin besar kecakapan individu maka kian besar *fraud* yang dapat berlangsung. Implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan para pegawai yang terkait mengurangi sikap percaya diri dengan kemampuan dan meyakini bahwa *fraud* yang dilakukan tidak akan terdeteksi. Untuk *stakeholder* harus bisa memilih ketika *recruitment* agar tahapan pengadaan barang dan jasa dapat dijalankan oleh pegawai yang benar-benar paham akan kemampuannya dan tidak akan merugikan instansi. Pelatihan pegawai juga dapat menaikkan kompetensi, kecakapan, keterampilan dan komitmen sehingga pegawai tetap melaksanakan kebijakan yang sudah ada dengan baik.

#### **4.4.5 Arogansi tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah didapat, diketahui bahwa pengaruh arogansi terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa mempunyai nilai statistik sebesar 1.337 atau kurang dari 1.96 (alpha 5%) dengan *P-Values* sebesar 0.182 atau melebihi 0,05 dan *original sample* positif 0.175. Nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima yang menguraikan bahwa arogansi berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa **ditolak**.

Hal ini seiring dengan Febriana (2016) dan Muhsin *et al.* (2018) yang menguraikan bahwa arogansi tidak mempunyai pengaruh terhadap *fraud*. Tindakan merasa superior dan merasa mempunyai hak atau ketamakan sebagai bagian dari individu yang yakin kontrol internal tidak berlaku terhadap dia disebut dengan arogansi. Konteks penelitian yang beda dengan penelitian terdahulu membuat arogansi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengendalian. Penelitian terdahulu oleh Febriana (2016) memakai kecurangan akademik sebagai objek penelitian. Lalu, responden tidak mempunyai rasa arogansi yang tinggi juga membuat arogansi tidak mempunyai pengaruh, hal ini ditunjukkan dari respon yang tidak cukup setuju dengan pernyataan yang diberikan.

Implikasi praktis dalam penelitian ini diharapkan atasan atau pimpinan yang terkait tetap mempertahankan tidak menunjukkan sikap berkuasa atas segala sesuatu dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga para *stakeholder* tidak beranggapan bahwa kontrol internal dan kebijakan yang ada tidak berlaku untuknya.

#### **4.4.6 Gender, Pengalaman dan Hubungan Istimewa tidak memoderasi terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa**

Seperti disebutkan pada Tabel 4.17, Tabel 4.18, dan Tabel 4.19, temuan efek moderasi dari *gender*, pengalaman dan hubungan istimewa. Adapun rangkuman dari pengujian hipotesis faktor moderasi ditunjukkan pada Tabel 4.20.

**Tabel 4.20. Ringkasan dari Pengujian Hipotesis dengan Faktor Moderasi**

Hipotesis	Berdasarkan $\beta$ dan $t$ -value	Hasil
Moderasi <i>Gender</i> berpengaruh positif terhadap pengendalian <i>fraud</i>	Tidak ada hubungan signifikan	Tidak didukung
Moderasi Pengalaman berpengaruh positif terhadap pengendalian <i>fraud</i>	Tidak ada hubungan signifikan	Tidak didukung
Moderasi Hubungan Istimewa berpengaruh positif terhadap pengendalian <i>fraud</i>	Tidak ada hubungan signifikan	Tidak didukung

Sumber: Data diolah, 2022

Aspek yang paling menonjol dan berpengaruh dari data diri individu adalah *gender*. Penampilan, keinginan, kegiatan, pertemanan, gaya interpersonal, hubungan romantis, dan keputusan karier individu dipengaruhi oleh *gender*. Menurut pendekatan biologis, psikologis dan perilaku perbedaan *gender* disebabkan oleh perbedaan biologis antara pria dan wanita.

Pada penelitian ini, *gender* tidak terbukti sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara *fraud pentagon* dengan pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini barangkali dapat disebabkan karena laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan upaya pengendalian *fraud* mempunyai kompetensi yang sama dalam memproses informasi ataupun data yang ada (Rahmida dan Urumsah, 2020).

Pengalaman merupakan fenomena subjektif dan holistik di mana orang membangun pengalaman berdasarkan aturan yang tersedia di lingkungannya. Tegasnya, konteks di mana interaksi terjadi berperan penting dalam mendefinisikan pengalaman. Konteks digunakan secara bergantian untuk menunjukkan ruang dan tempat.

Pada penelitian ini, pengalaman tidak terbukti sebagai variabel yang bisa memoderasi keterkaitan antara *fraud pentagon* dengan pengendalian *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini seiring dengan Rahmida dan Urumsah (2020) yang menguraikan bahwa pegawai yang mempunyai pengalaman lebih atau sama 6 tahun dan pegawai yang mempunyai pengalaman kurang dari 6 tahun mempunyai kompetensi hampir serupa dalam memproses informasi yang ada.

Organisasi yang kerap melakukan bisnis dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa memiliki kecondongan untuk mempraktikkan *fraud* akuntansi. Bisnis dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa terjadi saat salah satu pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak yang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Teori *Fraud Pentagon* digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dorongan individu melakukan *fraud* untuk melihat sisi psikologis yang melakukan *fraud* dari sisi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi. Responden di penelitian ini merupakan pegawai bagian keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap data yang dihimpun, hasil penelitian ini menerangkan bahwa:

- 1) Tekanan tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagian pelaku *fraud* melaksanakan perilaku kecurangan bukan karena ada tekanan ekonomi ataupun peluang, melainkan lazimnya para pelaku berpendapat apa yang dilakukannya adalah hal yang lazim dan tidak menentang hukum dan kemanusiaan.
- 2) Kesempatan berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan semakin tinggi peluang pada suatu organisasi, maka semakin tinggi kesempatan terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut. Terbatasnya akses dan tidak sejalanannya sistem pengadaan barang dan jasa menciptakan celah terjadinya *fraud*.
- 3) Rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini kemungkinan disebabkan integritas dan moralitas serta perilaku etis pegawai yang masih sangat baik, dimana pelaku *fraud* sering berupaya untuk membernarkan perilakunya dengan berusaha untuk mencari alasan.
- 4) Kompetensi berpengaruh positif terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan semakin bagus kompetensi pegawai, maka semakin besar kecurangan yang akan terjadi.

- 5) Arogansi tidak berpengaruh terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini kemungkinan disebabkan pegawai yakin bahwa kontrol internal yang dipraktikkan bisa mengenai dirinya sehingga khawatir adanya sanksi yang akan menangkapnya.
- 6) *Gender*, Pengalaman dan Hubungan Istimewa tidak memoderasi terhadap pengendalian *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini kemungkinan disebabkan karena laki-laki dan perempuan dalam melakukan upaya pengendalian *fraud* mempunyai kecakapan yang sama dalam memproses informasi ataupun data yang ada. Pegawai yang mempunyai pengalaman lebih atau sama 6 tahun dan pegawai yang mempunyai pengalaman kurang dari 6 tahun mempunyai kecakapan hampir serupa dalam memproses informasi yang ada, serta bahwa yang mempunyai maupun tidak yang mempunyai hubungan istimewa, para pegawai jujur dan tidak memanfaatkan hak istimewa untuk meloloskan rekanan pada saat proses pengadaan barang dan jasa.

## 5.2 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, penelitian ini memberikan kontribusi:

- 1) Memberi tambahan sumber penelitian tentang *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa terhadap berbagai pihak dalam upaya menguji aspek-aspek dalam *fraud pentagon* untuk menganalisis kecenderungan pelaku *fraud*, terutama dalam hubungannya dengan *fraud* pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi Swasta, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 2) Peneliti mengkombinasikan teori *fraud* pentagon dengan variabel moderasi gender, pengalaman, dan hubungan istimewa. Gabungan variabel tersebut bisa menjadi sumbangan model penelitian berikutnya memperhatikan bahwa referensi penelitian kuantitatif di kasus ini masih amat tidak cukup luas.

### **5.3 Implikasi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada :

- 1) Atasan atau pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang terkait agar terus mengembangkan dan menyinkronkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem komputerisasi sehingga memudahkan akses untuk melakukan evaluasi pada sistem pengadaan barang dan jasa. Membangun susunan kontrol internal yang baik, mengefesienkan kegiatan kontrol, menaikkan budaya organisasi dan mengefektifkan kegunaan internal audit agar tidak ada kesempatan untuk melakukan *fraud*.
- 2) Atasan atau pimpinan yang terkait tetap mempertahankan tidak menunjukkan sikap berkuasa atas segala sesuatu dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga para stakeholder tidak beranggapan bahwa kontrol internal dan kebijakan yang ada tidak berlaku untuknya.

### **5.4 Keterbatasan Penelitian**

Mengenai hasil dari penelitian ini masih ada kekurangan dan keadaan terbatas yang barangkali diakibatkan oleh faktor eksternal yakni situasi responden, area pembagian angket, teknik pembagian angket, dan faktor internal berupa kecakapan penulis. Secara umum, dijelaskan keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Tidak diterimanya peneliti di beberapa perguruan tinggi ketika menyebar kuisisioner.
- 2) Penggunaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari responden penelitian ini disangka kurang bisa mempersepsikan kenapa oknum berperilaku *fraud* namun peneliti sudah memberi justifikasi opsi responden tersebut.
- 3) Keterbatasan responden lebih kepada bagian keuangan sehingga membutuhkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diluar Yogyakarta dan Jawa Tengah

### **5.5 Saran**

- 1) Cara kerja pengadaan barang dan jasa adalah tahapan yang mengeterkaitkan banyak individu, tahapan ini tidak lepas dari politik kepentingan. Diharuskan pegawai yang mempunyai integritas dan mempunyai komitmen atas sistem pemerintahan yang bebas korupsi dan aturan yang tegas. Lainnya, pimpinan yang berwenang juga sepatutnya harus benar mengetahui batas otoritasnya dalam proses pengadaan dan lebih mengetahui bahwa kehadirannya mewakili kepentingan banyak orang. Perlunya komitmen dari seluruh pihak untuk menangkal *fraud* dalam tahap ini.
- 2) Sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang dipakai saat ini disangkakan sudah baik, namun diharuskan mengembangkan sistem secara kontinyu sehingga makin tidak ada peluang berlangsungnya *fraud*. Fungsi nyata dalam sistem ini juga penting sehingga *stakeholder* dapat leluasa mengakses dan menjalankan kontrol atas proses pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A., & Maarof, M. A. (2016). Fraud Detection System: A Survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 68, 90–113.
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Abdurrachman, A., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Pentagon Fraud Terhadap Fraudulent Financial Statement Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 20(3), 269–280. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i3.284>
- Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44–62. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp44-62>
- AICPA. (2017). Consideration of Fraud in a Financial Statement. *Construction Contractors*, 175–188. <https://doi.org/10.1002/9781119480310.ch12>
- Akbar, T. (2017). The Determination of Fraudulent Financial Reporting Cause by Using Pentagon Theory on Manufacturing Companies in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(5), 106–113.
- Albrecht, W. S., & Albrecht, C. C. (2009). *Fraud Examination* (3rd ed.).
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2014). *Fraud Examination* (5th ed.). Cengage Learning.
- Alfian, N. (2020). Pengaruh Financial Stability, Shange In Auditors, Dchange, CEO's Pict Pada Fraud dalam Perspektif Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 69–80.
- Amaliah, B. N., Januarsi, Y., & Ibrani, E. Y. (2015). Perspektif Fraud Diamond Theory dalam Menjelaskan Earning Management Non-GAAP pada Perusahaan Terpublikasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 51–67. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art5>

- Aprilia, V. R., Surya, R. A., & Zarefar, A. (2017). Pengaruh Financial Stability, External Pressure, Ineffective Monitoring, Change In Auditor, Change In Director dan Frequent Number Of CEO's Picture Terhadap Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Pentagon (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*.
- Ardianingsih, A. (2018). *Audit Laporan Keuangan* (B. Fatmawati (Ed.)). PT Bumi Aksara.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.24076/jspg.2020v2i1.173>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). *Report To The Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.
- Astuti, S., Zuhrohtun, Z., & Kusharyanti, K. (2015). Fraudulent Financial Reporting in Public Companies in Indonesia: An Analysis of Fraud Triangle and Responsibilities of Auditors. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(2), 283–290. <https://doi.org/10.14414/jebav.v18i2.821>
- Aulia, T. Z. (2012). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan : Pengujian Teori Fraud Diamond. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7*, 306–315.
- Barón, J. D., & Cobb-Clark, D. A. (2010). Occupational Segregation and the Gender Wage Gap in Private- and Public-Sector Employment: A Distributional Analysis. *Economic Record*, 86(273), 227–246. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2009.00600.x>
- Berbaum, D. (2020). Benchmarking and Best-Practice Analysis in Financial Accounting—The Case of Related Party Disclosures. *Journal of Applied Research in Digital Economy (JADE)*, May, 3–10.
- Capezio, A., & Mavisakalyan, A. (2015). Women in the boardroom and fraud: Evidence from Australia. *Australian Journal of Management*.
- Chen, S., & Gangopadhyay, A. (2013). A Novel Approach to Uncover Health Care Frauds through Spectral Analysis. *IEEE International Conference on Healthcare Informatics*, 499–504.

- Christian, N., Basri, Y. ., & Arafah, W. (2019). Analysis of Fraud Pentagon To Detecting Corporate Fraud in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 3(08), 1–13.
- CIMA. (2008). Fraud Risk Management: A Guide to Good Practice. In *Chartered Institute of Management Accountants* (pp. 1–80).
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study In The Social Psychology Of Embezzlement*. Free Press.
- Deloitte. (2014). *Preventing Procurement Fraud and Corruption* (Issue October, pp. 1–6).
- DetikNews. (2013). *Tiga Dosen UNM Didakwa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Lab MIPA*.
- Devy, K. L. S., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Frequent Number of CEO's Picture, Pergantian Direksi Perusahaan dan External Pressure dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Listing Di Bei Periode 2012-2016). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Farmashinta, P., & Yudowati, S. P. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsu yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017). *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 349–363.
- Febriana, N. R. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Pentagon Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Pada Uji Kompetensi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 37–72.
- Fitri, Fanalia, & Nadirsyah, N. (2019). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 412–427. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12575>

- Fitri, Finalia, & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 69–84. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437>
- Fornell, C., & Larcker, D. V. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(382–388).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares, Konsep Teknik dan Aplikasi*. BP Universitas Diponegoro.
- Golden, T. W., Skalak, S. L., & Clayton, M. M. (2006). *A Guide to Forensic Accounting Investigation* (1st ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Gupta, V. (2019). CFO Gender and Financial Statement Irregularities. *The Academy of Management Journal*, 63(3).
- Handoko, B. L., Lindawati, A. S. L., & Vienna, M. (2020). Fraud Pentagon Model for Detecting Fraudulent Financial Reporting in Banking Sector. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(6), 2832–2838. <https://doi.org/10.35940/ijrte.F8380.038620>
- Hewett, R., Shantz, A., Mundy, J., & Alfes, K. (2017). Attribution Theories in Human Resource Management Research: A Review and Research Agenda. *International Journal of Human Resource Management*, 29, 87–126.
- Hidayah, E., & Saptarini, G. D. (2019). Pentagon Fraud Analysis in Detecting Potential Financial Statement Fraud of Banking Companies in Indonesia. *International Conference on Accounting, Business, & Economics*, 3(2010), 89–102.
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 275–294.
- Horwath, C. (2010). *Playing Offense in a High-Risk Environment*.
- Horwath, C. (2011). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *United States of America: Crowe Horwath LLP*, 1–

62.

- IAS 24 — Related Party Disclosures.* (n.d.).
- ICW. (2016). *Korupsi di Perguruan Tinggi.*
- Jamil, H. (2012). Pengawasan (audit) di Lingkungan Kementerian Agama. *Fokus Pengawasan*, 8(29), 26–32.
- Jeon, K. (2019). The Characteristics of Board of Directors and Related Party Transactions. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(3), 1–11.
- Jian, M., & Wong, T. J. (2003). Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. *SSRN Electronic Journal*, 1–48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.424888>
- Juliantini, D. A. T., & Padnyawati, K. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Independen Pemerintah (Studi Kasus: Bpk Ri Perwakilan Provinsi Bali). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 7, 16–31.
- Kelley, H. . (1967). *Attribution Theory in Social Psychology.*
- Kompas. (2020). *ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-Modusnya.*
- Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., & Armstrong, G. (2005). *Principles of Marketing* (4th ed.). British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (4th ed.). Erlangga.
- Local Government Association. (2015). Managing the Risk of Procurement Fraud. *CIPFA Counter Fraud Centre.*
- Ludigdo, U. (2018). Korupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, 4(1), 1–12.
- Mackevičius, J., & Giriūnas, L. (2013). Transformational Research of the Fraud Triangle. *Ekonomika*, 92(4), 150–163. <https://doi.org/10.15388/ekon.2013.0.2336>
- Malik, A. A. (2017). Teori Pengadaan Barang Dan Jasa Publik teori Pengadaan Barang Dan Jasa Publik. *Universitas Bakrie, September 2017*, 1–43.
- Manzaneque, M., Priego, A. M., & Merino, E. (2016). Corporate governance effect

- on financial distress likelihood: Evidence from Spain. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 19(1), 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.04.001>
- Miller, D. T., & Ross, M. (1975). Self-Serving Biases in the Attribution of Causality: Fact or Fiction? *Psychological Bulletin*, 82(2), 213–225. <https://doi.org/10.1037/h0076486>
- Mohamedbhai, G. (2016). The Scourge of Fraud and Corruption in Higher Education. *International Higher Education*, 84, 12–14.
- Muhsin, Kardoyo, & Nurkhin, A. (2018). What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective. *KnE Social Sciences*, 3(10), 154. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3126>
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 101, 601–618.
- Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2021). *Konsep Dasar SEM-PLS Menggunakan SmartPLS* (1st ed.). Pascal Books.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267.
- Nasution, H., & Fitriani. (2012). Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jom Fekon*.
- National Fraud Authority. (2011). *Procurement Fraud in the Public Sector*.
- Nguyen, A. H., Doan, D. T., & Nguyen, L. H. (2020). Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(5), 103. <https://doi.org/10.3390/jrfm13050103>
- Nindito, M. (2018). Financial statement fraud: Perspective of the Pentagon Fraud model in Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1–9.
- Novita, N. (2019). Teori Fraud Pentagon dan Deteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 64–73. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i2.2077>

- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- OECD. (2007). “*Integrity on Public Procurement, Good Practices from A to Z.*”
- Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 19 Tahun 2015.
- Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 16 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
- Phua, C., Lee, V., Smith, K., & Gayler, R. (2010). A Comprehensive Survey of Data Mining-based Fraud Detection Research. *Arxiv*, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.01.002>
- Pradanti, N. R., & Prastiwi, A. (2014). Analisis Pengaruh Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–12.
- Putra, K. N., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Kesesuaian Kompensasi Sebagai Variabel Moderating. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 96–119. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3815>
- Putriasih, K., Herawati, N. T., & Wahyuni, M. A. (2016). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124. <https://doi.org/10.1108/02686900810839820>
- Rahmatika, D. N., Kartikasari, M. D., Dewi Indriasih, D., Sari, I. A., & Mulia, A.

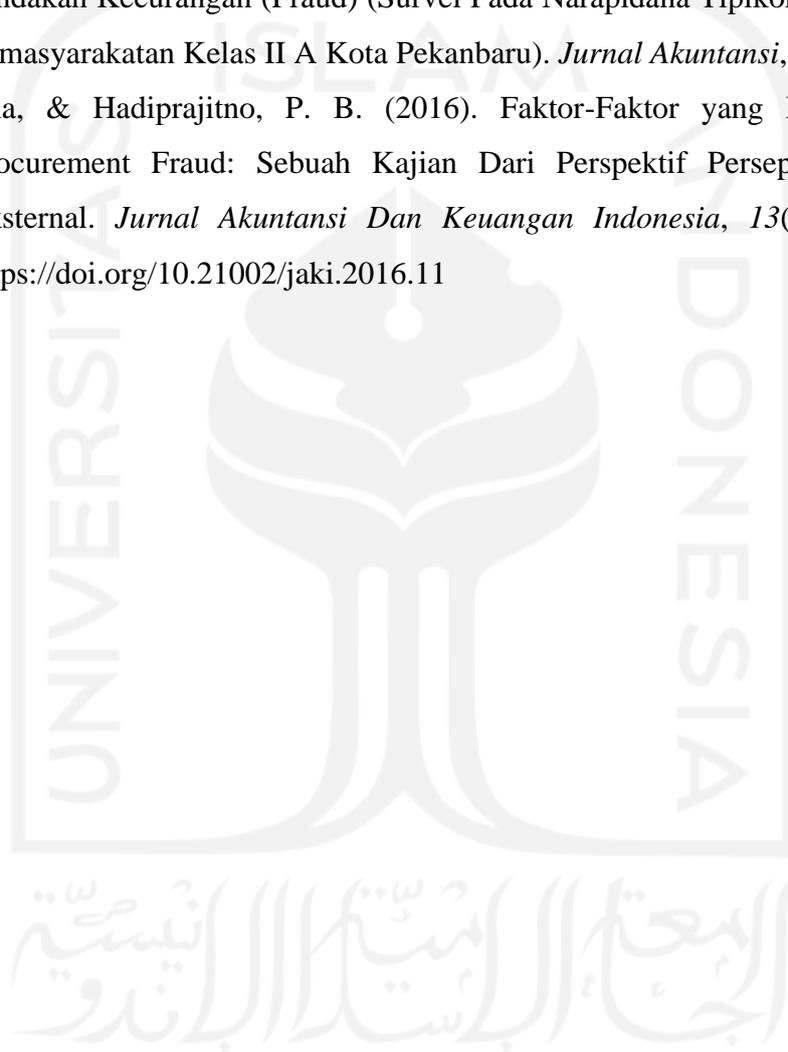
- (2019). Detection of Fraudulent Financial Statement; Can Perspective of Fraud Diamond Theory be applied to Property, Real Estate, and Building Construction Companies in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 4(6), 1–9. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.139>
- Rahmawati, & Usman, H. (2014). Pengaruh Beban Kerja Dan Pengalaman Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 68–76.
- Rahmida, M., & Urumsah, D. (2020). Determinan Deteksi Fraud Audit: Peran Moderasi Gender dan Pengalaman. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art1>
- Ramadhan, D. (2020). Root Cause Analysis Using Fraud Pentagon Theory Approach ( A Conceptual Framework ). *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(1), 118–125. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.142>
- Rokhim, S., & Jaya, I. M. L. M. (2021). Analisis Determinan Terjadinya Fraud di Pemerintahan. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1517>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1), 474–476.
- Rustiarini, N. W., T, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why People Commit Public Procurement Fraud? The fraud Diamond View. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating Ethical Values Into Fraud Triangle Theory in Assessing Employee Fraud: Evidence from the Malaysian Banking Industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>
- Salim, M., Syarifuddin, & Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178–185.

- Saparwati, M., Sahar, J., & Mustikasari. (2013). Pengalaman Kepala Ruang Dalam Mengelola Ruang Rawat iInap di RSUD Ambarawa. *Prosiding Konferensi Nasional PPNI Jawa Tengah 2013*, 1–5.
- Sawaka K, I. G. N. H., & Ramantha, I. wayan. (2020). Fraud Pentagon Theory in Detecting Financial Perception of Financial Reporting with Good Corporate Governance as Moderator Variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n1.824>
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23.
- Siddiq, F. R., & Hadinata, S. (2016). Fraud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 98–114. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2692>
- Simangunsong, F. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa: Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siswanto, S. (2020). Pengaruh Faktor Tekanan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(4), 287–300. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.76>
- Sorunke, & Abayomi, O. (2016). Personal Ethics and Fraudster Motivation: The Missing Link in Fraud Triangle and Fraud Diamond Theories. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(2), 159–165. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i2/2020>
- Statement of Auditing Standards (SAS) No. 99*. (n.d.).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). CV. Alfabeta.
- Sujana, E., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2019). Testing of Fraud Diamond Theory Based on Local Wisdom on Fraud Behavior. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 69(2018), 12–15.

<https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.3>

- Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bogor. *JURNAL AKUNIDA*, 3(2), 63–83.
- Tessa G, C., & Harto, P. (2016). Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–21.
- Theodorus, T. M. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi* (E. S. Suharsi (Ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Ulfah, M., & Nuraina, E. (2017). *Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI)*. 5(1), 399–418.
- Utama, I. G. P. O. S., Ramantha, I. W., & Badera, I. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Sebagai Prediktor Fraudulent Financial Reporting. *E-Jurnal*, 1, 251–278.
- Utami, I., Astiti, Y. W., & Mohamed, N. (2019). Fraud intention and machiavellianism: An experimental study of fraud triangle. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 269–279. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p269>
- Vasilyuk, F. (1988). *The Psychology of Experiencing* (Issue March).
- Wang, Y., Yu, M., & Gao, S. (2022). Gender Diversity and Financial Statement Fraud. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(2), 1–43.
- Weiner, B. (1992). *Human Motivation: Metaphors, Theories, and Research*. Sage Publications, Inc.
- Weiner, B., Heckhausen, H., & Meyer, W. . (1972). Causal Ascriptions and Achievement Behavior: A Conceptual Analysis of Effort and Reanalysis of Locus of Control. *Journal of Personality and Social Psychology*, 21(2), 239–248.
- Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan dan Kecenderungan Fraud di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara di Kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 120. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24422>

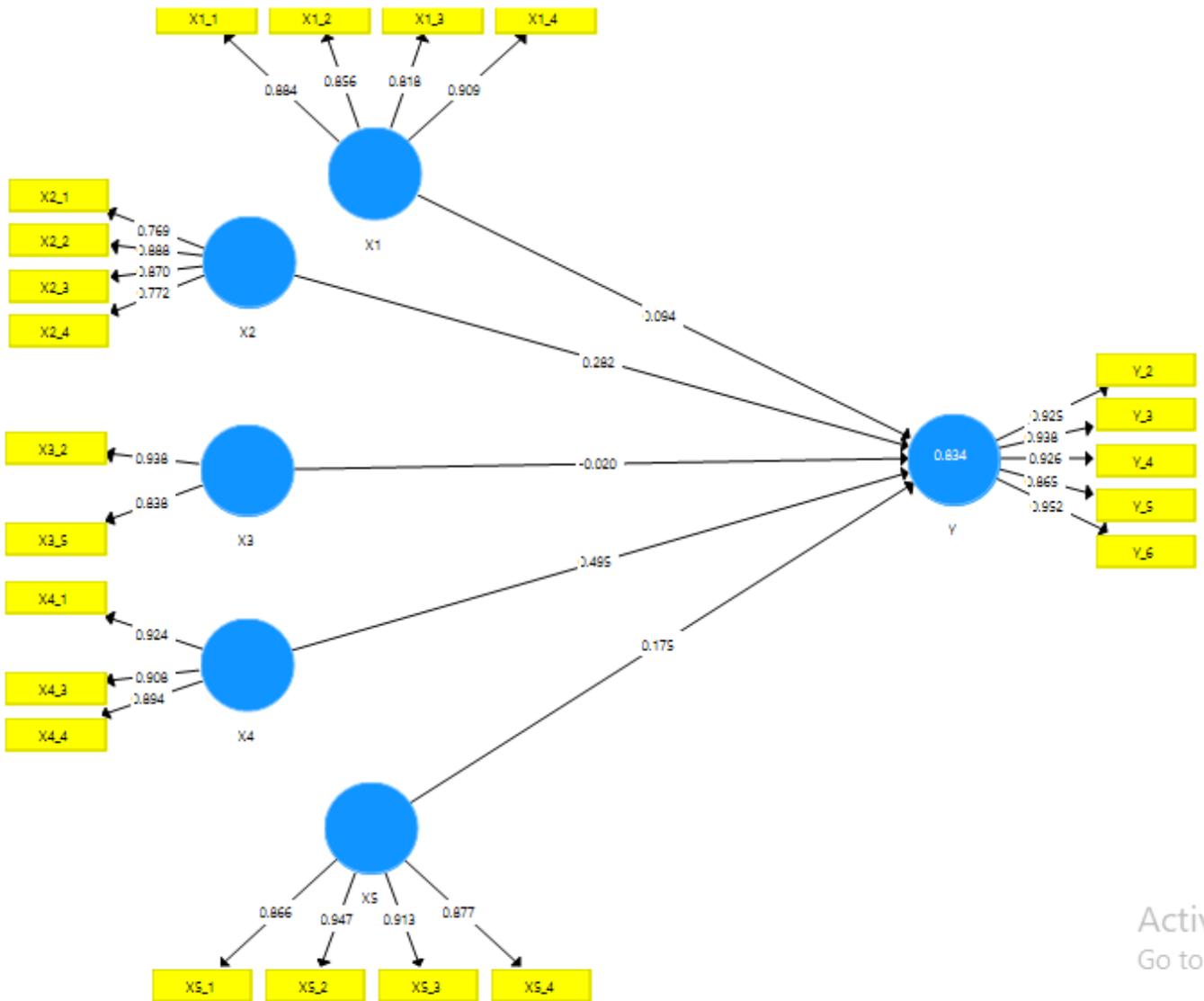
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud*. 74(12), 38–42.
- Yusof K, M., Khair A.H, A., & Simon, J. (2015). The Macrotheme Review. *A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends*, 3(4), 126–145.
- Zahara, A. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei Pada Narapidana Tipikor Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 1–19.
- Zulaikha, & Hadiprajitno, P. B. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11>



# LAMPIRAN



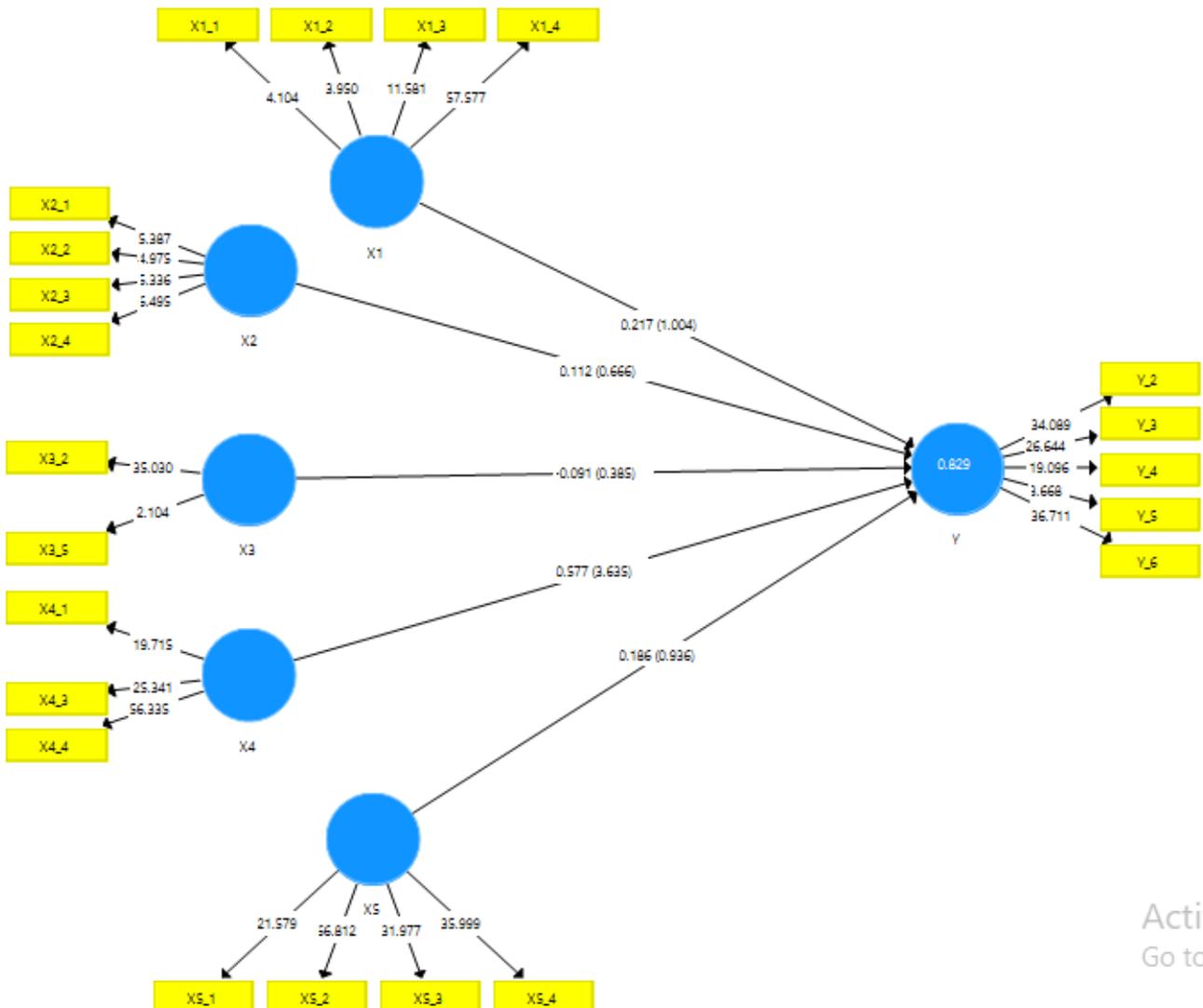
Lampiran 1. Diagram Model (*PLS Algorithm*) Seluruh Grup



Activa  
Go to St

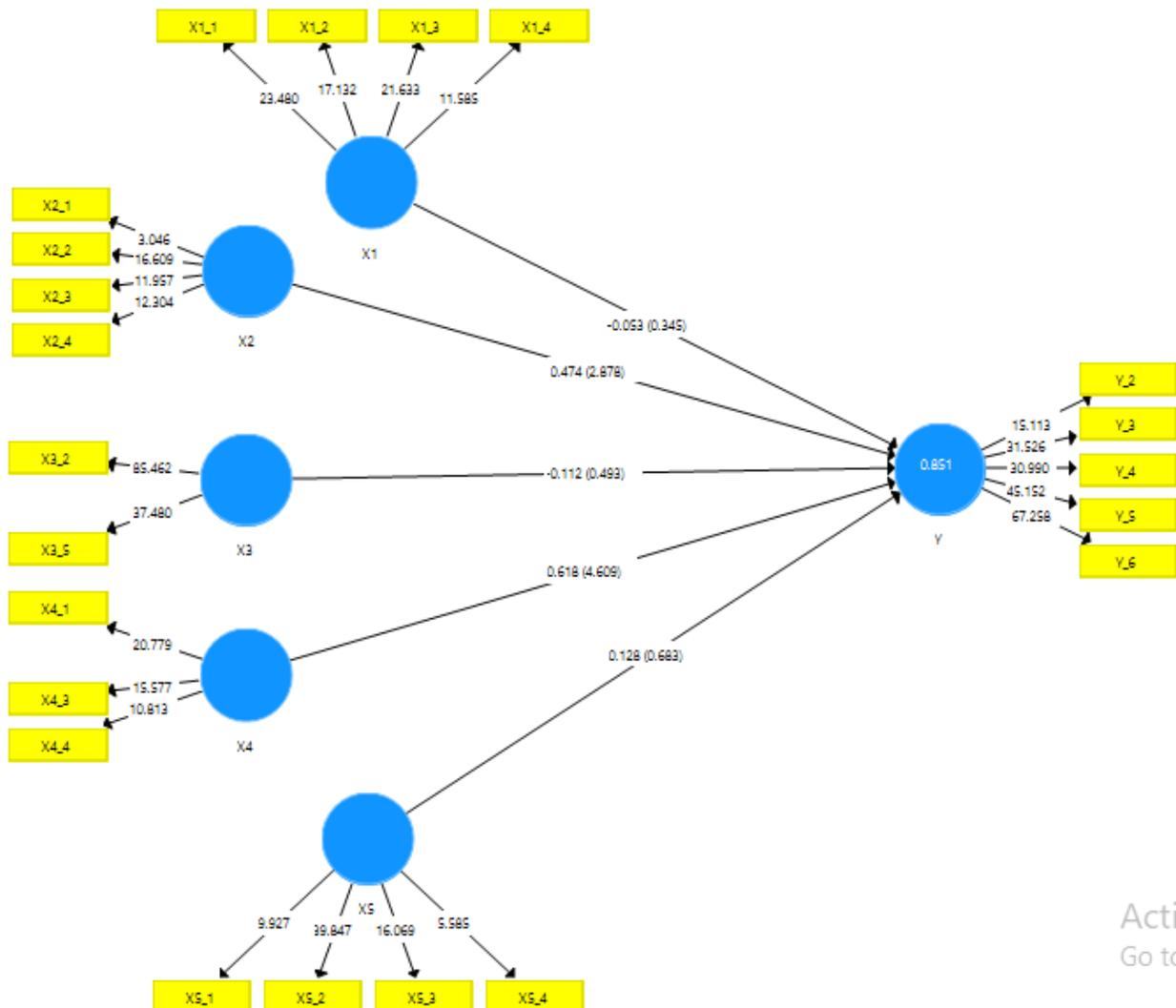
الجامعة الإسلامية  
الاستدراة

Lampiran 2. Diagram Model (*PLS Algorithm*) Subgrup Gender Laki-Laki



Activa  
Go to Sc

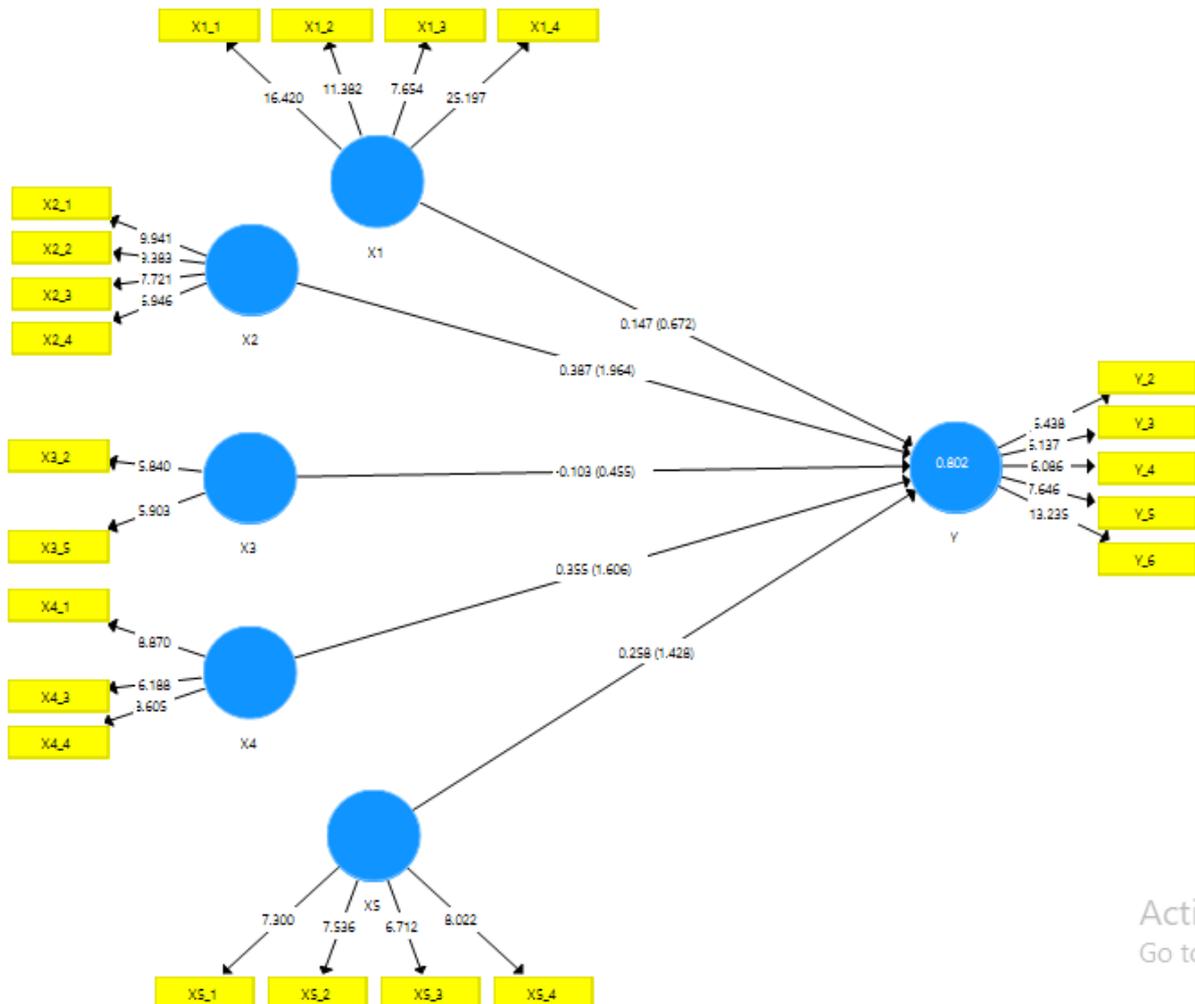
Lampiran 3. Diagram Model (PLS Algorithm) Subgrup Gender Perempuan



Activa  
Go to S

الجمعة الإسلامية الأندلسية

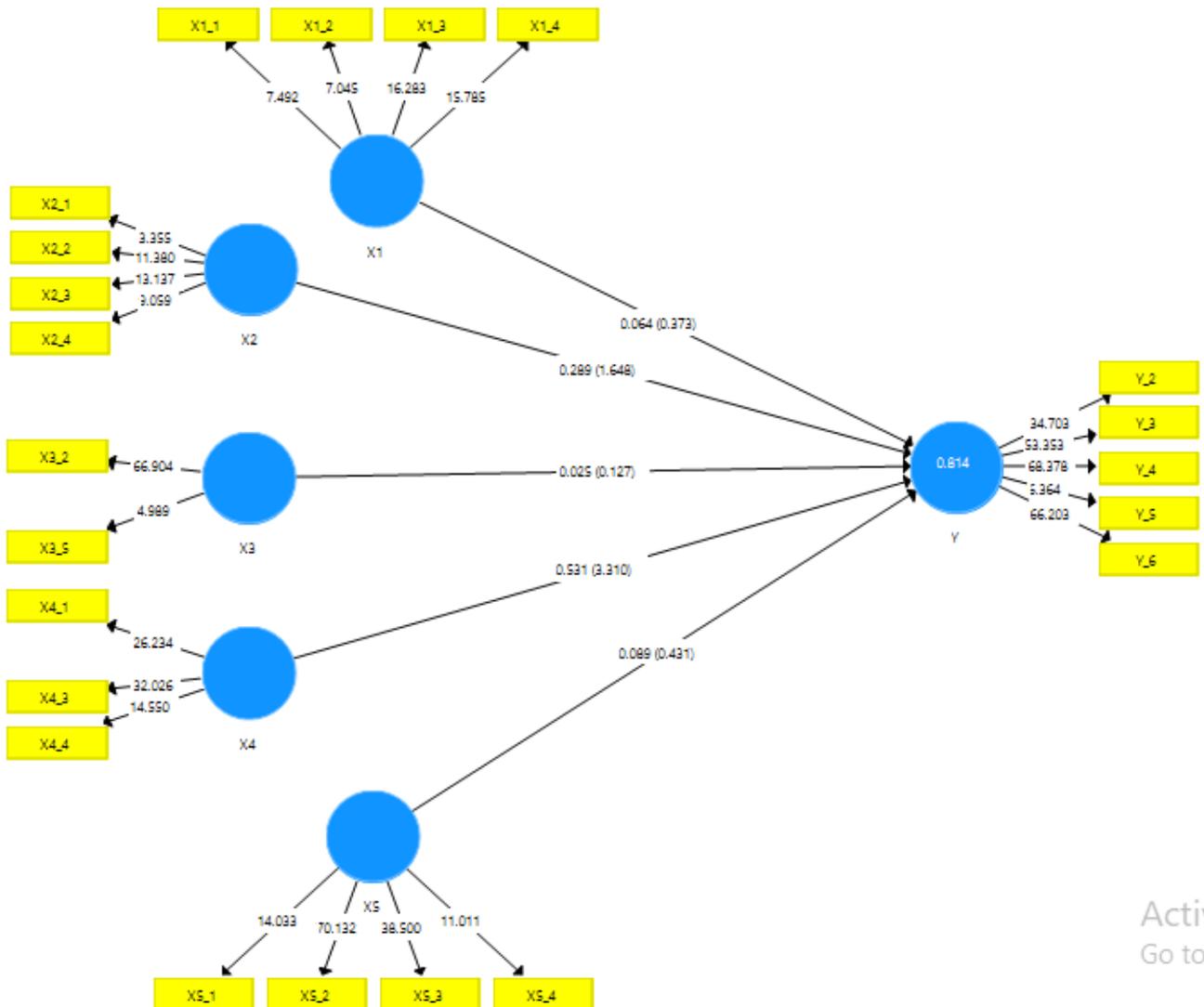
Lampiran 4. Diagram Model (*PLS Algorithm*) Subgrup Bepengalaman



Active  
Go to S

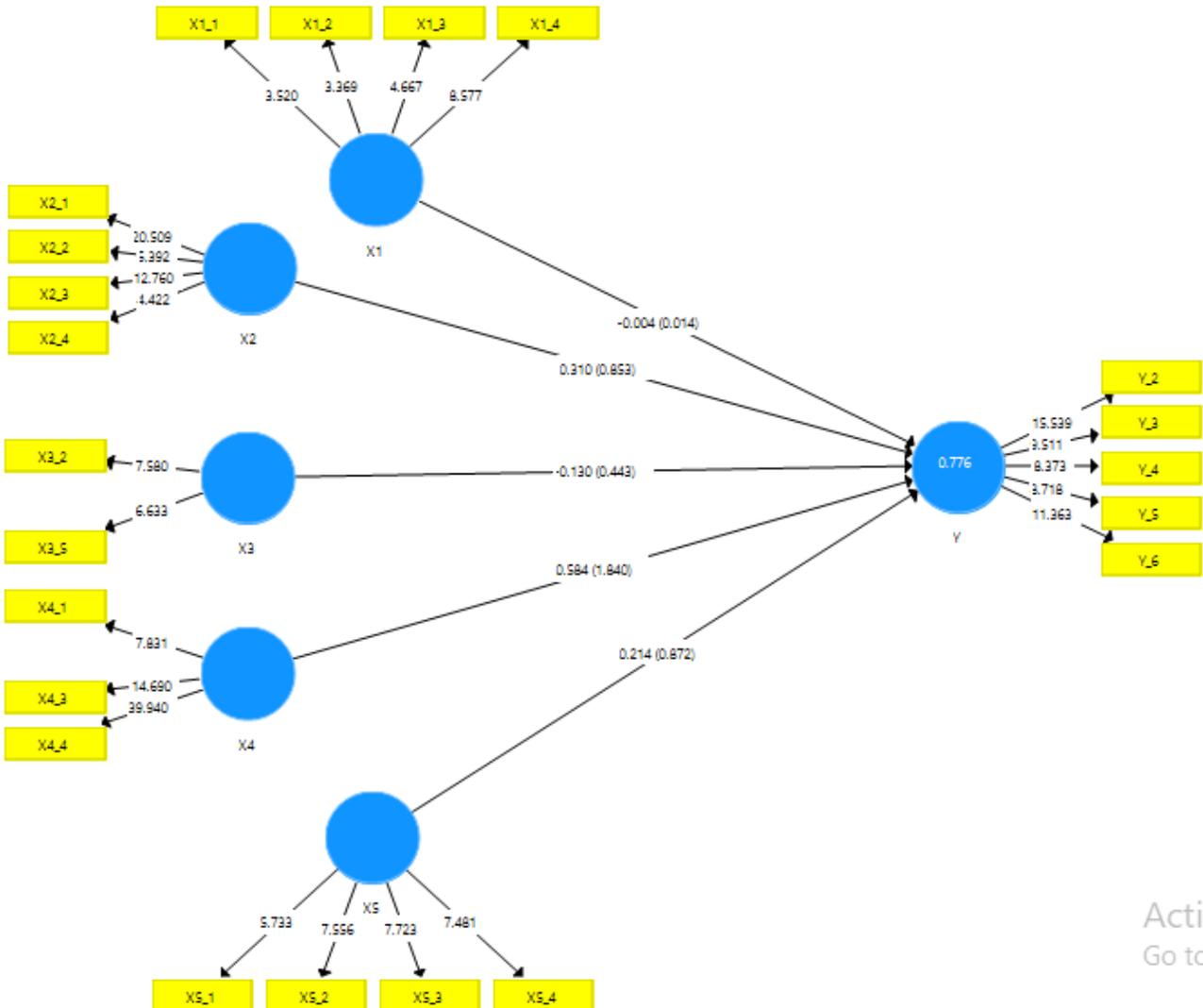
الجامعة الإسلامية  
الاستدائات

Lampiran 5 Diagram Model (*PLS Algorithm*) Subgrup Tidak Bepengalaman



Activ  
Go to ?

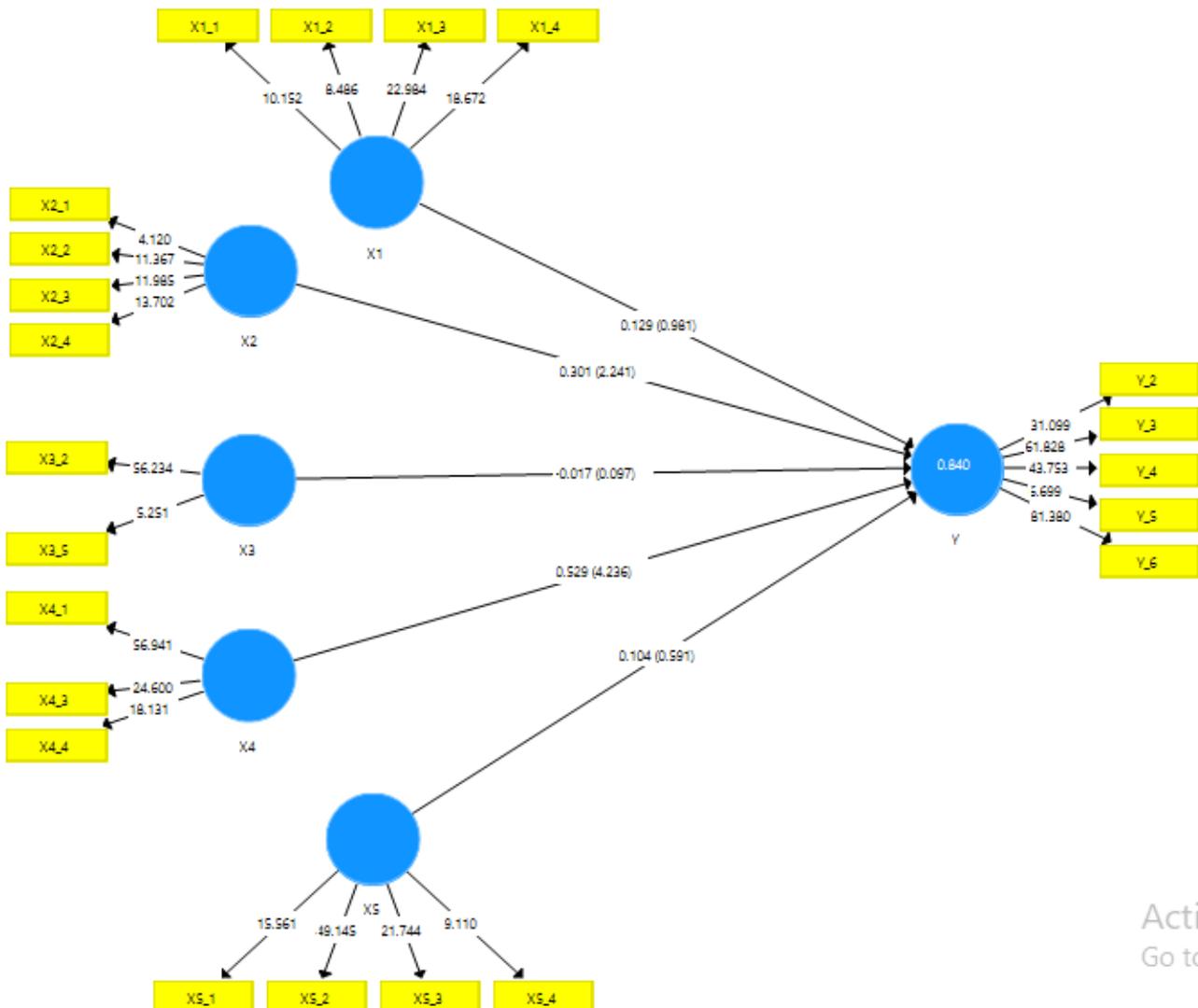
Lampiran 6. Diagram Model (*PLS Algorithm*) Subgrup Ada Hubungan Istimewa



Activ  
Go to 5



Lampiran 7. Diagram Model (*PLS Algorithm*) Subgrup Tidak Ada Hubungan Istimewa



Active  
Go to S